

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmad dan HidayahNya, penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2020 ini dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep tepat waktu. Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan amanat Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana dalam Pasal 19 menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan pihak DPRD Kabupaten Sumenep memiliki bahan informasi dan evaluasi secara lengkap yang dapat mencerminkan pencapaian kinerja Kepala Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020, sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang berminat untuk melihat dan mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2020. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah merupakan tanggungjawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih atas kerjasama yang baik dari semua pihak termasuk Jajaran Pemerintah serta masyarakat Kabupaten Sumenep yang telah memberikan dukungannya dalam rangka ikut menyukseskan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kabupaten Sumenep.

Semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan sebagai tolak ukur dalam memantapkan strategi kebijaksanaan Pembangunan Daerah pada masa yang akan datang dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mudah-mudahan seluruh upaya yang dilaksanakan senantiasa mendapat perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridha Allah SWT. Aamiin

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sumenep, 02 Maret 2021

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI, SH, MH

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum

Pemerintah Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sumenep terletak di ujung timur Pulau Madura sekitar 153 km ke arah timur Surabaya yang terdiri dari 27 kecamatan, 330 desa dan 4 kelurahan dan Kabupaten Sumenep memiliki pulau yang cukup banyak yaitu 126 pulau, terdiri dari 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni dengan Luas wilayah laut kurang lebih 50.000 km² sedangkan luas daratan (wilayah daratan dan kepulauan) sebesar 2.093,458 km² dengan ketinggian wilayah daratan antara 0 sampai 500 meter dari permukaan laut sehingga dapat ditanami beranekaragam tanaman pangan dan perkebunan potensial.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-2021 merupakan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mendorong perkembangan usaha kerakyatan yang makin mandiri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kesenjangan atau disparitas antara wilayah kepulauan dan wilayah daratan yang sudah maju, dan berbagai fasilitas layanan publik yang ada di Kabupaten Sumenep juga diharapkan dapat berjalan dengan baik karena didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan akuntabel.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah, guna mewujudkan kondisi akhir yang dicita-citakan melalui

serangkaian tahapan kegiatan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya:

- a. sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan;
- b. sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan;
- c. sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan dan;
- d. sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan maka Visi pembangunan Kabupaten Sumenep yang ingin diwujudkan pada periode 2016-2021 adalah

“SUPER MANTAP”

Yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”

Di dalam visi tersebut terdapat 7 makna kata kunci yaitu : Sumenep Makin Sejahtera, Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

1. Sumenep Makin Sejahtera di sini memiliki dua makna. *Pertama*, Sumenep sebagai sebuah wilayah mempunyai potensi sumber daya (*resources*) alam yang melimpah dan kaya khazanah kebudayaan. Apabila SDA yang melimpah seperti migas, pertanian, kelautan, perkebunan dan sektor industri (*home industri*) lainnya dapat dikelola dengan baik dan dimaksimalkan niscaya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (daya beli) masyarakat Sumenep. Kesejahteraan ditandai dengan semakin meningkatnya kualitas hidup yang layak, tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia yang meliputi pangan, papan, sandang,

kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur sosial budaya ekonomi yang memadai.

Bagi masyarakat Kabupaten Sumenep, persoalan kesejahteraan ini sangat penting, karena jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi *trend* terjadinya proses pendalaman dan tekanan kemiskinan cenderung meningkat. Untuk itu, dengan didukung kekayaan sumber daya alam yang terkelola dengan baik, dan ditambah lagi dengan dukungan infrastruktur yang memadai, itu semua niscaya akan dapat dijadikan modal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi, baik di tingkat regional, nasional maupun di tingkat global seiring diberlakukannya kebijakan perdagangan bebas: MEA dan AFTA.

Kedua, Sumenep sebagai sebuah entitas kultural memiliki kekayaan dan keragaman budaya/tradisi yang memiliki muatan nilai-nilai teologis (ke-Tuhanan), kemanusiaan dan sejuta makna (*meaning*) lainnya yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi positif dalam membangun peradaban manusia madura khususnya masyarakat Kabupaten Sumenep, seperti nilai toleransi, gotong royong, kuatnya ikatan persaudaraan di tengah hantaman *glamourisme* dan pengaruh global. Intinya, keragaman budaya Madura dapat dijadikan modal penguatan ikatan dan kohesi sosial masyarakat Madura dalam menghadapi intervensi budaya maupun perkembangan perubahan Masyarakat yang makin kontraktual, konsumtif dan permisif.

- 2. Pemerintahan yang Mandiri** adalah konsep yang berangkat dari suatu keyakinan bahwa masyarakat Sumenep yang didukung *stakeholders* pada dasarnya mempunyai kemampuan dan potensi swakarsa untuk mengatur dan mengurus proses pembangunan Daerah di Kabupaten Sumenep. Kemandirian di sini bukan berarti tidak menjalin kerjasama dengan pihak lain, namun pengertian kemandirian di sini difokuskan kepada proses pembangunan berdasar prakarsa/usul/inovasi Masyarakat Sumenep dan direalisasikan oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah Sumenep sendiri. Mandiri adalah kondisi yang tidak tergantung pada pihak lain, tidak

tersubordinasi, dan berkembang atas potensi swakarsa untuk menolong dirinya sendiri (*self-help*).

3. **Agamis** di sini dalam pengertian bahwa semua proses dan *output* pembangunan di Kabupaten Sumenep tidak semata-mata dikembangkan untuk tujuan meraih kesejahteraan ekonomi, namun harus diimbangi dengan pendekatan spiritual (Agama) untuk membentuk masyarakat Sumenep ber-*akhlaqul karimah*. Dengan kata lain apabila nilai – nilai luhur agama dijadikan modal/ *spirit* dalam berkehidupan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan, maka di Kabupaten Sumenep akan tercipta masyarakat yang memiliki nilai-moral yang kuat, dan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. **Nasionalis** adalah kesadaran dan sikap politik yang tidak mengedepankan ego kewilayahan dan jati diri masyarakat yang sempit, melainkan sebuah sikap politik yang menyadari sepenuhnya bahwa masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep adalah bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur, dan merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. **Transparan** atau keterbukaan untuk umum sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*good government*). *Good Governance* di sini dimaknai sebagai pengejawantahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (*citizen*) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya pemerintahan yang bersih adalah sikap di mana para pemegang kekuasaan dan Masyarakat diatur oleh suatu sistem kehidupan politik dan hukum yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Dalam praktiknya pemerintahan yang bersih (*clean government*) adalah model pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggungjawab (*accountable*), yang selalu mampu memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat. Transparansi mutlak diwujudkan sejak proses pembangunan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan refleksi, sehingga dengan transparansi tersebut semua

proses pembangunan hingga *output* yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

6. **Adil** adalah ikhtiar politik pembangunan di Sumenep untuk meminimalisir 'ketimpangan' distribusi pembangunan antara daratan dan Kepulauan. Keadilan di sini tidaklah bersifat kuantitatif *fifty-fifty*, namun pola distribusi hasil-hasil pembangunan dikembangkan secara proporsional berdasar kebutuhan (*need assesment*) masyarakat, sehingga dengan pola keseimbangan dan keadilan pembangunan, maka antara masyarakat daratan dan kepulauan akan sama-sama dapat merasakan 'manis'nya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Sumenep.
7. **Profesional** bahwa semua proses dan pelaksanaan pembangunan Sumenep dilakukan secara profesional yang mengarah kepada kemampuan *skill* dan sesuai dengan keahlian masing-masing pihak. Penegasan ini penting agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah, fokus dan tepat sasaran sesuai dengan perencanaan. Profesional di sini tidaklah berarti mendatangkan 'orang luar' (baca; asing) sebagai aktor pembangunan, namun dalam proses pelaksanaannya harus dimaksimalkan peran aktif atau partisipasi masyarakat Sumenep sendiri yang memang mempunyai kapasitas dan pengalaman dalam pengelolaan pembangunan secara swakarsa dan swadaya.

1.2.2. Misi

Berdasarkan Undang-undang No. 25 tahun 2004, misi adalah upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan **SUPER MANTAP** seperti dimaksud di atas telah dirumuskan Misi Prioritas Pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan agar tujuan pembangunan dapat tercapai. Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Misi Pertama, **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.** Sumber

Daya Manusia merupakan subjek utama dalam pembangunan sehingga Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan produktif menjadi penentu keberhasilan pembangunan. Dengan SDM yang berkualitas, Kabupaten Sumenep akan melahirkan generasi unggul yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan di Internasional. Peningkatan kualitas SDM tersebut dilakukan melalui upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan Pendidikan dapat dilihat dari peningkatan angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Melek Huruf dan peningkatan angka IPM. Sedangkan peningkatan kualitas kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pengentasan kemiskinan juga menjadi langkah strategis dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemberdayaan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan tersebut dapat dilihat dari peningkatan daya beli masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.

Misi Kedua, **Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Wilayah Kepulauan dan Daratan yang Didukung Pengelolaan SDA serta Lingkungan.**

Ketersediaan dan kemajuan infrastruktur merupakan penunjang utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep. Adanya peningkatan infrastruktur dapat mendukung kemajuan di bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan seluruh aksesibilitas kebutuhan masyarakat. Pemerataan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dengan adanya percepatan pembangunan di bidang infrastruktur dapat mengurangi kesenjangan diantara keduanya yang diikuti oleh pemerataan pembangunan di seluruh sektor. Peningkatan infrastruktur tersebut juga harus berwawasan lingkungan dengan didukung oleh pengelolaan Sumber Daya Alam secara tepat.

Misi Ketiga, **Meningkatkan Kemandirian Perekonomian Pedesaan dan Perkotaan dengan Memperhatikan Potensi Ekonomi Lokal yang Unggul Berdaya Saing Tinggi.** Kemandirian ekonomi merupakan kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat untuk mengatur dan mengelola sumber daya daerahnya sendiri melalui prakarsa, inovasi, dan aspirasi masyarakat serta direalisasikan sendiri oleh masyarakat Sumenep dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Beragamnya potensi ekonomi lokal di Kabupaten Sumenep yang memiliki nilai jual dan daya saing tinggi menjadi modal dasar dalam mewujudkan perekonomian Kabupaten Sumenep yang mandiri. Peningkatan kemandirian perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui berbagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan kapasitas dan perluasan sektor usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), berbagai pelatihan bagi wirausaha muda, peningkatan daya tarik investasi, dan pemanfaatan teknologi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi di sektor pertanian, industri dan perdagangan serta optimalisasi pariwisata daerah yang mempunyai potensi untuk dikembangkan, melalui pemberdayaan masyarakat pada wilayah-wilayah dengan potensi yang berbeda, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang pada muaranya diharapkan mampu member dukungan pada kesejahteraan masyarakat.

Misi Keempat, **Meningkatkan Kultur dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Accountable.** Tata Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah tata pemerintahan yang bersih, tertib dan akuntabel serta menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektif, efisien, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokratisasi, profesionalis medan membuka partisipasi masyarakat. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini ditujukan untuk menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik memerlukan proses dan komitmen serta sinergi dari seluruh *stakeholder* baik dari aparat pemerintah, sektor swasta dan masyarakat secara proporsional dan bertanggungjawab. Setiap aparat

pemerintah harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Di samping itu, pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik menjadi bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu sehingga pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan secara profesional, bersih dan akuntabel yang didukung kompetensi SDM yang handal. Keberhasilan Pemerintahan yang baik dapat ditunjukkan oleh tidak adanya tindak pidana KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), keberhasilan penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik, peningkatan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dan peningkatan kinerja birokrasi.

Misi Kelima, **Meningkatkan Tata Kelola Kehidupan Masyarakat Aman dan Kondusif Melalui Partisipasi Masyarakat serta Stakeholder Dalam Proses Pembangunan.** Kondisi aman dan tertib merupakan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep yang ditandai oleh tidak adanya tindakan kriminalitas, terciptanya kondisi masyarakat yang kondusif dan terlaksananya kebebasan demokrasi yang bertanggung jawab. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan juga dapat menciptakan stabilitas sosial sehingga kelangsungan hidup yang aman dan damai dapat terwujud. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), mencukupi ketersediaan petugas perlindungan masyarakat (LinMas), dan menyelesaikan serta mengurangi konflik sosial yang terjadi dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Misi Keenam, **Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan, budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.** Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang kaya kebudayaan dan nilai-nilai agamis. Hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki banyak adat istiadat dan kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan budaya lokal merupakan sebuah potensi pariwisata yang dapat

menarik wisatawan baik lokal dan manca negara. Di samping itu, masyarakat Sumenep juga hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Sikap toleransi antar umat beragama yang senantiasa terjaga dalam kehidupan bermasyarakat harus terus dikembangkan agar semangat persatuan dan kesatuan menjadi pilar penyangga yang kokoh menuju Kabupaten Sumenep yang maju dan sejahtera. Pemuda sebagai generasi penerus bangsa juga memiliki peran dan fungsi strategis dalam akselerasi pembangunan dengan berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas pemuda harus terus dilakukan salah satunya melalui pemberdayaan potensi kepeloporan pemuda dan olahraga.

1.2.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam mewujudkan visi Kabupaten Sumenep 2016-2021 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Tujuan dari misi 1 adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Sumenep;
2. Tujuan dari misi 2 adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur daratan dan wilayah kepulauan;
 - b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
3. Tujuan dari misi 3 adalah :
 - a. Meningkatkan perekonomian daerah;

4. Tujuan dari misi 4 adalah :

a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel;

5. Tujuan dari misi 5 adalah :

a. Meningkatkan kemandirian masyarakat desa;

b. Meningkatkan stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat;

6. Tujuan dari misi 6 adalah :

a. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme dan kearifan lokal;

Tujuan pembangunan diatas kemudian perlu dijelaskan ke dalam sasaran pembangunan. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun dan Sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Misi 1 adalah :

a. Meningkatnya Akses dan Kualitas pendidikan

b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

2. Sasaran Misi 2 adalah :

a. Meningkatnya kualitas infrastruktur

b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pemukiman/perumahan secara memadai

c. Meningkatnya kelestarian lingkungan

3. Sasaran Misi 3 adalah :

a. Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan

b. Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan

c. Meningkatnya konsumsi pangan dan keragaman pangan

d. Meningkatnya daya saing sector industry dan perdagangan

e. Meningkatnya daya saing sector Koperasi dan UMKM

f. Meningkatnya daya tarik wisata

g. Meningkatnya daya tarik Investasi

h. Meningkatnya kemandirian keuangan Pemerintah Daerah

4. Sasaran Misi 4 adalah :

- a. Terwujudnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Pemda
- b. Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Daerah

5. Sasaran Misi 5 adalah :

- a. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam aspek ketahanan lingkungan (ekologi), ketahanan ekonomi dan ketahanan social
- b. Menigkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat
- c. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak

6. Sasaran Misi 6 adalah :

- a. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama
- b. Meningkatya pelestarian nilai-nilai seni dan budaya.

1.3. Data Umum Daerah

1.3.1.Data Geografis Wilayah

1. Letak Wilayah

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu dari 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang terletak diantara 113° 32' 54" – 116° 16' 48" Bujur Timur dan 4° 55' – 7° 24' Lintang Selatan dengan dengan batas wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep adalah :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Madura
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa/Laut Flores
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Pamekasan

2. Luas Wilayah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep No. 11 Tahun 2006 tentang Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep, wilayah administrasi Kabupaten Sumenep seluas 2.093,458 km, yang terbagi menjadi 27 wilayah Kecamatan, 340 Desa dan 4 Kelurahan, 1,563 Dusun, 1.774 Rukun Warga (RW), 5.569 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah pulau sebanyak 126 pulau yaitu 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni.

Secara geografis wilayah Kabupaten Sumenep terbagi atas 2 (dua) wilayah yaitu Wilayah Daratan dan Kepulauan;

- Wilayah Daratan dengan luas 1.146,93 Km² (54,79%) terdiri dari 18 Kecamatan, 260 desa dan 4 kelurahan
- Wilayah kepulauan dengan luas 946,54 Km² (45,21%) terdiri dari 9 Kecamatan dan 70 desa

Berdasarkan gugusan pulau-pulau yang ada di Kabupaten Sumenep, pulau terjauh/paling utara adalah pulau Karamian Kecamatan Masalembu, dengan jarak tempuk lebih kurang 151 mil dari Pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Kalimantan. Sedangkan pulau yang paling timur adalah pulau Sakala Kecamatan Sapeken dengan jarak tempuh lebih kurang 165 mil dari pelabuhan Kalianget yang lebih dekat dengan Pulau Sulawesi.

Tabel 1.1

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sumenep

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km ²)
		Desa/Kel.	Dusun	
1.	Kota Sumenep	20	43	27,84
2.	Batuan	7	23	27,10
3.	Kalianget	7	26	30,19
4.	Manding	11	49	68,88
5.	Talango	8	62	50,27
6.	Bluto	20	60	51,25
7.	Saronggi	14	54	67,71
8.	Lenteng	20	79	71,41
9.	Giligenting	8	40	30,32
10.	Guluk-guluk	12	70	59,57
11.	Ganding	14	73	53,97
12.	Pragaan	14	72	57,84
13.	Pasongsongan	10	68	119,03
14.	Ambunten	15	53	50,54
15.	Dasuk	15	56	64,50
16.	Rubaru	11	37	84,46
17.	Batang-Batang	16	98	80,36
18.	Batu Putih	14	78	112,31
19.	Dungkek	15	66	63,35
20.	Gapura	17	57	65,78
21.	Gayam	10	58	88,40

No.	Kecamatan	Jumlah		Luas (Km2)
		Desa/Kel.	Dusun	
22.	Nonggunong	8	29	40,08
23.	Ra'as	9	38	38,90
24.	Masalembu	4	11	40,85
25.	Arjasa	19	156	241,99
26.	Kangayan	9	46	204,68
27.	Sapeken	11	61	201,89
JUMLAH		334	1.563	2.093,47

Sumber : - Kabupaten Sumenep dalam Angka 2019

- Dinas PMD Kab. Sumenep, Tahun 2019

3. Topografi

Topografi Kabupaten Sumenep umumnya tergolong **dataran rendah** dengan **sedikit berbukit** di bagian tengah, mempunyai ketinggian tempat **sedang** dan kemiringan tanah *landai*, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Topografi Kabupaten Sumenep

No	Kategori	Uraian	Luas (Ha)	%
A.	Ketinggian Tempat			
	1. Rendah	0 – 25 m dpl	65.951	33
	2. Sedang	25 – 100 m dpl	79.942	40
	3. Tinggi	> 100 m dpl	53.961	27
B.	Ketinggian Tempat			
	1. Datar	0° – 2°	51.962	26
	2. Landai	2° – 15°	125.908	63
	3. Miring	> 15°	21.984	11

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2019

4. Geologi

Jenis tanah di Kabupaten Sumenep di dominasi oleh kompleks Mediteran Merah, Litosol dan Grumosol, merupakan jenis tanah yang masih sangat muda atau baru berada pada tingkat permulaan dalam perkembangannya dan terjadi penimbunan liat pada horizon bawah, bersifat masam dan

kejenuhan basa pada kedalaman 180 sentimeter dari permukaan tanah kurang dari 15%. Pada tanah Grumosol kandungan litany cukup tinggi (lebih dari 30%) di seluruh horizon, mempunyai sifat menembang dan mengerut (sifat *vertik*): yang dalam keadaan kering, tanah akan mengerut sehingga pecah-pecah dan keras, dalam keadaan basah akan mengembang dan lengket. Kondisi tersebut akan menjadi kendala dalam perkembangan tanaman dan pencapaian sasaran produksi tanaman pangan, jika tidak didukung oleh perlakuan teknis budidaya tanaman yang mampu menyeimbangkan keberadaan unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam jumlah banyak; utamanya dengan perlakuan pemupukan.

5. Klimatologi

Secara umum kondisi geografi kabupaten Sumenep dilihat dari curah hujan tidak jauh beda dengan tempat lain. Curah hujan misalnya paling tinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu 98,5. Gejala alam akhir-akhir ini agak sulit diprediksi sehingga curahan hujan paling tinggi tidak berurutan berdasarkan bulan. Data tahun 2010 menunjukkan selain curah hujan paling tinggi di bulan Januari, juga terjadi pada bulan Mei, yaitu 67,5. Pada bulan Juli curah hujan menurun menjadi 0,1. Sementara pada bulan berikutnya cenderung mengalami penurunan sampai bulan Oktober.

Gejala alam yang sulit diprediksi mengakibatkan pada musim kemarau masih terjadi turun hujan. Secara umum musim kemarau terjadi pada bulan Agustus-Oktober, sebab dalam kurun waktu tersebut turun hujan tidak terjadi. Menurut catatan tahun 2010, rata-rata turun hujan sejumlah 109,9 hari. Curah hujan paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan Mei. Rata-rata jumlah hari hujan paling tinggi juga terjadi pada Januari dan Mei. Pada bulan Januari rata-rata hujan sebanyak 273,7 sementara pada bulan Mei sebanyak 171,3 jumlah hari hujan.

Penyinaran matahari paling tinggi terjadi pada bulan Agustus, September, dan Oktober. Pada bulan Agustus matahari sebesar 100% memancarkan sinarnya. Sedangkan bulan September dan Oktober masing-masing sebesar 96,1% dan 99,0. Sebaliknya sinar matahari agak terganggu sehingga tidak maksimal, terjadi pada bulan Pebruari. Bulan Pebruari

matahari hanya memancarkan sinarnya sebesar 56%, sementara itu pada bulan Desember sebesar 62,6%.

Meskipun matahari memancarkan sinarnya dengan persentase relative tinggi pada bulan Agustus, September dan Oktober, bukan berarti pada bulan-bulan itu suhu udara berada pada titik paling tinggi. Sebab menurut catatan yang ada suhu udara paling tinggi terjadi pada bulan Oktober, yaitu mencapai 29,6 derajat celcius. Sementara itu pada bulan Januari suhu udara menunjukkan titik terendah dibandingkan dengan bulan lainnya yakni sebesar 27,3 derajat celcius. Sebaliknya pada bulan Agustus matahari memancarkan sinarnya 100% justru suhu udara hanya sebesar 27,7%.

Data geografi lain adalah kecepatan angin. Di kabupaten Sumenep ada tiga bulan di mana kecepatan angin terkategori paling tinggi, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus dan September. Pada bulan Juli kecepatan angin memperlihatkan angka tertinggi yakni 8,4 knot sedangkan bulan September kecepatan angin mencapai 7,1 knot. Sementara pada bulan Maret, Nopember dan Desember adalah waktu kecepatan angin paling rendah dibanding pada bulan-bulan lainnya.

Keadaan cuaca dapat dilihat dari tiga hal, yaitu temperatur, kelembaban dan tekanan udara. Memperhatikan data yang tersedia pada tahun 2010 memperlihatkan bahwa temperatur paling tinggi mencapai 29,6 derajat celcius, yang terjadi pada bulan Oktober. Sedangkan temperatur paling rendah mencapai 24,5 derajat yang terjadi pada bulan Pebruari. Sementara itu penyinaran matahari maksimum atau tertinggi mencapai 100%, yang terjadi pada bulan Agustus dan pada bukan Oktober mencapai 99,0%. Penyinaran matahari terendah sebesar 56%, yang terjadi pada bulan Pebruari.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Sumenep berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020 (DKB Semester II Tahun 2020) sebanyak 1.138.168 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 549.301

jiwa (48%) dan perempuan 583.059 jiwa (52%) dengan sex ratio sebesar 93,28 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk perempuan berjumlah lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Sedangkan berdasarkan data Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPS, jumlah penduduk Kabupaten Sumenep sebanyak 1.124.436 jiwa dengan komposisi jenis kelamin laki-laki 542.735 jiwa (48%) dan perempuan 581.701 jiwa (52%) dengan sex ratio sebesar 93,30 %. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 93 penduduk laki-laki.

Penduduk Kabupaten Sumenep terdiri dari 5 suku bangsa yaitu: Madura, Jawa, Bugis, Mandar dan Bajoe. Dari kelima suku bangsa tersebut 3 suku bangsa, yaitu : Bugis, Mandar dan Bajoe berada di daerah kepulauan, yaitu: Kangean, Masalembu dan Sapeken yang lebih dekat ke Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sedangkan suku Madura merupakan suku mayoritas bertempat di wilayah daratan dan sebagian kecil di kepulauan.

Tabel 1.3

Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk se Kabupaten Sumenep

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Pragaan	Pragaan Laok	66.680	21.616	57,84	1153
2	Bluto	Bunbungan	47.675	15.475	51,25	930
3	Saronggi	Tanamerah	37.628	13.104	67,71	556
4	Giligenting	Aenganyar	24.158	8.243	30,32	797
5	Talango	Talango	38.745	13.884	50,27	771
6	Kalianget	Kalianget Timur	42.440	15.029	30,19	1406
7	Kota Sumenep	Pamolokan	75.762	24.574	27,84	2721
8	Batuan	Batuan	13.292	4.433	27,1	490
9	Lenteng	Ellak Laok	61.554	19.636	71,41	862
10	Ganding	Ketawang Larangan	36.427	11.211	53,97	675
11	Guluk-guluk	Guluk-guluk	50.128	14.721	59,57	841
12	Pasongsongan	Panaongan	52.308	15.658	119,03	439
13	Ambunten	Ambunten Timur	40.314	14.121	50,54	798
14	Rubaru	Rubaru	39.521	11.579	84,46	468
15	Dasuk	Kerta Timur	30.279	10.159	64,5	469

No	Kecamatan	Nama ibu Kota Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah KK	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
16	Manding	Manding Laok	29.836	9.392	68,88	433
17	Batuputih	Batuputih Laok	43.854	14.969	112,31	390
18	Gapura	Gapura Barat	37.363	12.774	65,78	568
19	Batang-batang	Batang-batang Daya	54.948	18.792	80,36	684
20	Dungkek	Dungkek	36.358	13.873	63,35	574
21	Nonggunong	Sokarame Paseser	13.870	5.825	40,08	346
22	Gayam	Pancor	32.565	13.625	88,4	368
23	Raas	Brakas	40.260	14.413	38,9	1035
24	Sapeken	Sapeken	52.087	16.401	201,89	258
25	Arjasa	Kalikatak	87.187	31.555	241,99	360
26	Kangayan	Kangayan	26.492	9.938	204,68	129
27	Masalembu	Sukajeruk	26.437	8.973	40,85	647
TAHUN 2020			1.138.168	383.973	2.093,47	544
TAHUN 2019			1.134.129	360.701	2.093,47	542
TAHUN 2018			1.126.724		2.093,47	539,89
TAHUN 2017			1.123.310		2.093,47	538,21
TAHUN 2016			1.104.540		2.093,47	536,58

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Pada tabel diatas, Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar tahun 2020 adalah Kecamatan Kota Sumenep sebanyak 75.762 jiwa atau sekitar 6,66% dari total jumlah penduduk, sedangkan Kecamatan Batuan memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebanyak 13.292 jiwa atau 1,17 % dari total jumlah penduduk.

Dengan luas wilayah ± 2.093,47 km², maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 adalah 544 jiwa/km².

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Dinamika Penduduk adalah perubahan/ pertumbuhan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, hal ini disebabkan karena adanya peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Sedangkan dalam demografi dikenal istilah penambahan penduduk alami dan penambahan penduduk total. Dimana penambahan penduduk alami hanya di pengaruhi

oleh kelahiran dan kematian, sedangkan pertambahan penduduk total di pengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi).

Berikut tabel jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sumenep berdasarkan BPS dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

Tabel 1.4
Perkembangan Kependudukan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2020

URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk :						
- B P S	jiwa	1.076.805	1.081.204	1.085.227	1.088.910	1.124.436
- Dispenduk & Capil	jiwa	1.123.310	1.126.724	1.130.260	1.134.129	1.138.168
Pertumbuhan penduduk:						
- B P S	%	0,438	0,409	0,372	0,339	3,26
- Dispenduk & Capil	%	1,69	0,30	0,31	0,31	0,36
Kepadatan penduduk :						
- BPS	jiwa/km2	514,36	516,47	518,39	520,15	537,11
- Dispenduk & Capil	jiwa/km2	537	538	540	540	544

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2020, hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS mencatat bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Sumenep meningkat sebesar 3,26 persen.

Sedangkan laju pertumbuhan penduduk menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,69 persen, tahun 2017 sebesar 0,30 persen, tahun 2018 sebesar 0,31 persen, tahun 2019 sebesar 0,31 persen dan tahun 2020 sebesar 0,36 persen.

1.3.4. Jumlah PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebut bahwa ASN terdiri dari PNS dan P3K. pada Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS adalah warga negara Indonesia

yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara itu, P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

PNS sering kali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pusat baik kementerian maupun lembaga pemerintahan pusat lainnya, serta PNS yang bekerja pada tingkat pemerintahan daerah, dengan tujuan mendorong kebijakan politik yang pro rakyat agar terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik. PNS juga bisa merencanakan dan mencanangkan suatu kebijakan politik dalam upaya menjalankan dan mendayagunakan kebijakan tersebut demi kepentingan rakyat.

Perkembangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Sumenep berdsarkan Jenis kelamin, Usia, Golongan, jenjang Pendidikan dan eselon sejak tahun 2016 s/d 2020 dapat diuraikan pada table berikut ini :

Tabel 1.5
Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
Laki – Laki	7.190	6.452	6.049	5.876	5.746
Wanita	3.263	3.203	3.092	3.123	3.191
Total	10.453	9.655	9.141	8.999	8.937

Tabel 1.6
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia

Usia	2016	2017	2018	2019	2020
Usia >55	1.340	1.416	1.438	1.505	1.662
Usia 45-55	4.774	4.342	4.099	3.864	3.631
Usia 36-45	3.076	2.739	2.685	2.652	2.637
Usia 25-35	1.258	1.156	918	937	949
Usia <25	5	2	1	41	58
Total	10.453	9.655	9.141	8.999	8.937

Tabel 1.7
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

Golongan	2016	2017	2018	2019	2020
Golongan I	190	180	165	142	135
Golongan II	2.570	2.539	2.230	1.980	1.836
Golongan III	4.577	4.143	4.113	4.405	4.659
Golongan IV	3.116	2.793	2.633	2.472	2.307
Total	10.453	9.655	9.141	8.999	8.937

Tabel 1.8
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
S-3	-	-	1	2	2
S-2	342	295	527	497	476
S-1	4.008	3.481	4.553	4768	4.947
D-III	818	1.020	966	1025	1.050
D-II	1.521	1.411	505	440	352
D-I	59	59	30	21	25
SLTA	3.161	2.903	2.285	2022	1887
SLTP	275	242	121	102	91
SD	269	244	153	122	107
Total	10.453	9.655	9.141	8.999	8.937

Tabel 1.9
Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon

Eselon	2016	2017	2018	2019	2020
Eselon II	35	35	33	32	28
Eselon III	188	192	203	202	194
Eselon IV	921	889	659	683	669
Eselon V	39	-	-	-	-
Fungsional	6.348	5.524	5.597	5.579	5.387
Staf PNS	2.922	3.015	2.649	2.503	2.659
Total	10.453	9.655	9.141	8.999	8.937

Sumber: Simpeg BKPSDM Kab. Sumenep

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan adalah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sumber

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah . Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan tujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk dapat peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada Perubahan APBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.270.049.164.828,00,- Kontribusi terhadap pendapatan daerah berasal dari berbagai komponen pendapatan yang terdiri atas (a) pendapatan asli daerah dan (b) Pendapatan Transfer yaitu dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, serta (c) lain-lain pendapatan yang sah.

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.10
Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
4	PENDAPATAN DAERAH	2.270.049.164.828,63	2.289.429.449.054,67	100,85%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	240.647.035.200,63	263.267.366.390,67	109,40%
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	28.136.500.000	32.365.904.163,00	115%
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	18.454.432.704	18.117.129.176,00	95,8
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.822.662.838,22	15.822.662.838,22	82,4
4.1.4	Lain lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	178.233.439.658,41	196.961.670.213,45	94,77
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.492.972.084.702,00	1.487.090.215.701,00	99,61%
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	104.284.725.885,00	102.687.153.173,00	83,91
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.106.373.716.000,00	1.090.899.516.000,00	100
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	282.313.642.817,00	293.503.546.528,00	94,65

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
		Rp.	Rp.	
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	536.430.044.926,00	539.071.866.963,00	100,49%
4.3.1	Pendapatan Hibah	67.778.000.000,00	41.288.410.000,00	98,61
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	76.457.014.326,00	105.903.820.563,00	150,86
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	367.104.745.000,00	367.239.350.800,00	100
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	25.090.285.600,00	24.640.285.600,00	99,78

1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satupihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatankegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik dari tahun ke tahun. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang, sebab jika tidak maka dalam jangka menengah dapat mengganggu kesinambungan dan kesehatan fiskal daerah.

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sumenep pada APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020 tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 1.11

Tabel Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

KODE	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
5	BELANJA DAERAH	2.887.094.821.390,94	2.495.945.516.904,27	86,45
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.815.701.601.356,00	1.621.644.102.733,51	89,31
5.1.2	Belanja Pegawai	980.302.186.924,00	847.647.345.478,35	86,47

KODE	URAIAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%
5.1.3	Belanja Hibah	198.902.508.300,00	192.302.292.300,00	96,68
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	14.960.050.000,00	14.197.450.000,00	94,90
5.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504,00	2.004.732.906,71	86,43
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	511.910.093.420,00	507.497.188.380,00	99,14
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	107.307.198.208,00	57.995.093.668,45	54,05
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.071.393.220.034,94	874.301.414.170,76	81,60
5.2.1	Belanja Pegawai	29.489.953.239,79	23.001.098.149,00	78,00
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	625.894.146.725,02	494.849.121.398,32	79,06
5.2.3	Belanja Modal	416.009.120.070,13	356.451.194.623,44	85,68

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)
- b. Transfer dari Dana Cadangan
- c. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah
- d. Penerimaan dana dari transfer deposito

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali

pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

- a. Transfer ke Dana Cadangan
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah yang disajikan merupakan informasi mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Sumenep sebagaimana tertuang pada Tabel berikut:

TABEL 1.12
Tabel Realisasi Pembiayaan

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Pembiayaan	617.045.656.562,34	667.374.231.933,34	108,2
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	717.045.656.562,34	742.374.231.933,34	103,5
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	667.167.452.762,34	667.167.452.762,34	100
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	49.878.203.800,00	50.000.000.000	100,2
6.1.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	206.779.171,00	-
6.1.4	Penerimaan Dana dari Transfer Deposito	0	25.000.000.000,00	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00	75
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000,00	0,00	0
6.2.2	Penyertaan Modal (Invesatasi) Pemerintah Daerah	75.000.000.000,00	75.000.000.000,00	100

1.3.8. Realisasi Belanja masing-masing SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi)nya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan.

Sebagai dasar pertanggungjawaban atas kewenangan yang mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan, SKPD diminta untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai wujud pertanggungjawaban kepala SKPD

selaku Pengguna Anggaran setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.13
Tabel Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2020	REALISASI	%
1	1	1	DINAS PENDIDIKAN	658.190.448.486,80	532.713.517.416,00	80,94
1	2	1	DINAS KESEHATAN	328.648.227.841,00	261.254.488.739,69	79,49
1	2	2	RSUD. H.MOH ANWAR	134.607.134.870,00	108.983.860.510,00	80,96
1	3	1	DINAS PU BINA MARGA	148.839.801.430,80	141.490.418.168,80	95,06
1	3	2	DINAS PU SUMBER DAYA AIR	47.895.240.900,82	45.069.868.468,70	94,10
1	3	3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	80.975.883.275,82	71.220.927.532,27	87,95
1	5	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	12.991.017.078,00	12.162.456.021,00	93,62
1	5	2	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.317.404.014,00	4.190.770.016,00	78,81
1	6	1	DINAS SOSIAL	8.530.182.577,00	7.794.125.055,00	91,37
2	1	1	DINAS TENAGA KERJA	6.867.073.194,00	6.028.690.251,00	87,79
2	2	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	16.421.258.338,00	12.033.885.540,60	73,28
2	3	1	KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	13.394.888.335,00	10.086.475.042,00	75,30
2	5	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	19.426.273.393,00	14.729.275.505,00	75,82
2	6	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.625.711.211,00	12.737.388.582,00	87,09
2	7	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	17.201.109.341,23	14.853.569.638,00	86,35
2	9	1	DINAS PERHUBUNGAN	110.009.391.375,00	89.800.869.525,00	81,63
2	10	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	14.442.113.745,00	12.924.987.403,00	89,50
2	11	1	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	20.108.766.622,00	17.490.154.922,00	86,98
2	12	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.185.329.479,50	4.725.391.999,00	91,13
2	13	1	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	16.562.600.929,00	13.560.021.883,00	81,87
2	17	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.261.654.537,00	4.356.987.129,00	82,81
3	1	1	DINAS PERIKANAN	14.209.800.300,00	13.315.942.623,00	93,71
3	3	1	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	32.119.229.219,00	24.726.809.161,00	76,98

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2020	REALISASI	%
3	6	1	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25.095.074.160,00	23.404.456.951,00	93,26
4	1	3	SEKRETARIAT DAERAH	49.320.311.225,00	44.166.323.497,00	89,55
4	1	4	SEKRETARIAT DPRD	71.258.768.972,00	64.637.690.572,00	90,71
4	1	5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6.457.363.012,00	5.471.795.681,00	84,74
4	1	6	KECAMATAN KOTA SUMENEP	10.644.476.869,00	9.947.238.337,20	93,45
4	1	7	KECAMATAN KALIANGET	2.809.389.876,00	2.629.318.114,00	93,59
4	1	8	KECAMATAN TALANGO	2.401.850.833,00	2.077.092.115,00	86,48
4	1	9	KECAMATAN MANDING	2.892.247.754,00	2.722.479.914,00	94,13
4	1	10	KECAMATAN BLUTO	2.910.082.603,00	2.716.210.184,00	93,34
4	1	11	KECAMATAN SARONGGI	2.745.833.913,00	2.514.555.801,00	91,58
4	1	12	KECAMATAN LENTENG	2.679.019.756,00	2.190.447.526,00	81,76
4	1	13	KECAMATAN GILIGENTENG	2.262.580.037,00	2.048.568.351,00	90,54
4	1	14	KECAMATAN GULUK_GULUK	2.129.782.873,00	1.952.005.160,00	91,65
4	1	15	KECAMATAN GANDING	2.534.925.185,00	2.402.867.949,00	94,79
4	1	16	KECAMATAN PRAGAAN	2.628.537.694,00	2.528.132.498,00	96,18
4	1	17	KECAMATAN RUBARU	2.596.566.166,00	2.403.784.270,00	92,58
4	1	18	KECAMATAN AMBUNTEN	2.700.264.503,00	2.446.074.809,00	90,59
4	1	19	KECAMATAN PASONGSONGAN	2.343.763.866,00	2.023.602.358,00	86,34
4	1	20	KECAMATAN DASUK	2.625.193.051,00	2.146.615.697,00	81,77
4	1	21	KECAMATAN BATANG_BATANG	3.018.309.397,00	2.754.724.742,00	91,27
4	1	22	KECAMATAN BATUPUTIH	2.500.969.606,00	2.243.972.874,00	89,72
4	1	23	KECAMATAN GAPURA	2.721.863.323,00	2.469.545.772,00	90,73
4	1	24	KECAMATAN DUNGKEK	2.302.935.749,00	2.155.688.116,00	93,61
4	1	25	KECAMATAN GAYAM	2.706.529.330,00	2.527.856.108,00	93,40
4	1	26	KECAMATAN NONGGUNONG	2.431.103.501,00	2.242.602.899,00	92,25
4	1	27	KECAMATAN RAAS	2.031.870.499,00	1.812.718.187,00	89,21
4	1	28	KECAMATAN MASALEMBU	1.913.136.413,00	1.594.545.068,00	83,35
4	1	29	KECAMATAN ARJASA	3.067.143.842,00	2.647.950.452,00	86,33
4	1	30	KECAMATAN SAPEKEN	2.477.972.023,00	2.130.542.727,00	85,98
4	1	31	KECAMATAN BATUAN	2.527.429.046,00	2.381.556.815,00	94,23
4	1	32	KECAMATAN KANGAYAN	2.422.810.028,00	2.181.745.178,00	90,05
4	2	1	INSPEKTORAT	12.321.591.076,00	10.673.527.285,00	86,62
4	3	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	11.602.218.220,00	10.489.132.930,00	90,41
4	4	1	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN ASET DAERAH	881.853.129.370,00	817.451.181.855,71	92,70

KODE REKENING			PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN 2020	REALISASI	%
4	5	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	20.329.237.127,00	13.508.084.980,00	66,45
TOTAL BELANJA DAERAH				2.887.094.821.391	2.495.945.516.904,27	86,45

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SUMENEP

Bedasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkait dengan perubahan APBD, Pasal 161 Ayat (2) menyatakan bahwa: “Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. keadaan darurat; dan/atau 5. keadaan luar biasa.

Penyesuaian atau perubahan anggaran merupakan salah satu langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi perkembangan situasi tersebut, terlebih lagi menghadapi Pandemi Covid-19 yang melanda Republik Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

2.1. Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah, 2) Dana Perimbangan, dan 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan

memiliki kepastian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan pendapatan daerah tahun 2020 diperhitungkan berdasarkan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan dana transfer yang diterima oleh Kabupaten Sumenep pada tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.1
Perubahan Penjabaran Pendapatan Daerah Tahun 2020

KODE	U R A I A N	ANGGARAN 2020 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2020 Rp.	SELISIH Rp.
4	PENDAPATAN DAERAH	2.407.651.810.511,00	2.270.049.164.828,63	(137.602.645.682)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	266.795.031.578,00	240.647.035.200,63	(26.147.996.377)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	33.080.760.350	28.136.500.000	(4.944.260.350)
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	19.040.089.824	18.454.432.704	(585.657.120)
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	15.994.475.000	15.822.662.838,22	(171.812.162)
4.1.4	Lain lain Pendapaan Asli Daerah Yang Sah	198.679.706.404	178.233.439.658,41	(20.446.266.746)
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.633.007.332.000,00	1.492.972.084.702,00	(140.035.247.298)
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	97.268.427.000	104.284.725.885,00	7.016.298.885
4.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.213.090.268.000	1.106.373.716.000,00	(106.716.552.000)
4.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	322.648.637.000	282.313.642.817,00	(40.334.994.183)
4.3	LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	507.849.446.933,00	536.430.044.926,00	28.580.597.993,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	53.978.000.000	67.778.000.000,00	13.800.000.000
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	88.416.256.933	76.457.014.326,00	(11.959.242.607)
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	365.455.190.000	367.104.745.000,00	1.649.555.000
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	25.090.285.600,00	25.090.285.600

Secara umum target pendapatan daerah pada tahun 2020 dalam APBD perubahan mengalami penurunan sebesar Rp 137.602.645.682,-. Penyesuaian dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten

Sumenep terhadap Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Target Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp 26.147.996.377,-, Penyesuaian tersebut didasarkan adanya estimasi penurunan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah akibat adanya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta kebijakan Pemerintah kabupaten Sumenep dalam memerikan insentif Pajak Daerah sebagaimana amanat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020.

Untuk Dana Perimbangan, hanya komponen Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang mengalami peningkatan target sebesar Rp 7.016.298.885,-. Sedangkan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami penyesuaian target masing – masing sebesar Rp 106.716.552.000,- dan Rp 40.334.994.183,-. Penyesuaian tersebut dikarenakan adanya pengurangan dana transfer ke daerah sebagai kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya percepatan pemulihan kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi covid – 19.

Sedangkan untuk Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami peningkatan target sebesar Rp 28.580.597.993,-. Peningkatan ini disebabkan Karena adanya penambahan pada komponen pendapatan hibah sebesar Rp 13.800.000.000,-, kemudian Dana Penyesuaian Otonomi Khusus juga mengalami peningkatan dikarenakan ada tambahan Dana Insentif Daerah sebesar Rp 1.649.555.000,-. Komponen bantuan keuangan dari provinsi juga mengalami peningkatan sebesar Rp 25.090.285.600,-. Terdapat penyesuaian komponen dana bagi hasil pajak/bukan pajak dari provinsi sebesar Rp 11.959.242.607,- yang merupakan amanah Peraturan Gubernur terkait pengurangan dana bagi hasil provinsi ke daerah

2.2. Perubahan Penjabaran Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yaitu : 1) Urusan wajib pelayanan dasar, 2) Urusan wajib bukan pelayanan dasar, 3) Urusan pilihan dan 4) Urusan Penunjang Pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah yang disusun oleh pemerintah daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan provinsi maupun nasional Tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih focus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam penyusunan APBD tahun 2020 Pemerintah Daerah juga menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Karena program dan kegiatan merupakan sumber informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Perubahan Belanja daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 akibat terjadi : 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4. keadaan darurat; dan/atau 5. keadaan luar biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel : 2.2
Perubahan Penjabaran Belanja Daerah Tahun 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2020 Rp.	SELISIH Rp.
5	BELANJA DAERAH	2.722.741.839.383,00	2.887.094.821.390,94	164.352.982.007,94
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.714.368.439.357,00	1.815.701.601.356,00	101.333.161.999,00
5.1.2	Belanja Pegawai	1.032.889.277.025	980.302.186.924,00	(52.587.090.101)
5.1.3	Belanja Hibah	153.385.485.200	198.902.508.300,00	45.517.023.100
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	14.077.400.000	14.960.050.000,00	882.650.000
5.1.5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	2.319.564.504	2.319.564.504,00	-
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	506.696.712.628	511.910.093.420,00	5.213.380.792
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000	107.307.198.208,00	102.307.198.208
5.2	BELANJA LANGSUNG	1.008.373.400.026,00	1.071.393.220.034,94	63.019.820.008,94
5.2.1	Belanja Pegawai	33.436.791.300,00	29.489.953.239,79	(3.946.838.060)
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	600.163.417.996,00	625.894.146.725,02	25.730.728.729
5.2.3	Belanja Modal	374.773.190.730,00	416.009.120.070,13	41.235.929.340

Sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Keuangan RI Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Corona Viruz Desease 2019 (Covid 19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020 yang mengamanatkan adanya Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% serta Rasionalisasi Belanja Modal sekurang-kurangnya sebesar 50%, serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional yang mengamanatkan adanya penurunan alokasi Dana Transfer ke Daerah, Kabupaten Sumenep telah melakukan refocusing/penyesuaian terhadap belanja baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus. Hal tersebut

dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan dampak pandemi covid-19.

Terhadap hasil refocusing, telah dilakukan realokasi belanja dengan memfokuskan pada kegiatan yang dapat memberikan dampak terhadap pemulihan kesehatan dan perekonomian masyarakat selama masa pandemic covid-19. Bentuk kegiatan berupa optimalisasi pelayanan di bidang Kesehatan, penyediaan peralatan dan obat-obatan, bantuan hibah/bansos, pembangunan bidang infrastruktur melalui program padat karya, operasi pasar serta kegiatan lainnya.

Secara umum Belanja Daerah Kabupaten Sumenep mengalami peningkatan sebesar Rp. 164.352.982.007,94, yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 101.333.161.999,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 63.019.820.008,94.

1. Belanja Tidak Langsung pada perubahan APBD tahun 2020 mengalami penambahan sebesar Rp. 101.333.161.999, yang terdiri dari :
 - Belanja Pegawai yang mengalami rasionalisasi sebesar Rp. 52.587.090.101,-.
 - belanja Hibah mengalami penambahan sebesar Rp. 45.517.023.100.
 - belanja bantuan Sosial mengalami penambahan sebesar Rp. 882.650.00.-,
 - belanja bantuan Keuangan kepada desa juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.213.380.792,-
 - serta Belanja Tidak terduga yang mengalami peningkatan paling besar yaitu Rp 102.307.198.208,- yang merupakan hasil realokasi belanja daerah serta tambahan Dana Insentif Daerah yang diperuntukkan untuk mendukung penanganan dampak pandemic covid-19.
2. Pada sisi belanja langsung terdapat penambahan sebesar Rp. 63.019.820.008,94, yang terdiri dari :
 - penyesuaian belanja pegawai dalam rangka refocusing anggaran akibat pandemic covid-19 sebesar Rp. 3.946.838.060,-
 - belanja barang dan jasa serta belanja modal mengalami peningkatan masing - masing sebesar Rp 25.730.728.729,- dan Rp 41.235.929.340,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang berasal dari dana khusus seperti Silpa BOS, BLUD, Bantuan Keuangan Provinsi, BPJK/JKN, serta kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemulihan dampak pandemic covid-19 yang diarahkan pada penanganan Kesehatan, penanganan dampak ekonomi serta penyediaan Jaring Pengaman Sosial.

2.3. Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Perubahan penjabaran pembiayaan daerah Kabupaten Sumenep tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : 2.3
Perubahan Penjabaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2020 Rp.	ANGGARAN PERUBAHAN 2020 Rp.	SELISIH Rp.
6	Pembiayaan	315.090.028.872,00	617.045.656.562,34	301.955.627.690,34
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	340.090.028.872,00	717.045.656.562,34	376.955.627.690,34
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	290.211.825.072	667.167.452.762,34	376.955.627.690
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	49.878.203.800	49.878.203.800,00	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	25.000.000.000,00	100.000.000.000,00	75.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal (Invesatasi) Pemerintah Daerah	25.000.000.000,00	75.000.000.000,00	50.000.000.000

Secara umum Pembiayaan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 301.955.627.690,34. Pada sisi penerimaan pembiayaan, Silpa daerah tahun sebelumnya berkontribusi paling besar yaitu sebesar Rp. 376.955.627.690,-. yang terbagi atas Silpa kegiatan tahun 2019, DBHCHT, Pajak Rokok, Dana Desa, BLUD, BOS, BK Provinsi, serta BPJS/JKN.

Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan terjadi peningkatan pada rekening penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000.000,- yang merupakan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sumenep Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Sedangkan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 25.000.000.000,- diperuntukkan bagi dana cadangan Pilkada.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah sehingga daerah dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah pembangunan di daerah sesuai dengan potensi, kondisi dan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan otonomi daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, harus berorientasi pada pemberdayaan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat dalam hal pembiayaan pembangunan, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sehingga perlu meningkatkan penerimaan keuangan daerah. Ketergantungan tersebut tercermin dari besarnya rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) terhadap total pendapatan daerah. Sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya melaksanakan APBD dengan optimal dan efisien guna menangani prioritas-prioritas pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep.

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Susunan atau tahapan perencanaan pembangunan dimulai dari strategi atau kebijakan yang diterjemahkan menjadi berbagai program, dan dilaksanakan dalam berbagai kegiatan. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan kebijakan, program dan kegiatan dibutuhkan variable sebagai indicator dalam mengukur keberhasilan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan tersebut, sehingga capaian dari masing-masing

tahapan dapat dilakukan evaluasi untuk mengetahui capaian target kinerja yang ditetapkan oleh SKPD.

Kinerja dapat diartikan sebagai keluaran/ hasil dari program/ kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Capaian kinerja program dan kegiatan tersebut diatas dibagi dalam : 1) Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 2) Pelaksanaan Urususan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 3) Pelaksanaan Urusan Pilihan dan 4) Pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan.

Capaian dari target program/kegiatan berdasarkan urusan kewenangan daerah dan evaluasi hasil pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3. 1
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan		Program Peningkatan Akses PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	Presentase	69,23%	69,72			
				Pembangunan Gedung/sarana PAUD	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	lembaga	2	2			
				Program Peningkatan Akses SD	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/PAKET A	Presentase	129,53%	128,15%	Tidak tercapainya APK lebih disebabkan kurang tercapainya peserta didik dari program Paket A.	Menggenarkan promosi Program Paket A sebagai upaya untuk tambahan ilmu bagi anak yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan di program formal.	
					APM SD/MI/Paket A	Presentase	99,79%	99,80%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	Lembaga	74	74			
				Program Peningkatan Akses SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/PAKET B	Persentase	122,96%	122,99%			
					APM SMP/MTS/PAKET B	Persentase	96,26%	99,54%			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	Lembaga	31	31			
				Program Peningkatan Akses PNF	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Presentase	80,78%	82,65%			
				Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C	Jumlah peserta kesetaraan kejar PAKET	orang	6905	6905			
				Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar	Jumlah lembaga yang terakomodir	lembaga	2	2			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	Jumlah gedung/sarana yang dibangun	lembaga	2	2			
				Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	Presentase	85,00%	76,81	Banyak Kegiatan Pelatihan dan Diklat yang tidak dilaksanakan di karenakan pengumpulan massa tidak di perbolehkan di masa Pandemi Covid 19	Untuk Tahun Berikutnya di harapkan Diklat akan Diadakan dan di laksanakan melalui aplikasi Daring	
				Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF	Jumlah Diklat PTK PAUD&PNF	orang	100	0	tidak dilaksanakan Karena Refocusing Covid 19	tindak lanjut di tahun berikutnya	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD	Jumlah Diklat PTK SD	orang	150	100	Pengurangan jumlah peserta diklat karena ada keterbatasan selama masa pandemi covid 19	semakin kecilnya penyebaran virus covid 19 dengan berjalannya waktu kegiatan akan dapat dilakukan secara full dan maksimal di tahun berikutnya	
				Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SMP	Jumlah Diklat PTK SMP	orang	150	150			
				Fasilitasi Kategori II	Jumlah K2 yang terfasilitasi	orang	1321	1321			
				Program Peningkatan Kualitas PAUD	Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi	Presentase	45,00%	44,24%	Capaian kinerja sama dengan tahun lalu yakni 44,24% karena selama Masa Pandemi Covid 19 Tidak ada Penilaian Akreditasi Di Jenjang PAUD	Diharapkan Tahun Berikutnya Ada Penilaian dan Pemantapan Akreditasi Di Jenjang PAUD Terutama Bagi Lembaga yang belum melaksanakan Proses Penilaian Akreditasi Bagi Lembaga PAUD	
				Pengembangan Kurikulum	Jumlah lembaga PAUD	kec	27	27			
				BOP Penyelenggaran PAUD	Jumlah sekolah penerima BOP	lembaga	760	0	Anggaran Daerah dana APBD Di refocusing di Karenakan penyebaran virus covid 19, namun Kegiatan tersebut di tunjang oleh anggaran Dana Provinsi Berupa Bantuan Operasional PAUD (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 16.005.600.000 dan terealisasi Sebesar Rp. 12.747.600.000 (Masing masing siswa sebesar Rp. 600.000 per tahun)	semakin kecilnya penyebaran virus covid 19 dengan berjalannya waktu kegiatan akan dapat dilakukan secara maksimal di tahun berikutnya	
				Pembangunan Karakter peserta didik PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	orang	125	125			
				Fasilitasi Akreditasi PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi	kec	27	27			
				Program Peningkatan Kualitas SD	Prosentase SD yang berakreditasi A	Presentase	97,20%	97,29%			
					Angka Putus Sekolah SD	Presentase	0,45%	0,13%	Angka putus sekolah makin menurun karena dilakukan program literasi .		
				Bimbingan teknis Kurikulum SD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	kec	27	27			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Akreditasi SD	Jumlah SD yang difasilitasi	lembaga	140	140			
				Olimpiade dan Festival SD	Jumlah peserta yang mengikuti olimpiade dan Festival	kec	27	27			
				Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PPDB	lembaga	628	628			
				Fasilitasi Ujian SD	Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian	lembaga	628	628			
				Wajib diniyah SD	Jumlah lembaga yang melaksanakan	lembaga	31	31			
				Fasilitasi SD Rujukan Mutu	Jumlah SD Rujukan	lembaga	10	10			
				Monev sarana dan prasarana SD	Jumlah lembaga yang dimonev	kegiatan	657	657			
				Bantuan Operasional Sekolah Dasar	Jumlah lembaga yang mendapatkan	Lembaga	59	59			
				Program Peningkatan Kualitas SMP	Prosentase SMP yang berakreditasi A	Presentase	93,40%	93,48			
					Angka Putus Sekolah SMP	Presentase	0,44	0,21			
				Bimbingan teknis Kurikulum SMP	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	lembaga	115	115			
				Fasilitasi Akreditasi SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi	lembaga	25	25			
				Olimpiade dan Festival SMP	Jumlah peserta yang mengikuti olimpiade dan Festival SMP	orang	85	85			
				Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP	Jumlah peserta yang mengikuti apresiasi seni dan pameran	orang	200	200			
				Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PPDB	orang	218	218			
				Fasilitasi Ujian SMP	Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian	lembaga	218	218			
				Lomba Penguatan Pendidikan Karakter	Jumlah peserta yang mengikuti lomba	orang	125	125			
				Wajib diniyah SMP	Jumlah lembaga yang melaksanakan	lembaga	43	43			
				Fasilitasi SMP Rujukan Mutu	Jumlah SMP Rujukan	lembaga	8	8			
				Bantuan Operasional SMP	Jumlah lembaga yang mendapatkan	lembaga	43	43			
				Program Peningkatan Kualitas PNF	Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi	Presentase	65,00%	62,46	Capain kinerja 62,46 merupakan kinerja tahun 2019 krena selama Masa Pandemi Covid 19 Tidak ada Penilaian Akreditasi Di Jenjang PNF	Diharapkan Tahun Berikutnya Ada Penilaian dan Pemantapan Akreditasi Di Jenjang PNF Terutama Bagi Lembaga yang belum melaksanakan Proses Penilaian Akreditasi Bagi Lembaga PNF	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Apresiasi Seni dan Pameran PNF	Jumlah peserta yang mengikuti apresiasi seni dan pameran	orang	150	80	Kuota peserta dibatasi karena masa pandemi covid 19	semakin kecilnya penyebaran virus covid 19 dengan berjalannya waktu kegiatan akan dapat dilakukan secara full dan maksimal di tahun berikutnya	
				Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah peserta yang mengikuti apresiasi seni dan pameran	jumlah peserta	34	0	kegiatan di tiadakan karena reconfusing covid 19	evaluasi terhadap tahun mendatang dengan mempertimbangkan ringannya peryebaran covid 19	
				BOP Bosda Madin	Jumlah penerimaan bantuan	Jumlah peserta	1700	1700			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persentase	100%	89,46			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1300	1320			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Bahan	30	30			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 Tahun Anggaran	Bahan	70	70			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Komponen	25	25			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan	50	50			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Mamin	2900	1650	tidak semua kegiatan dilakukan karena adanya pandemi covid 19 sehingga tidak dapat melakukan pengumpulan massa	Rapat online dengan zoom meeting	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	kegiatan	1300	1300			
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	kegiatan	10	10			
				Operasional UPTD	Jumlah layanan UPTD yang disediakan	Layanan	643	640			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Layanan	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Gedung	9	0	Tidak Dilaksanakan Karena Tidak sesuai dengan RAB dab KAK Kontrak Kegiatan	evaluasi terhadap kegiatan untuk tahun selanjutnya	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Peralatan	60	60			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	84	84			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	12	7	Jarangnya ada perjalanan keluar dalam daerah di karenakan wabah covid 19	Banyak di laksanakan secara online dengan media zoom meeting dan lain sebagainya	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Peralatan	230	230			
				Operasional Tugas Pembantuan	Jumlah Lembaga Penerima BOS	Lembaga	816	816			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Presentase	75%	75%			
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Pegawai	10	0	kegiatan tidak dilaksanakan Karena Refocusing Covid 19	tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian tepat waktu	Jenis	2	0	kegiatan tidak dilaksanakan Karena Refocusing Covid 19	tindak lanjut di tahun berikutnya	
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Presentase	100,00%	98,51			
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	1	1			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Laporan	1	1			
				Pengembangan Sistem Informasi manajemen	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	media	2	2			
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan		Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Persentase pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, Bayi Baru Lahir	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak							
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Puskesmas yang melakukan management pencatatan dan pelaporan KIA melalui penyediaan fasilitas	%	100%	100%			
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (1)							
				Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak	%	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penguatan Forum Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (Penakib)	Persentase Terbentuknya Penguatan Forum Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dapat terealisasi	%	100%	100%			
				Peningkatan dan Perbaikan Gizi	Persentase Balita Gizi Buruk	%	15%	15%			
				Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Persentase Balita Gizi Buruk yang ditangani	%	100%	100%			
				Akselerasi Penurunan stunting (1)							
				Peningkatan dan Perbaikan Gizi	Presentase cakupan stunting	%	25%	25%			
				Kegiatan Penurunan Stunting	Jumlah Kegiatan yang dilakukan untuk upaya penurunan Stunting	keg	1 keg	1 keg			
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa / Kelurahan Siaga Aktif	%	100%	100%			
				Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
				Promosi Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan	Jumlah Promosi Program yang dilakukan	%	80%	80%			
				Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Posyandu Aktif	%	100%	100%			
				Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (1)		0	0%	0%			
				Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Persentase Kader Aktif	%	100%	100%			
				Pendampingan Pencegahan Stunting Bagi Ibu Hamil	Persentase terlaksananya pendampingan pencegahan stunting bagi ibu hamil	%	100%	100%			
				Pendampingan Poskestren	Persentase terlaksananya pendampingan ponkestren	%	100%	100%			
				Pelayanan Kesehatan Anak, Remaja dan Usila							
				Peningkatan Kesehatan Anak Remaja dan Usia Lanjut	Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	%	70%	17%	Di masa pandemi posyandu di laksanakan menurut zona wilayah bagi yg zona merah tdk boleh adakan posyandu	layanan posyandu dgn ptgs ke rumah sasaran	
				Pengembangan Taman Posyandu	Persentase Taman Posyandu	%	80%	80%			
				Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa STBM (Sanitasi Tota Berbasis Masyarakat)	%	70%	70%			
				Peningkatan Kesehatan Lingkungan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengawasan Kualitas Air Bersih, Air Limbah dan Pembinaan POKMAIR	Persentase Desa ODF (Stop BAB Sembarangan)	%	50%	60%			
				Penyehatan TTU , TPM , Pemukiman dan Pengawasan Pestisida	Persentase Tempat - Tempat Umum (TTU) yang memenuhi syarat kesehatan	%	61%	68%			
				Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Persentase Puskesmas yang melakukan pendataan sanitasi	%	100%	100%			
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK) yang dibentuk	%	60	66			
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase desa/kelurahan Universal Child Immunization	%	90%	98,50%			
				Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular							
				Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Prevalensi HIV AIDS	%	< 0,5%	< 0,5%			
				Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	Penemuan dan penanganan Kusta	%	Prev Kusta : RFT 90 %	Prev Kusta : RFT 90 %			
				Pencegahan Penularan Penyakit Menular filariasis	Jumlah Penemuan dan penanganan penderita Filariasis yang mendapat penanganan	%	100%	100%			
				Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit	Persentase Penemuan dan penanganan penyakit menular	%	100%	100%			
				Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik (1)		0	0	0			
				Peningkatan Imunisasi							
				Peningkatan Imunisasi bagi bayi (Imunisasi Dasar)	Persentase Bayi Imunisasi Dasar Lengkap	%	93%	91,46%	Karena masa pandemi posyandu di laksanakan menurut zona wilayah bagi yg zona merah tdk boleh mengadakan posyandu		
				Peningkatan Imunisasi bagi bayi (Imunisasi Dasar) (1)		0	%	0%			
				Pelayanan Imunisasi bagi Balita dan Anak Sekolah (Bulan Imunisasi Anak Sekolah / BIAS)	Persentase Jumlah Siswa SD yang diimunisasi	%	95%	85%	Karena diberlakukannya PJJ pada sekolah, sehingga proses pelaksanaan BIAS tidak maksimal		
				Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Wabah	Persentase CJH yang dilakukan pemeriksaan, Pemantauan, Pemeliharaan dan Pembinaan status kesehatan	%	100%	100%			
				Peningkatan Pelayanan, Penanggulangan Wabah dan bencana	Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100%	100%	100%			
				Peningkatan Pelayanan, Penanggulangan Wabah dan bencana		0 %	0%	0%			
				Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular		%	40%	40%			
				Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular	Deteksi Dini dan Rujukan Kasus PTM	%	40%	40%			
				Peningkatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (1)		0 %	0%	0%			
				Peningkatan Pencegahan dan Pelayanan Kesehatan Jiwa	Deteksi Dini dan Peangulangan Kasus Pasung	%	30%	30%			
				Peningkatan Pelayanan gangguan indera dan fungsional, penyakit gigi dan mulut dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan screening indera	Puskesmas	30	30			
				Pengendalian Penyakit (Penugasan)	Jumlah Kegiatan yang dilakukan untuk upaya Pengendalian Penyakit	keg	3 keg	3 keg			
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas Rawat Inap yang melakukan pelayanan sesuai standar						
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer		Puskesmas	30	30			
				Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan PPPK dan POSKO Lebaran	%	100%	100%			
				Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan (1)							
				Evaluasi Kinerja Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan evaluasi kinerja puskesmas	Puskesmas	30	30			
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase Pelayanan Kesehatan di Pusk., Poliklinik Swasta dan RS Swasta sesuai dengan SOP	%	100%	100%			
				Pembentukan Puskesmas BLUD	Jumlah Puskesmas menuju BLUD	Puskesmas	30	30			
				Akreditasi Puskesmas							
				Pendampingan dan Survei Akreditasi	Persentase Puskesmas yang siap dilakukan survey	%	25%	25%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Manajemen Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen puskesmas	30 Puskesmas	30	30			
				Peningkatan Pelayanan Pada Sarana Kesehatan Dasar	Jumlah Nakes kontrak di Puskesmas	pkm	30	30			
				Peningkatan Pelayanan Pada Sarana Kesehatan Dasar dengan Dana BK	Jumlah Nakes kontrak di Puskesmas dengan dana BK	pkm	30	30			
				Kunjungan Konseling Kesehatan	Persentase terlaksananya Kegiatan kunjunganKonseling Kesehatan	%	100%	100%			
				Kunjungan Konseling Kesehatan (1)		0 %	0%	0%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sarana/Prasarana Kesehatan	Jumlah penduduk miskin yang diintegrasikan JKN	orang	88000	88000			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Sarana/Prasarana Kesehatan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang layak						
				Pembinaan dan Pengawasan Program Jaminan Kesehatan Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai standar'	pkm	30	30			
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pondok Pesantren	Jumlah pondok pesantren yang melakukan pelayanan kesehatan	ponkesdes	70	70			
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Jumlah RS yang mendapatkan pembinaan perijinan RS	RS	4	4			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK	Jumlah puskesmas yang memanfaatkan dana BOK	pkm	30	30			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK (1)							
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Persalinan	Jumlah Puskesmas yang meningkatkan pelayanan untuk ibu dan anak melalui Rumah Tunggu Kelahiran	pkm	30	30			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Persalinan							
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK UKM Essensial	Persentase cakupan standar Pelayanan Minimal di puskesmas	pkm	30	30			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK UKM Essensial							
				Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakat	Persentase Penduduk maskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan	%	90%	90%			
				Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional	Persentase sarana obat tradisional yang di bina untuk memenuhi standar	%	100%	100%			
				Peningkatan Pelayanan kesehatan tradisional							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK UKM Essensial (STBM)	Persentase cakupan standar Pelayanan Minimal di puskesmas	pkm	30	30			
				Kegiatan Akreditasi Puskesmas melalui DAK Non Fisik	Jumlah Puskesmas yang melakukan re akreditasi	Puskesmas	17	0	Terdapat 3 tahapan akreditasi .yaitu workshop ,pendampingan serta survey. Untuk workshop dan pendampingan telah dilaksanakan, namun Survei Reakreditasi Puskesmas tidak dilakukan karena terbit surat dari Kementerian Kesehatan terkait pelarangan pelaksanaan survey karena masa pandemi COVID-19	Survey reaktreditasi puskesmas akan dilakukan di tahun 2021	
				Kegiatan Akreditasi Puskesmas melalui DAK Non Fisik							
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK Dukungan Manajemen	Persentase terlaksananya kegiatan dukungan manajemen BOK	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui BOK Dukungan Manajemen							
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Penurunan Stunting	Persentase cakupan penurunan stunting	%	100%	100%			
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Ratio jumlah puskesmas		0,1	0,1			
				Peningkatan Puskesmas Pembantu Menjadi Puskesmas	Persentase Puskesmas	Puskesmas	31	31			
				Jasa Medik Puskesmas	Jumlah Puskesmas/ Pustu dan jaringannya serta UPT yang pelayanannya kesehatan sesuai standar	Puskesmas	30	30			
				Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas dan Jaringannya	Persentase Tersedianya prasarana puskesmas yang layak	%	80%	80%			
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/umah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk		0,002	0,002			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan Rumah Sakit	Persentase Pembangunan rumah sakit		100%	100%			
				Pengurusan dokumen ijin rumah sakit arjasa	Ijin mendirikan rumah sakit terpenuhi	%	100%	100%			
				Program Upaya Kesehatan Puskesmas	Cakupan Pelayanan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pandian	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pamolokan	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batuan	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Lenteng	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Moncek	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Ganding	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Guluk-guluk	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Saronggi	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Bluto	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pragaan	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Manding	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batu Putih	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Rubaru	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Dasuk	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Ambunten	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Pasongsongan	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gapura	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Batang-Batang	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Legung	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Dungkek	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kalianget	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Talango	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Giligenting	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Gayam	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Nonggunong	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Raas	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Arjasa	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Kangayan	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Sapeken	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Masalembu	Jumlah Dukungan Dana JKN untuk Operasional Puskesmas	%	100%	100%			
				Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan bebekalan kesehatan						
				Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat, reagen laborat dan vaksin dengan dana APBD	%	80,00%	80,00%			
				Peningkatan, Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Seluruh Puskesmas	%	100%	100%			
				Pengadaan Alat Kesehatan dan Penunjangnya	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat dengan dana APBD	%	80%	80%			
				Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan Obat, reagen laborat dan vaksin dengan dana DAK	%	80%	80%			
				Penyediaan Perbekalan Kesehatan Melalui DAK	Persentase alat kesehatan yang memenuhi syarat dengan dana DAK	%	80%	80%			
				Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan Melalui DAK Non Fisik	Persentase Terdistribusinya Obat dan Perbekalan Kesehatan di Seluruh Puskesmas	pkm	30	30			
				Peningkatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pelayanan Laboratorium sesuai standar	%	100%	100%			
				Peningkatan dan Pengembangan SDM Kesehatan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penilaian Kompetensi SDM	Dokumen Pemetaan Kompetensi SDM	dokumen	1	1			
				Analisa Kebutuhan SDM	Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM	dokumen	1	1			
				Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan Yang Menangani COVID-19	Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19	keg	2	2			
				Pengawasan Obat dan Makanan	jumlah sarana pelayanan kefarmasian yang dilakukan pengawasan obat dan makanan	Unit	36	36			
				Pembinaan Lingkungan Sosial							
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	Persentase tersedianya sarana dan prasarana puskesmas yang layak	%	80%	80%			
				Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan							
				Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.	Terlaksananya Integrasi Kepersetaan Jamkesda Menjadi JKN-BPJS	orang	42.000	38.701	target 42.000 PBID tercapai 38.701 karena ada peserta yang meninggal atau tambahan yang melahirkan	Sifatnya penyediaan anggaran	
				Pembayaran Tindakan Pelayanan Kesehatan bagi fakir miskin dan/orang tidak mampu	Pelayanan Kesehatan Fakir Miskin/orang tidak mampu	keg	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase Dukungan Dana untuk Operasional Dinas dan UPT	%	100%	100%			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sarana komunikasi dan listrik di Dinas Kesehatan dan seluruh UPT	bulan	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	bulan	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Bahan Perkantoran	Persentase Tersedianya alat tulis kantor untuk administrasi perkantoran	%	100%	100%			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya penerangan bangunan kantor	%	100%	100%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bulan	12 bulan	12 bulan			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk mendukung pelayanan administrasi perkatoran	bulan	12 bulan	12 bulan			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	12 bulan	12 bulan			
				Pembangunan gedung kantor	Persentase terlaksananya pembangunan gedung kantor	%	Puskesmas dan Rumah Sakit	Puskesmas dan Rumah Sakit			
				Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Persentase tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak	%	100%	100%			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Persentase Tersedianya perlengkapan gedung kantor layak pakai	%	100%	100%			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung yang dipelihara	unit	3 unit	3 unit			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase tersedianya kendaraan dinas yang layak	%	100%	100%			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Persentase Tersedianya Perlengkapan Gedung yang layak	&	100%	100%			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya		11 (rasio tenaga medis)	11 (rasio tenaga medis)			
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai melaksanakan diklat peningkatan kapasitas	orang	10 orang	0 orang			
				Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian dinas yang diadakan	paket	1 paket	1 paket			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran	%	95%	79%			
				Penyusunan Laporan Keuangan							
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan	laporan	6 lap	6 lap			
				Bimbingan teknis adminitrasi kantor dan keuangan	Persentase meningkatnya kemampuan Puskesmas dalam pengelolaan barang dan keuangan	%	90%	90%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD							
				Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Dokumen Pelaporan Program	dokumen	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan	dokumen	6	6			
				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Data	Jumlah Puskesmas dengan Pelaporan SPODS Aktif (Sistem Pelaporan Online Dinkes Sumenep) dan Pelaksanaan SIKDA Generik	puskesmas	30	30			
		RSUD dr. H. Moh. Anwar	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD	Prosentase capaian survey kepuasan masyarakat (SKM).	%	87	87			
				Kegiatan Pelayanan kesehatan Rumah Sakit BLUD	Prosentase capaian survey kepuasan masyarakat (SKM).	%	87	87			
				Program Pembinaan Lingkungan sosial (DBHCHT)	Presentase Penyediaan /Peningkatan/Pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	%	100	89.75			
				Kegiatan penyediaan / peningkatan / pemeliharaan sarana prasarana fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan	Presentase Penyediaan /Peningkatan/Pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan	%	100	89.75			
				Program Upaya Kesehatan Perorangan	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana RS	%	100	97.27			
				(Kegiatan pembangunan atau pemeliharaan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana RS	%	100	97.27			
				Program Pengadaan, peningkatan sarana dan Prasaran RS (DAK)	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana RS	%	100	96.68			
				Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana RS	%	100	96.68			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas PU. Bina Marga		Program Pembangunan Jalan							
				Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Daratan:	Panjang Jalan yang ditingkatkan	km	6	5,2	Akibat dampak pandemi covid-19 dilakukan refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga realisasi tidak sesuai target	akan dipenuhi di tahun 2021	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Kepulauan:	Panjang Jalan yang ditingkatkan	km	4	3	Akibat dampak pandemi covid-19 dilakukan refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga realisasi tidak sesuai target	akan dipenuhi di tahun 2021	
				Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	Jumlah dokumen pengawasan teknis rehab jalan	paket	43	43			
				Peningkatan Jalan DAK di Wilayah Daratan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	km	12	8	Akibat dampak pandemi covid-19 dilakukan refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga realisasi tidak sesuai target	akan dipenuhi di tahun 2021	
				Peningkatan Jalan DAK di Wilayah Kepulauan	Panjang Jalan yang ditingkatkan	km	1	1			
				Pembangunan Jalan , Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur Provinsi Jawa Timur	panjang jalan yang terpelihara	km	1	1			
				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan							
				Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Daratan	panjang jalan yang terpelihara	km	6	4,9	Akibat dampak pandemi covid-19 dilakukan refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga realisasi tidak sesuai target	akan dipenuhi di tahun 2021	
				Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Kepulauan	panjang jalan yang terpelihara	km	7	5	Akibat dampak pandemi covid-19 dilakukan refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga realisasi tidak sesuai target	akan dipenuhi di tahun 2021	
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah Daratan	panjang jalan yang terpelihara	km	30	28	Akibat dampak pandemi covid-19 dilakukan refocusing terhadap pagu anggaran, sehingga realisasi tidak sesuai target	akan dipenuhi di tahun 2021	
				Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kepulauan	panjang jalan yang terpelihara	km	2	2			
				Perencanaan Teknis Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah dokumen pengawasan teknis rehab jalan	paket	10	10			
				Pemeliharaan Jalan Di Wilayah Daratan (DBHCHT)	panjang jalan yang terpelihara	paket	1	1			
				Program Inspeksi Kondisi Jalan							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Survey Kelayakan Penanganan Jalan	Pendataan tentang kelayakan teknis usulan pada musrembang	eks	1	1			
				Program Tanggap Darurat Jalan							
				Rehabilitasi Jalan dalam Kondisi Tanggap Darurat	Penanganan jalan yang rusak karena bencana	keg	3	3			
				Program Pembangunan Jembatan							
				Pembangunan Jembatan di Wilayah Daratan	Jumlah jembatan yang dibangun / diperbaiki	bh	2	2			
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan							
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan di Wilayah Daratan	jumlah jembatan yang direhabilitasi	bh	3	3			
				Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan di Wilayah Kepulauan	jumlah jembatan yang direhabilitasi	bh	4	4			
				Program Tanggap Darurat Jembatan							
				Rehabilitasi Jembatan dalam Kondisi Tanggap Darurat	jumlah jembatan rusak karena bencana alam	keg	3	3			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	lbr	1200	870			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	bln	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	jumlah kebutuhan bahan kebersihan kantor	bln	12	12			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	jumlah jenis bahan perkantoran yang disediakan	Jnis	5	4			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	10	7			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jenis	5	3	penyerapan kegiatan tidak maksimal karena koran,iklan dan media tidak banyak karena dampak covid	untuk 2021 pagu disesuaikan dan akan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah kegiatan rapat Koordinasi dan Konsultasi	kali	24	20			
				Peringatan Hari-Hari Besar	terlaksananya peringatan hari - hari besar	keg	4	3			
				Operasional UPTD	jumlah layanan UPTD yang disediakan	lyn	320	238			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah Layanan Perkantoran yang disediakan	lyn	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	jenis	10	10			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	unit	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	unit	34	30			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	jenis	10	10			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Terlaksananya Penyediaan pakaian dinas bagi pegawai	stel	96	92			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Laporan Keuangan							
				Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	kali	1	1			
				Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan Laporan Akhir Tahun	kali	2	2			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Kinerja	kali	1	1			
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Laporan LPPD	kali	1	1			
				Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang					
				Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	85609,13	52996,13	Tidak ada pembukaan lahan baru, dan anggaran yang terbatas dioptimalkan pada pemeliharaan RTH yang sudah ada.	Perlunya pembukaan lahan baru yang diperuntukkan sebagai RTH	
				Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
				Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	1	0,8	Anggaran dipakai pemeliharaan RTH yang sudah ada	Perlunya pembukaan lahan baru yang diperuntukkan sebagai RTH	
				Pengendalian Pemanfaatan Ruang					-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Pertanahan Kabupaten	Jumlah proses pengadaaan tanah	Proses	1	1	-	-	
				Peningkatan Rekomendasi Surat Keterangan Rencana Kabupaten	Jumlah dokumen pengesahan site plan dan SKRK	Dokumen	800	768	-	-	
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kali	50	52	-	-	
				Pelayanan Rekomendasi perijinan perumahan (pengesahan site plan)	Jumlah rekomendasi perijinan perumahan (ijin site plan)	Dokumen	50	52	-	-	
				Pembangunan Infrastruktur Penataan Ruang	Jumlah sarana dan prasarana Penataan Ruang	Unit	1	1	-	-	
				Program Perencanaan Tata Ruang					-	-	
				<i>Perencanaan Tata Ruang</i>							
				Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK	Dokumen	1	1	-	-	
				Penyusunan kebijakan tentang penyusunan tata ruang	Jumlah informasi, data-data dan peta dasar yang akurat	Dokumen	2	0	-	-	
				Kegiatan Survey dan Pemetaan	Jumlah dokumen RTRW dan RDTRK	Dokumen	1	2	-	-	
				<i>Pembinaan Tata Ruang</i>					-	-	
				Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sumenep	Jumlah Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Kali	12	12	-	-	
				Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumenep	Jumlah Sistem Informasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Sumenep	Dokumen	1	1	-	-	
				Program Penataan Bangunan Gedung							
				<i>Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung</i>					-	-	
				Tim Pelaksana Koordinasi Bantuan Tenaga Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah dokumen perencanaan teknis yang diverifikasi	Dokumen	150	131	-	-	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung	Unit	16	16	-	-	
				Tim Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)	Jumlah dokumen rekomendasi yang diterbitkan	Dokumen	500	642	-	-	
				Penyusunan Harga Standart Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	Jumlah dokumen HSBGN yang tersusun	Dokumen	1	1	-	-	
				Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung (Pajak Rokok)	Jumlah pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung	Unit	3	3	-	-	
				<i>Peningkatan dan Pembinaan Jasa Konstruksi</i>					-	-	
				Peningkatan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Penerbitan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Ijin	50	48	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong					-	-	
				Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	m	150	142,25	-	-	
				Pembangunan dan Normalisasi Sistem Saluran Drainase/gorong-gorong (Pajak Rokok)	Panjang Saluran Drainase/Gorong-Gorong	m	50	29,525	-	-	
				Penataan dan Revitalisasi Kawasan Khusus	Jumlah kawasan yang direvitalisasi						
				Pembangunan Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan Kelurahan Bangselok	Jumlah Kawasan yang direvitalisasi	Kawasan	3	0	-	-	
		Dinas PU. Sumber Daya Air	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Infrastruktur Keirigasian							
				Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi air permukaan dan Air Tanah	Jumlah daerah irigasi yang dipelihara	Daerah irigasi	27	27			
				Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi Air Permukaan dan Air Tanah	Jumlah lokasi rehab/pemeliharaan	lokasi	6	6			
				Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi Air Permukaan dan Air Tanah (DAK)	Jumlah lokasi rehab	lokasi	13	13			
				Program Pemeliharaan, Penyediaan Air Baku Dan Pengendalian Daya Rusak Air							
				Penyediaan Air Baku	Jumlah lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan embung	lokasi	1	0	Tidak dapat terealisasi pembebasan lokasi karena peta bidang yang sudah ada tidak diakui oleh BPN sehingga perlu dilakukan pengukuran ulang		
				Pembangunan Pengendalian Perkuatan Akibat Daya Rusak Air	Jumlah lokasi pembangunan pengendali daya rusak air	lokasi	35	35			
				Rehabilitasi, Pemeliharaan, Embung/Waduk, Sungai/Saluran Pembuang Dan Infrastruktur Daya Rusak Air	Jumlah lokasi pemeliharaan sungai / rehab infrastruktur pengendali daya rusak air	lokasi	6	6			
				Penanganan Kerusakan Tidak Terduga Akibat Daya Rusak Air	Jumlah lokasi penanganan tak terduga akibat daya rusak air	Lokasi	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Serta Pemanfaatan Sumber Daya Air							
				Pengembangan, Pengelolaan dan Inventarisasi Data Base Sumber Daya Air	Jumlah data base yang dibuat	Data base	2	2			
				Konservasi Sumber-sumber Air baku	Jumlah lokasi sumber yang dikonservasi	Sumber	5	5			
				Pemeliharaan dan Pemberdayaan Jaringan Irigasi Kecil untuk menunjang Kelembagaan HIPPA dan Pokmas	Jumlah lokasi rehab saluran tersier untuk hippa	Lokasi	20	20			
				Pemanfaatan dan Operasional Infrastruktur Sumber Daya Air	Jumlah patok inventarisasi tanah aset daerah	Patok	100	100			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	surat	400	400			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	bln	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	jumlah kebutuhan bahan kebersihan kantor	bln	12	12			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	jumlah jenis bahan perkantoran yang disediakan	Jnis	5	5			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen listrik yang disediakan	Jenis	10	10			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah media Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	media	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	jumlah orang peserta kegiatan rapat	orang	425	425			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah kegiatan rapat Koordinasi dan Konsultasi	kali	320	238			
				Peringatan Hari-Hari Besar	terlaksananya peringatan hari - hari besar	lyn	4	3			
				Operasional UPTD	jumlah layanan UPTD yang disediakan	lyn	2	2			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah jasa tenaga outsourcing	orang	22	22			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang dibeli	unit	14	14			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang terpelihara	unit	3	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	unit	53	53			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah perlatan yang dipelihara	unit	15	15			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai	keg	1	0	Refocusing anggaran		
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Terlaksananya Penyediaan pakaian dinas bagi pegawai	stel	96	92			
	Perumahan Rakyat dan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan RencanaK erja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Peningkatan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	%	100	83,51	Terbatasnya anggaran yang lebih difokuskan pada anggaran Covid-19, dan dana anggaran yang bersumber dari pusat (DAK) berkurang	Perlunya dukungan anggaran dari APBD yang lebih besar	-
				Pembangunan Sanitasi							
				Pembangunan MCK/MWK	Jumlah Infrastruktur Sanitasi	Unit	51	50	-	-	-
				Pembangunan Sanitasi (DAK)							
				Pembangunan Sanitasi (DAK Penugasan)	Jumlah Persampahan, MCK/MWK dan IPAL (DAK)	Unit	0	0	Refocusing akibat pandemi covid 19	-	-
				Pembangunan Sanitasi (DAK Reguler)	Jumlah Persampahan, MCK/MWK dan IPAL (DAK)	Unit	17	17	-	-	-
				Sistem Penyediaan Air Minum SPAM					-	-	-
				Sistem Penyediaan Air Minum/Bersih SPAM	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	RT	3000	3300	-	-	-
				Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK)							
				Sistem Penyediaan Air Minum SPAM (DAK Penugasan)	Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (DAK)	RT	800	800	-	-	-
				Pembangunan Infrastruktur Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yg tersentuh pembangunan infrastruktur permukiman	Ha	100	204,62	-	-	-
				Bantuan Stimulan Rumah Layak Huni (DAK)	Jumlah Rumah Layak Huni (DAK)	Unit	93	93	-	-	-
				Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Lingkungan	Panjang Jalan Lingkungan	m	500	400	-	-	-
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	%	100	82,73	Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tersedia	Perlunya penambahan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan ahli dibidangnya	
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat yang terkirim	Surat	2000	1957	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
4				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Listrik, Air, Internet	Rekening	36	26	-	-					
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor	Item	15	15	-	-					
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran	Buah	1500	1134	-	-					
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Item	10	10	-	-					
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Item	28	11	-	-					
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Kotak	10.000	9925	-	-					
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	Kali	100	62	-	-					
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah tenaga Administrasi Perkantoran	Orang	17	17	-	-					
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Item	15	15	-	-					
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kali	10	10	-	-					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kali	15	15	-	-					
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Kali	10	10	-	-					
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	100	-	-	
								Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Orang	0	0	-	-	
								Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah pakaian dinas beserat atributnya yang disediakan	Jenis	1	1	-	-	
								Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	-	-	
								Penyusunan Laporan Keuangan							
								Penyusunan laporan barang semesteran	Jumlah laporan barang semesteran	Laporan	2	2	-	-	
				Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan OPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan OPD	Laporan	5	5	-	-					
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	-	-					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Laporan Aktiva Tetap	Jumlah Laporan Aktiva Tetap	Laporan	1	1	-	-	
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	1	1	-	-	
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	2	2	-	-	
				Penyusunan Laporan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	-	-	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan SPM	Jumlah SPM	Dokumen	1	1	-	-	
				Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Laporan	1	1	-	-	
				Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah Rencana Kerja OPD	Laporan	1	1	-	-	
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Laporan	1	1	-	-	
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Dokumen	2	2	-	-	
				Penyusunan RKA dan DPA OPD	Jumlah RKA dan DPA OPD	Dokumen	4	4	-	-	
				Penyusunan Penetapan Kinerja	Jumlah Penetapan Kinerja	Dokumen	2	2	-	-	
				Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ)	Laporan	1	2	-	-	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja		Program pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kamtibmas	%	80	80			
				Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol PP							
				Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Teknik Pencegahan Kejahatan (Pos Trantibum Terpadu)	Jumlah Operasi Gabungan yang dilaksanakan	Kali	48	48			
				Patroli Insidentil	Jumlah Patroli yang dilaksanakan	Kali	180	180			
				Pemantapan Kemampuan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat							
				Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Kebakaran	Jumlah Tenaga Pemadam Kebakaran dan prosentase bencana kebakaran yang ditangani	orang	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Tugas Pengamanan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri	Jumlah Pengamanan Bulan Suci ramadhan dan hari raya yang dilaksanakan	Hari	9	9			
				Sub Kegiatan Tugas Pengamanan Dalam Rangka Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pengamanan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan	Kali	108	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi covid19		
				Sub Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas	Jumlah Anggota Linmas Desa yang dibina	Orang	54	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi covid19		
				Sub Kegiatan Tugas Pengamanan Pemilukada KDH/WKDH	Jumlah Pengamanan yang dilaksanakan	Kecamatan	19	19			
				Program Pemberantasan Barang kena Cukai Ilegal	Persentase Jumlah Pemberantasan barang kena cukai ilegal	%	90	85			
				Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai diperedaran atan tempat penjualan eceran	Jumlah Pengumpulan informasi yang dilaksanakan	Kali	10	10			
				Sub Kegiatan Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal	Jumlah Pengumpulan informasi yang dilaksanakan	Kali	10	10			
				Program Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Persentase Penegakan Perda yang ditangani	%	90	85			
				Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Jumlah Kegiatan Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Kegiatan	5	4			
				Penertiban Media Luar Ruang (Reklame)	Jumlah Penertiban Media Luar Ruang yang dilaksanakan	Kali	48	48			
				Penyidikan dan Penyelidikan Pelanggaran Perda	Jumlah pelanggaran penegakan perda yang diselesaikan	Kali	26	26			
				Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Penertiban PKL yang dilaksanakan	Kali	48	48			
				Pengembangan Satpol PP dalam rangka Penegakan Perda dan Peraturan Bupati	Jumlah Personel pengembangan Satpol PP dalam rangka pelaksanaan penegakan perda	orang	115	115			
				Pembinaan dan Sosialisasi Peraturan Daerah bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)	Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi PKL yang dilaksanakan	Kali	2	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi covid19		
				Penegakan Displin PNS							
				Sub Kegiatan Razia Pegawai Negerio Sipil (PNS)	Jumlah Pelaksanaan Razia PNS yang dilaksanakan	kali	48	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi covid19		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan Fisik Petugas lapangan Satpol PP	Jumlah Anggota Satpol PP yang mengikuti pelatihan fisik	orang	50	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi covid19		
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan penunjang Perangkat Daerah	%	90	90			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	surat	1000	1000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	20	20			
				Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 tahun	Jenis	35	35			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang diadakan	Jenis	6	6			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jenis	6	6			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makanan dan Minuman selama 1 tahun	Jenis	4	4			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	60	60			
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan Untuk Pelaksanaan Hari - Hari Besar	kegiatan	3	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi covid19		
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Jasa layanan Perkantoran yang disediakan	Orang	4	4			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas Operasional di adakan	Unit	3	3			
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah area gedung kantor/rumah dinas yang dipelihara	Unit	2	2			
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	12	12			
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	8	8			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	90	90			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek	Orang	78	-	Karena ada refocusing dan juga situasi yang tidak memungkinkan dimasa pandemi		
				Pengelolaan dan Peningkatan disiplin kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan	stell	91	91			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%	90	90			
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun	Jenis	3	3			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	7	7			
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Bupati Sumenep No : 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Bagi Korban Bencana Di Kabupaten Sumenep	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Presentase tenaga penanggulangan bencana yang handal	%	100	100			
				- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Satuan Search And Rescue (SAR)	Jumlah satuan SAR BPBD	Org	30	30			
				- Operasional SAR Speed Boat	Jumlah pelaksanaan operasi SAR Laut	Kali	36	36			
				- Kegiatan Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah daerah yang dipantau	Lokasi	20	13	Refokusing anggaran untuk penanganan Covid-19, shg anggaran mengalami pengurangan	Perlunya anggaran kebencanaan yang optimal sehingga lebih dapat menyebarluaskan informasi kebencanaan	
				- Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana	Jumlah desa yang difasilitasi sebagai Destana	Desa	7	7			
				Program Kedaruratan dan Pemenuhan Kebutuhan Logistik	Persentase penanganan bencana	%	90	100			
				- Kegiatan Pengambilan, Pendistribusian dan Pengadaan Buffer Stock dan Peralatan Bagi Korban Bencana	Persentase penanganan masalah logistik bagi korban bencana	%	90	100			
				- Kegiatan Operasional Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS-PB)	Jumlah tenaga PUSDalops yang terlatih	Org	16	16			
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi	%	90	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				- Kegiatan Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam / Sosial	Jumlah penanggulangan dan penyelesaian bencana	Lokasi	10	3	Dilakukannya Refokusing terhadap anggaran dan penanganan kebencanaan sehingga berpengaruh terhadap target dan kinerja yang telah ditetapkan	Perlunya anggaran kebencanaan yang optimal sehingga bisa menangani kebencanaan secara lebih baik	
6	Sosial	Dinas Sosial	1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
				Pembinaan dan Penyerahan Bantuan Stimulan untuk Rumah Tidak Layak Huni	jumlah rumah layak huni yang terbangun	Unit	217	217			
				Pemberdayaan Keluarga Miskin	1. jumlah pemulung, pedagang kecil dan wanita rawan yang dibantu	Orang	27	27			
					2. jumlah mahasiswa kurang mampu yang dibantu	Orang	65	65			
				Pendampingan Penyaluran Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai	jumlah waktu penyaluran BPNT	tahun	1	1			
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
				Rehabilitasi dan Peningkatan Motivasi bagi Lanjut Usia							
				Sosialisasi pembentukan karang werdha	Jumlah karang werdha yang dibina	Orsos	10	0	Anggaran terkena refocusing		
				pembinaan kesejahteraan bagi lanjut usia	jumlah lansia produktif yang dibantu	Orang	60	60			
				Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	jumlah lansia terlantar yang diberi jaminan sosial	Orang	100	100			
				Pelayanan dan perlindungan Sosial, Hukum bagi Anak	jumlah pelaksanaan sosialisasi	kali	1	0	Anggaran terkena refocusing		
				Pembinaan dan Rehabilitasi Tuna Sosial	jumlah pelaksanaan razia tuna social	kali	4	1	Anggaran terkena refocusing		
				Pembinaan dan Bantuan bagi Penyandang Disabilitas	jumlah penyandang disabilitas yang dibantu	Orang	50	50			
				Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)	jumlah penyandang disabilitas berat yang diberi jaminan social	Orang	30	30			
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
				Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH)	pelaksanaan Family Development Session (FDS) PKH di Kab. Sumenep	Kec	27	27			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penanganan Orang Terlantar	jumlah waktu penanganan orang terlantar	Bulan	12	12			
				Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat							
				Pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Pembinaan Kampung Siaga Bencana	jumlah TAGANA yang dilatih	Orang	100	100			
				Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	jumlah pelaksanaan sosialisasi	Kali	1	0	Anggaran terkena refocusing		
				Program Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
				Pembinaan dan Bantuan Sarana Prasarana Lembaga Kesejahteraan Sosial							
				Pendistribusian bantuan bagi anak dalam LKSA	Jumlah LKS yang dibantu	LKS	12	12			
				Pemberdayaan dan Bantuan bagi Organisasi Kesejahteraan Sosial	jumlah orsos yang dibantu	Orsos	364	364			
				Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)							
				Bakti Sosial dan Sosialisasi bersama TP PKK	Jumlah anak dari keluarga miskin yang dibina	Orang	100	100			
				Pembinaan bagi TKSK dan PSM	Jumlah TKSK yang dibina	Orang	27	27			
				Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial							
				Pembinaan Kesejahteraan bagi Perintis Kemerdekaan/ Veteran/Jandanya	jumlah perintis kemerdekaan, veteran dan jandanya yang dibantu	Orang	50	50			
				Pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah TMP yang dikelola dan dipelihara	Lokasi	1	1			
				Pengalangan Donor Darah Sukarela	jumlah peserta sosialisasi	Orang	90	90			
				Program Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi UPT							
				Operasionalisasi Rumah perlindungan Sosial	jumlah waktu operasional RPS	Bulan	12	12			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa listrik, telepon, air dan internet	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu kebutuhan bahan kebersihan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	jumlah waktu penyediaan bahan perkantoran	Bulan	12	12			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	jumlah waktu penyediaan bahan dan alat listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan iklan ucapan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Bulan	12	12			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jumlah kegiatan rapat-rapat dan konsultasi	Kali	40	25			
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Pemberian Takjil Buka Puasa	jumlah takjil yang dibagikan	Paket	1000	1000			
				Penyaluran Zakat Fitrah	jumlah pelaksanaan penyaluran zakat fitrah	Kali	1	1			
				Penyembelihan dan Penyaluran Hewan Qurban	jumlah pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran daging qurban	Kali	1	1			
				Penyedia Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah tenaga piket dan cleaning service	Orang	14	14			
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	5	5			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah dinas	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2			
				Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	6	6			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	jumlah waktu pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	tahun	1	1			

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Tabel 3. 2
Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase	100%	98%			
				Penyebaran Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Kerja	Orang	600	850	Akibat Pandemi Covid 19 penyampaian informasi bursa tenaga kerja melalui Online sehingga tersebar lebih meluas		
				Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di Deportasi	jumlah kegiatan layanan	kegiatan	1	1			
				Pemanduan dan Bimbingan Usaha Mandiri	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih/dibina	Orang	10	10			
				Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Persentase Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi	Persentase	100%	30%			
				Pemberangkatan Calon transmigran dan Kerja Sama Antar Daerah	Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati	KK dan KSAD	7	2	sesuai dengan kuota dari Provinsi		
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase	100%	82%			
				Penyelenggaraan dan Pelatihan Tenaga kerja	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	Orang	32	32			
				Pembinaan dan Monitoring Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Produktif	Orang	80	55	Refocusing		
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Pengelolaan dan Kemitraan Lembaga Pelatihan	Lembaga	30	30			
				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase	100%	97%			
				Penyelenggaraan Sistem Pengupahan yang berkeadilan dan Penciptaan Ketenangan Kerja	Jumlah Upah Minimum Kabupaten Yang Layak	Perusahaan	100	100			
				Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial	Jumlah Sarana Hubungan Industrial Yang Melaksanakan Kegiatan Sesuai Aturan	Perusahaan	40	40			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Optimalisasi Kinerja Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial menurun	Kasus	5	2			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase Pembinaan Lingkungan Sosial (DEHCHT)	Persentase	100%	100%			
				Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Pecah Batu	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	1	1			
				Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat di Bidang Pecah Batu	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan	Unit	1	1			
				Pembinaan dan Pelatihan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Rias Pengantin	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	1	1			
				Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat Atau Kelompok Masyarakat di Bidang Rias Pengantin	Jumlah Bantuan Peralatan Rias Pengantin yang diberikan/dihibahkan	Paket	1	1			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Bordir	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	1	1			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Melalui Pelatihan Meubelair	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	1	1			
				Pembinaan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat melalui Pembinaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	4	4			
				Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/Kelompok Masyarakat di Bidang Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT)	Jumlah Bantuan Peralatan Mesin Pemecah Batu yang diberikan/dihibahkan	Paket	4	4			
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Kelembagaan Pelatihan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun	Bangunan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan/ Peningkatan/ Pemeliharaan Sarana/prasarana kelembagaan pelatihan Bantuan sarana produksi bagi masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	Unit	2	2			
				Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Perorangan/Kelompok yang dilatih	Kelompok	2	2			
				Program Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase Pelatihan Keterampilan Kerja	Persentase	100%	100%			
				Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Masyarakat	Jumlah Perorangan/ Kelompok yang dilatih	Orang	25	25			
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Meningkatkan Penguatan Kelembagaan, Koordinasi dan Jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG)	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)	Persentase lembaga pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak yang aktif	%	85	84,5			
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Melalui Organisasi Wanita (Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Melalui Organisasi Wanita (Sosialisasi Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	2	2			
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase penanganan kasus terhadap perempuan dan anak	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Tertangani	%	100	100			
				Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Persentase Nilai Kabupaten Layak Anak	%	85	80			
				Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan Forum Anak	Jumlah kelompok yang difasilitasi	Kelompok	27	27			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase capaian program	%	85	90			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Lembar	2.000	1.244			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan kebutuhan bahan dan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12			
				Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan	Item	45	45			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	Item	6	6			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	8	8			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan minuman yang disediakan	Paket	1.800	1.650			
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	50	50			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah waktu penyediaan jasa layanan perkantoran	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	1			
				Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	5	5			
				Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	20	20			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase capaian program	%	85				
				Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Potong	54	54			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase capaian program	%	85				
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	3	3			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	4	4			
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan		Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Prosentase peningkatan ketersediaan pangan masyarakat	%	80	70	Pengadaan gabah tidak dapat dilaksanakan	Pelaksanaan pe- ngadaan direncanakan dgn lebih baik	
				Kegiatan Ketersediaan Pangan Daerah	Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan pangan	Kelompok	1	1			
				Kegiatan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah desa penerima bantuan pangan	Desa	3	3			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Distribusi Pangan	Jumlah lembaga distribusi pangan yang diber dayakan	Gapoktan /poktan	2	2			
				Program Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Angka Kecukupan Energi	Kkal/kap/ hari	2.170	2.170*			
				Kegiatan Pengembangan Konsumsi Pangan Masyarakat Dan Pemanfaatan Pekarangan	Jumlah kel. wanita yang memanfaatkan pekarangan	Kelompok	5	5			
				Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Pangan	Jumlah kel. Yang diberi bantuan alat /teknologi pangan	kelompok	2	2			
				Kegiatan Pengembangan Keamanan Pangan	Jumlah kantin sekolah yg difasilitasi	Sekolah	3	3			
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Prosentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan	%	60	60			
				Kegiatan Pengamatan Penyakit dan Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan	Jumlah petugas ternak yang dilatih	Orang	150	150			
				Kegiatan Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Ternak	Jumlah layanan kesehatan hewan terpadu	Ekor	1000	1000			
				Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Lalu Lintas Ternak dan Peredaran Bahan Asal Hewan	Lokasi	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Produksi Peternakan	Prosentase Peningkatan populasi ternak	%	0,53	0,45	Pengadaan bibit ternak tidak terlaksana secara optimal	Peningkatan koordinasi lintas OPD	
				Kegiatan Penyebaran Bibit Ternak							
				Sub Kegiatan Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat	Jumlah poktan ternak yang menerima bantuan	Kelompok	20	11	- Kegagalan pada proses pelelangan	-Perencanaan yang baik untuk proses pelelangan bantuan ternak	
				Sub Kegiatan Penyebaran dan Pengembangan Ternak	Jumlah kel. Masyarakat yg menerima bantuan	Kelompok	5	5			
				Kegiatan Inseminasi Buatan	Jumlah pelayanan inseminasi buatan	Akseptor	28.000	48.255			
				Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan	Jumlah sarana dan prasarana peternakan yang diberikan	lokasi	4	4			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Prosentase ketersediaan pangan masyarakat	%	80	80			
				Kegiatan Bantuan Sarana Produksi Bagi Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	Jumlah poktan/ gapoktan yang diberdayakan	Kelompok	9	9			
4	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Perda No 10 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kab Sumenep TA 2020	Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persen	56,69	56,72			
				Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Volume Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	M ³	400 m ³	400 m ³			
				Kegiatan Kebersihan Lingkungan	Cakupan Layanan Kebersihan	lokasi	3 Kecamatan	3 Kecamatan	-	-	-
				Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	paket	4	3	Pengurangan paket pekerjaan sarpras persampahan refocusing	Akan dianggarkan tahun berikutnya	-
				Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan DAK	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	paket	7	3	Pengurangan paket pekerjaan sarpras persampahan krn refocusing	Akan dianggarkan tahun berikutnya	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Air	Persentase Peningkatan Pemenuhan Baku Mutu Kualitas Lingkungan	Persen	22,22	22,2	Kurangnya lokasi pemantauan dan pemulihan pencemaran air sungai	Penambahan lokasi pemantauan lokasi pemulihan pencemaran air sungai	-
				Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian pencemaran Air dan Tanah	Jumlah lokasi Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah	sampel	22	12	Refocusing		
				Kegiatan Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran Air dan Tanah	Jumlah Penanggulangan dan Pemulihan pencemaran Air dan tanah	sungai, saluran dan pesisir pantai	7	5	Refocusing		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Pencemaran Udara	Jumlah Pemantauan kualitas udara ambien perkotaan	sampel	8	8	-	-	-
				Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran Udara	Jumlah Pemantauan kualitas udara ambien perkotaan	sampel	8	8	-	-	-
				Program Peningkatan Kapasitas	Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	Kelompok	10	10	-	-	-
				Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Pencemaran	Prosentase Pelayanan Tindak lanjut Pengaduan masyarakat akibat adanya pencemaran/kerusakan lingkungan	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Pengawasan Industri/usaha Penghasil Limbah	Persentase usaha/kegiatan yang dilakukan pengawasan	%	100	100	-	-	-
				Kegiatan Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah Pemenuhan Penilaian Kota Sehat/Adipura	instansi	6	6	-	-	-
				Kegiatan Penilaian Adiwiyata	Jumlah Lembaga/Instansi Koordinasi Program Adiwiyata	lembaga/sekolah	6	6	-	-	-
				Kegiatan Sarana dan Prasarana Peningkatan Kapasitas	Pembinaan dan Penyediaan Sarpras Peningkatan Kapasitas LH	desa/kelurahan	5	5	-	-	-
				Program Inventarisasi Data dan Informasi	Prosentase inventarisasi data dan informasi	%	50	50	-	-	-
				Penyusunan Informasi Kajian Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah Laporan IKPLHD	laporan	1	1	-	-	-
				Penyusunan Dokumen Lingkungan	Jumlah rekomendasi dokumen LH	rekomendasi	50	72	-	-	-
				Program Pemeliharaan Lingkungan	Pemeliharaan RTH	Ha	3	3	-	-	-
				Kegiatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Lingkungan	paket	1	1	-	-	-
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Luasan Rehabilitasi lahan Kritis	Ha	2	2	-	-	-
				Kegiatan Rehabilitasi Lahan	Luasan Rehabilitasi lahan Kritis	Ha	2	2	-	-	-
				Program Penataan Laboratorium Lingkungan	Jumlah layanan laboratorium lingkungan	sampel	250	331	-	-	-
				Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan	Jumlah layanan laboratorium lingkungan	sampel	250	300	-	-	-

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Penataan TPA	Jumlah Sampah yang terolah di TPA	M ³ /hari	140	140			-
				Kegiatan Pengelolaan TPA	Jumlah Sampah yang terolah di TPA	M ³ /hari	140	140			-
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten		PROGRAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase penerbitan dokumen kependudukan sesuai SOP	%	97	89,17	Karena adanya pandemi covid 19 sehingga pelayanan jemput bola tidak maksimal	Peningkatan pelayanan melalui jemput bola	
				Kegiatan penerbitan dokumen masalah kependudukan							
				Sub kegiatan registrasi data penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	Lembar	80.000	94.468			
				Kegiatan penerbitan dokumen masalah mutasi kependudukan							
				Sub kegiatan pemutakhiran data kependudukan	Jumlah data kependudukan bersih	Lembar	405.476	405.476	-		
				Kegiatan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang dilayani	Dokumen	380.000	266.798	Karena adanya pandemi covid 19 sehingga pelayanan jemput bola tidak maksimal		
				Kegiatan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi kependudukan	Jumlah kegiatan yang diselenggarakan	Kegiatan	1	1			
				PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL	Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil sesuai SOP	%	100	0	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dananya di refocusing	-	
				Kegiatan Penerbitan Dokumen Masalah Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	dokumen	5	0	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dananya di refocusing		
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase database kependudukan yang valid dan update	%	100	0	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dananya di refocusing	-	
				Kegiatan Sistem Informasi dan jaringan pelayanan dokumen kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang dibuat	dokumen	2	0	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dananya di refocusing		
				PROGRAM PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	%	75	60	Karena OPD masih belum mengajukan permohonan hak akses kependudukan		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyusunan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan							
				Sub kegiatan sosialisasi perjanjian kerjasama dengan lembaga pengguna	Nilai SKM	-	95	83.69	Karena OPD masih belum mengajukan permohonan hak akses kependudukan		
				PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN ADMINISTRASI	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	90	81.66	Ada beberapa kegiatan yang di refocusing		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	500	773		
				Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bulan/kec	12/27	12/27			
				Kegiatan penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor yang dibeli	Macam	13	13			
				Kegiatan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 tahun	Macam	56	43	Karena Efisiensi dan efektifitas kegunaan bahan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada	Perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang	
				Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Macam	3	3			
				Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibayar selama 1 tahun	Macam	5	5			
				Kegiatan penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelaksanaan rapat yang disediakan makanan dan minuman	rapat	48	48			
				Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	211	173	Karena adanya pandemi covid 19 sehingga perjalanan dinas berkurang		
				Kegiatan Peringatan hari-hari besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena dananya di refocusing		
				Kegiatan operasional UPTD	Jumlah layanan UPTD yang disediakan	UPT	4	4			
				Kegiatan penyediaan jasa layanan perkantoran	Jumlah petugas pelayanan perkantoran yang disediakan	Orang	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan dan peralatan kantor yang dibeli	Macam	16	16			
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	1			
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	42	42			
				Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Macam	15	15			
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR							
				Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	3	3			
				Kegiatan pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian	Jumlah pakaian yang disediakan	Pakaian	17	17			
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/9/KEP/435.013/2020 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020; 2. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/10/KEP/435.013/ 2020 tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2020; 3. Peraturan Bupati Tahun 2018 tentang Pengembangan Kawasan Pedesaan	Program Peningkatan Pendayagunaan Kelistrikan untuk Kawasan Pemukiman / Perumahan	Jumlah Lokasi Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun	Lokasi	11	18			
				Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kelistrikan Kawasan Permukiman Terpencil dan Kepulauan							
				Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Listrik PLTD	Jumlah Jaringan Listrik di daerah terpencil dan kepulauan yang dibangun	Paket	15	28			
				Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna							
				Kegiatan Pengembangan dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG)							
				Sub Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan dan Hibah Peralatan TTG	Jumlah Penerima Bantuan Hibah TTG	Pokmas	20	13	Refocusing		
				Kegiatan Pembinaan Penerapan Teknologi Tepat Guna							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Potensi Alam menjadi Sumber Energi Alternatif	Jumlah Instalasi Energi Terbarukan	Paket	20	20			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Teknologi Tepat Guna untuk Pengelolaan Potensi Alam	Jumlah UKM yang dibina melalui Pendayagunaan TTG	UKM	20	20			
				Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	% Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	%	0,062	0,04			
				Kegiatan Pembinaan Desa Membangun							
				Sub Kegiatan Gerakan Desa Membangun (Lomba Desa / Kelurahan)	Jumlah Keswadayaan Masyarakat dalam Pembangunan	Juta	#####	#####			
				Sub Kegiatan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Aktifitas Kegiatan Gotong Royong di Perdesaan Masyarakat	Desa	330	330			
				Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	% Lembaga kemasyarakatan desa/kel yang aktif	%	100	100			
				Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan Masyarakat desa serta Pendataan Profil Desa							
				Sub Kegiatan Fasilitasi Pendataan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang melaksanakan Pendataan Profil Desa	Desa	330	330			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat yang dibina	Lembaga Adat	5	19			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Kader Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah LPM yang Aktif	LPM	30	30			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Lembaga Posyandu	Jumlah Posyandu yang dibina	Posyandu	20	20			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Keluarga Penerima Manfaat	Jumlah Sasaran Pelaksanaan Jatim Puspa Berdasarkan Daerah Kantong Kemiskinan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	652	652			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Kemasyarakatan							
				Sub Kegiatan Penguatan bagi Kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Jumlah PKK Aktif	Kelom pok PKK	330	330			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Organisasi Wanita	Jumlah Organisasi Wanita yang aktif	organi sasi	24	24			
				Sub Kegiatan Peningkatan Manajemen Operasional Dharma Wanita Persatuan	Jumlah Organisasi Wanita aktif	organi sasi	65	65			
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi kelompok binaan PKK	Jumlah Kelompok Binaan PKK	kelom pok	48	48			
				Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa	% Desa yang Melakukan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	%	7	7			
				Kegiatan Pemilihan, Pelantikan, Pembinaan dan Evaluasi Aparatur Pemerintahan Desa							
				Sub Kegiatan Pembentukan BPD Tahun 2020-2026	Jumlah BPD yang terbentuk di Tahun 2020	Desa	328	328			
				Sub Kegiatan Sosialisasi Pembentukan BPD Tahun 2020-2026	Jumlah Peserta yang ikut Sosialisasi Pembentukan BPD Tahun 2020	Orang	355	355			
				Sub Kegiatan Pengamanan Pemilihan kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antar Waktu pada Tahun 2020	Desa	2	3			
				Sub Kegiatan Pelantikan Kepala Desa	Jumlah Kepala Desa yang dilantik Tahun 2020	Desa	226	226			
				Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Administrasi bagi Pemerintahan Desa							
				Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi tentang Desa	Jumlah Peraturan Perundang - undangan terkait Pemerintahan Desa secara administrasi, perangkat desa dan pengelolaan	Peraturan	7	7			
				Sub Kegiatan Sistem Informasi Management Administrasi Desa	Jumlah Desa yang Tertib Administrasi	%	9	9			
				Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa							
				Sub Kegiatan Pembinaan , Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	% Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai perUU	%	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Keikutsertaan BPJS bagi Perangkat Desa	orang	4.203	604	Perangkat desa belum menginput kepesertaan BPJS	Mendorong agar perangkat desa segera menginput kepesertaan BPJS	
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes yang Aktif	BUMDes	25	121			
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Lembaga Ekonomi Perdesaan							
				Sub Kegiatan Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades)	Jumlah Bumdes yang terbentuk	BUMDes	298	298			
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	Jumlah BUMDes yang dibina	BUMDes	20	20			
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	1. Mengendalikan dan mengatur Kelahiran Penduduk; 2. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; 3. Meningkatkan Keterpaduan Program KKBPK dengan Lintas Sektor	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	Persentase cakupan peserta KB Aktif	%	67,07	69,69			
				Promosi dan Konseling KB	Jumlah motivator KB yang difasilitasi	Orang	40	40			
				Pengadaan Sarana KB (DAK)	Jumlah sarana KB yang disediakan	Jenis	9	9			
				Pembangunan Gedung UPT KB (DAK)	Jumlah gedung UPT KB/ Balai Penyuluhan yang difasilitasi	Unit	6	6			
				Pergerakan Pelayanan Akseptor KB Aktif dan Baru	Jumlah akseptor KB Aktif/ Baru yang dilayani	Orang	60	60			
				Administrasi dari Gudang Kabupaten ke Faskes/ Klinik KB yang Teregester (DAK)	Jumlah faskes/ klinik KB yang difasilitasi	Unit	65	65			
				Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK)	Jumlah sarana KIE Kit yang disediakan	Unit	5	5			
				PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA	Persentase desa memiliki kelompok Tribina dan UPPKS aktif	%	50	50			
				Pengembangan Program Generasi Berencana	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	Jumlah pelayanan keluarga sejahtera yang diberikan	Jenis Layanan	8	8			
				Penyelenggaraan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Operasional Ketahanan Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (DAK)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Pertumbuhan Penduduk	%	0,56	0,306			
				Fasilitasi dan Sosialisasi Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	Kampung KB	10	10			
				Fasilitasi Pembinaan Operasional Petugas Lapangan dan Institusi Masyarakat	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang difasilitasi	Orang	664	664			
				Operasional Integrasi Program KKBPK di Kampung KB (DAK)	Jumlah Kampung KB yang difasilitasi	Kampung KB	67	67			
				Biaya Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	Jumlah Balai Penyuluhan KB yang difasilitasi	Balai Penyuluhan KB	26	26			
8	Perhubungan	Dinas Perhubungan		Program Pelayanan Angkutan dan Pengujian Sarana	Rata-Rata Load Factor Angkutan Umum	%	60	55			
				Kegiatan Manajemen Angkutan Dalam Trayek							
				Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan umum	Jumlah Dokumen Pelayanan Angkutan Umum	Dokumen	1	1			
				Penyuluhan bagi para awak angkutan umum	Jumlah Peserta Penyuluhan	Orang	50	0	Karena pandemi covid 19 dan Untuk menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas maka kegiatan ini tidak terlaksana meskipun persiapan pelaksanaan sudah dilakukan	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	
				Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Jumlah Pelaksanaan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum	Kali	6	2	Kegiatan Ini merupakan operasi gabungan antara Polres Sumenep dan Dinas Perhubungan yang tidak dapat dilanjutkan kembali karena pandemi covid 19 dan pemberlakuan PSBB	Sisa Anggaran akan dikembalikan ke Kasda	
				Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran	Lama Pelaksanaan Angkutan Lebaran	Bulan	3	3			
				Kegiatan Manajemen Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang							
				Pembinaan ABK dan Pemilik Kapal	Jumlah Peserta Pembinaan	Orang	150	0	Karena pandemi covid 19 dan Untuk menghindari kerumunan aerta mengurangi mobilitas maka kegiatan ini tidak terlaksana	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Manajemen Pengujian Sarana							
				Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah Alat Uji yang Diadakan	Unit	1	1			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat PKB	Jumlah Alat Uji yang Dipelihara	Unit	3	3			
				Kegiatan Manajemen Pengujian Sarana							
				Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	Jumlah Alat Uji yang Diadakan	Unit	1	1			
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat PKB	Jumlah Alat Uji yang Dipelihara	Unit	3	3			
				Program Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Kecukupan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	%	75	57			
				Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							
				Pembangunan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara	Unit	7	6	Ada pekerjaan fisik yaitu pembuatan dermaga apung di Pulau Kangean yang tidak terealisasi dikarenakan lahan di sisi darat belum dibebaskan namun DED (Detail Engineering Design) telah selesai dibuat	Kegiatan akan dilanjutkan di tahun berikutnya	
				Pengadaan Lahan untuk Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Luas Lahan yang Diadakan untuk Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	M2	24580	21712	Terjadi penolakan rencana pelaksanaan konsinyasi lahan oleh pengadilan negeri Sumenep	Melakukan koordinasi dengan ketua Tim Pengadaan tanah (Kepala BPN Sumenep)	
				Pembangunan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Gili Iyang	Jumlah Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara	Paket	1	1			
				Pembangunan Prasarana Perhubungan (BK PROV)	Jumlah Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara	Unit	6	0	Dana BK Provinsi ditransfer bulan Desember sehingga tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan	Kegiatan akan dilaksanakan di tahun berikutnya	
				Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang Direhabilitasi /Dipelihara	Unit	3	3			
				Kegiatan Operasional Prasarana dan Fasilitas Perhubungan							
				Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum	Kali	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rata-rata Kecepatan Kendaraan di Ruas Jalan Perkotaan	Km/Jam	40	40			
				Kegiatan Manajemen Lalu Lintas							
				Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau	Lama Pengawasan Dembarakasi dan Embarkasi	Bulan	12	12			
				Peningkatan Tertib Lalu Lintas	Lama Penyelenggaraan pengaturan Lalu Lintas	Bulan	4	4			
				Kegiatan Rekayasa Lalu Lintas							
				Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	Lama Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor	Bulan	9	0	Untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas maka kegiatan ini tidak terlaksana	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	
				Penyelenggaraan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	Tahapan Penilaian Wahana Tata Nugraha	Tahap	3	0	Untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas maka kegiatan ini tidak terlaksana	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	
				Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas							
				Sosialisasi Andalalin	Jumlah Peserta Sosialisasi	Orang	35	0	Untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas maka kegiatan ini tidak terlaksana	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	
				Program Pengembangan Sistem/ Lingkungan dan Keselamatan Transportasi	Prosentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi	%	80	80			
				Kegiatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU)							
				Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan PJU	Unit	310	310			
				Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jumlah Pemeliharaan dan Rehabilitasi PJU	Unit	3.499	3.499			
				Kegiatan Pengelolaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	Rasio Kecukupan Fasilitas Keselamatan Transportasi	%	80	80			
				Kegiatan Pengembangan Moda dan Teknologi Transportasi							
				Pengembangan Teknologi Transportasi	Jumlah Pengembangan Informasi dan Teknologi Transportasi	Paket	1	0	Recofusing anggaran		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	83.04			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Surat	900	1179			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	12			
				Kegiatan Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Kebersihan dan Jasa Kebersihan Kantor	Item	28	28			
				Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah Bahan Perkantoran yang Disediakan Selama 1 TA.	Item	51	51			
				Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang Diadakan	Unit	48	48			
				Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan	Macam	11	11			
				Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minuman	Orang	800	800			
				Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	126	123	Tidak mencapai dikarenakan pandemi covid 19 sehingga beberapa tempat diberlakukan PSBB	Berharap pandemi berakhir sehingga pelaksanaan program kegiatan berjalan semestinya. Sisa Anggaran yang tidak terserap dikembalikan ke kasda	
				Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar							
				Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Hari Jadi Kab. Sumenep yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas di masa pandemi maka kegiatan ini tidak terlaksana	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	
				Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep	Jumlah Kegiatan Hari Ulang Tahun RI yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Untuk menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas di masa pandemi maka kegiatan ini tidak terlaksana	Kegiatan ini akan dianggarkan lagi tahun depan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pandemi	
				Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Tenaga Kerja Penyedia Jasa Perkantoran	Orang	21	21			
				Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Unit	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara	Lokasi	4	4			
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	Unit	17	17			
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara	Unit	70	70			
				Kegiatan Penyediaan Sewa Tanah, Gedung, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Sewa Tanah	M2	1440	0	Belum ada perpanjangan perjanjian sewa dengan pihak 3	Akan melakukan koordinasi kembali dengan pihak ke 3	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	%	100	66.67			
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat/ Pelatihan/ Bimtek	Orang	1	1			
				Kegiatan Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Lapangan yang Dibeli	Set	90	90			
				Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Dibeli	Set	37	37			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	%	100	100			
				Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Disusun	Dokumen	4	4			
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	Dokumen	5	5			
				Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran OPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang Disusun	Dokumen	2	2			
9	Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Menyediakan infrastruktur guna mengintegrasikan sistem pelayanan publik	Program pengembangan informasi, Komunikasi dengan media massa							
				Pelaksanaan komunikasi dan koordinasi dengan media massa	Persentase penyebaran informasi daerah	persen	85	100			
				Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat	Persentase pembinaan kelompok masyarakat KIM	persen	85	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan SDM Bidang TIK	Persentase pemberdayaan TIK Masyarakat dan kecamatan	persen	85	99.77			
				Program Pengelolaan dan pemanfaatan informasi dengan Media							
				Melaksanakan kerjasama informasi dan media massa	Persentase pelaksanaan kerjasama informasi dengan media massa	persen	85	100			
				Pelayanan dan penerbitan tabloid info daerah	Persentase penerbitan tabloid daerah	persen	85	100			
				Pengumpulan data dan penyajian informasi	Persentase penyampaian data yang akurat ke publik	persen	85	100			
				Program Pemanfaatan sarana dan prasarana TIK							
				Pengembangan Jaringan G-Online	Jumlah OPD yang sudah terhubung jaringan internet	Jumlah	31	66			
				Penerapan aplikasi TIK							
				Penyediaan Jasa Komunikasi Internet	Persentase penyediaan biaya bendwiht kabupaten	persen	85	100			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase kebutuhan jasa kantor	persen	85	68.10			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Persentase Kebutuhan jasa kebersihan	persen	85	89.35			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Persentase kebutuhan bahan perkantoran	persen	85	99.82			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Persentase komponen listrik dan bangunan kantor	persen	85	99.98			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	persen	85	98.34			
				Penyediaan makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanin kantor dan rapat	persen	85	59.28			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Persentase perdin dalam dan luar daerah	persen	85	85.50			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Persentase penyediaan jasa kantor	persen	85	98.43			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Persentase pemenuhan pemeliharaan gedung kantor	persen	85	99.99			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Persentase pemenuhan pemeliharaan peralatan dan gedung	Persen	85	99.75			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi dan Usaha mikro		Program Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan modal koperasi Wanita	%	4	4,2			
				Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya	Koperasi	30	30 Koperasi			
				Peningkatan Kualitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	Jumlah SDM pengelola koperasi yang kompeten dan berdaya saing	Orang	134	130 Orang	Realisasi tidak sesuai dengan target karena 4 orang pengelola koperasi yang kompeten dan berdaya saing tidak hadir	Akan ditindaklanjuti untuk kegiatan tahun berikutnya	
				Program Penguatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi	%	3	3,5%			
				Pemantapan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dapat ditata kelembagaannya	Koperasi	100	100 Koperasi			
				Restrukturisasi Koperasi melalui lintas pelaku badan hukum Koperasi	Jumlah Koperasi yang ditertibkan badan hukumnya	Koperasi	100	100 Koperasi			
				Bimbingan Teknis Koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti Bimbingan Teknis	Koperasi	80	80 Koperasi			
				Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	Persentase modal Koperasi	%	12,5	0,168			
				Fasilitasi Manajemen Usaha Koperasi Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti magang	Koperasi	30	30 Koperasi			
				Program Peningkatan Usaha Mikro	Jumlah Produk yang berdaya saing	Produk	60	60 Produk			
				Fasilitasi Usaha Mikro Melalui Klinik KUMKM							
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	Jumlah usaha mikro yang dikembangkan melalui klinik KUMKM	Unit	25	25 Unit			
				Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah	Jumlah orang yang mendapatkan Sertifikasi Hak Atas Tanah	Orang	350	0	Anggaran untuk patok sudah di sediakan namun anggaran untuk sertifikat hak atas tanah di alihkan oleh pemerintah pusat untuk pertumbuhan ekonomi.	Usulan masyarakat di tahun 2020 di tampung dan akan di laksanakan pada TA. 2021	
				Validasi Data UMKM	Jumlah UMKM yang di monitoring	Unit	100	100 Unit			
				Pembinaan Kepada Wirausaha Muda melalui Sarana Produksi	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang difasilitasi	Kegiatan	18	18 Kegiatan			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase pertumbuhan wirausaha muda/baru	%	100	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat							
				Wirausaha Muda	Jumlah Peserta Pembinaan dan Pelatihan	Orang	1000	1000 Orang			
				Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil	Jumlah wirusaha muda yang di berdayakan	Orang/kelompok	100	100 Kelompok			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	90	0,9			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	Lembar	900	980 Lembar			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12 Bulan			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Buah	600	662 Buah			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	Jenis	40	40 Jenis			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Buah	178	180 Buah			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Eksemplar	2000	2.000 eksemplar			
				Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman	Bulan	12	12 Bulan			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	200	200 Kegiatan			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Orang	22	22 Orang			
				Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Gedung	1	1 Gedung			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	1 Gedung			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	21	21 Unit			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	20	20 Unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020;	Program Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Pengusaha Yang Berinvestasi	Investor	6.827	5.754	Capaian Realisasi Kinerja Program Promosi dan Kerjasama Investasi belum terpenuhi	Menyediakan strategi promosi yang perumusannya melibatkan konsultan dan stake holder lainnya.	
				Promosi potensi investasi daerah	Jumlah Investor Yang Melakukan Investasi	Investor	6.827	5.754	Capaian Realisasi Kinerja Kegiatan Promosi Potensi Investasi Daerah belum terpenuhi karena pandemi covid19	Peningkatan sarana promosi potensi investasi	
				Promosi Publikasi Potensi Investasi	Jumlah Paket Promosi Potensi Investasi	Paket	1	1			
				Pengembangan Potensi Investasi Daerah	Jumlah Kegiatan Pameran Potensi Investasi	Kegiatan	0	0	Pelaksanaan keikutsertaan menjadi peserta pameran hasil produk unggulan tidak terlaksana karena terkendala pandemi covid-19	1. Menjadi bagian dalam pelaksanaan pameran secara virtual yang dilaksanakan pihak lainnya	
				Pertemuan dengan Pengusaha/Investor	Jumlah Investor Yang Minat Berinvestasi	Investor	6.827	5.754	Pertemuan dengan Pengusaha/Investor tidak terlaksana karena terkendala pandemi covid-19	2. Penayangan audio vial potensi investasi dan Penyediaan data potensi investasi di lini masa (website atau android)	
				Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah Dokumen Data/Informasi Perizinan	Dokumen	7	7	Pengembangan data / informasi perizinan berjalan lambat	Secara aktif menjadi nara sumber dan peserta dalam acara gathering dan FGD (tatap muka atau webinar) yang dilaksanakan oleh pihak lainnya.	
										1. Pemenuhan sarana berupa hardware dan software komputer dan peralatan lainnya	
										2. Bekerja sama dengan konsultan dalam usaha digitalisasi sarana layanan perizinan	
										3. Penempatan data/informasi perizinan di lini masa (website atau android)	
				Penyusunan Profil Investasi dan Perizinan Kabupaten Sumenep	Jumlah Dokumen Peta Investasi dan Perizinan	Dokumen	7	7			
				Penyusunan Buku Laporan Bulanan dan Tahunan	Jumlah Dokumen Laporan Perizinan dan Investasi	Dokumen	56	56			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Sistem Infomasi Terhadap Layanan Publik	Jumlah Aplikasi SIM Perizinan	Aplikasi	1	1			
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan Perizinan Yang Dipakai	Peraturan PerUU Perizinan	92	92			
				Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	Peraturan PerUU Perizinan	92	92			
				Sosialisasi Perizinan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Perizinan yang disosialisasikan	Peraturan PerUU Perizinan	14	14			
				Publikasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Media Massa Sebagai Sarana Publikasi Peraturan Perundang-undangan Perizinan	Media Massa	3	3			
				Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Tempat Usaha Yang Dikunjungi	Lokasi	32	32			
				Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah Kegiatan Pengawasan untuk Badan Usaha / Pelaku Usaha yang Mendapatkan Surat Tegoran	Kegiatan	4	4			
				Penataan dan Penertiban Perizinan	Jumlah penanganan perizinan yang tidak sesuai dengan aturan	Kegiatan	5	5			
				Program Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
				Akselerasi Pertumbuhan Investasi							
				Pembinaan dan Evaluasi PMDN	Jumlah PMDN Yang Dibina	PMDN	30	30			
				Pembinaan Monitoring dan Evaluasi PMA/PMDN	Jumlah PMDN Yang Dibina	PMDN	30	30			
				Penyelenggaraan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	Jumlah Izin Prinsip	Izin Prinsip	20	20			
				Penyusunan Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Jumlah Obyek Peluang Potensi Investasi Kabupaten Sumenep	Obyek	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Pelayanan Administrasi Perizinan	Jumlah Izin yang Diterbitkan	Izin	4.958	14.893	Mutu Pelayanan Administrasi Perizinan perlu ditingkatkan	1. Pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP)	
										2. Pendampingan kepada pelaku usaha kepulauan dalam proses legalitas usahanya melalui Online Single Submission (OSS)	
										3. Pelayanan Perizinan melalui pelayanan bergerak (mobile service)	
										4. Peningkatan profesionalisme petugas front/back office pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/struktural	
										5. Merevisi SOP dan SPP Pelayanan Perizinan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terbaru	
				Pelayanan Permohonan Pendaftaran Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Berkas	4.958	14.893			
				Ketatalaksanaan Pendaftaran Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Memenuhi Syarat	Berkas	4.958	14.893			
				Optimalisasi Mobil Pelayanan Perizinan	Jumlah Permohonan Perizinan Yang Terlayani Mobil Keliling	Berkas	600	600			
				Penyelenggaraan Mal Pelayanan Perizinan	Jumlah jenis layanan perizinan	Jenis	100,00%	100,00%			
				Peningkatan Sistem Pelayanan Perizinan Bersertifikat ISO 9001:2008	Jumlah tahun menyandang sertifikat ISO 9001-2015	Tahun	1	1			
				Pelayanan Penerbitan Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	%	100,00%	100,00%			
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Tenaga Teknis Perizinan dalam Kegiatan Rapat Teknis dan Tinjauan Lapangan	Orang	6	6			
				Ketatalaksanaan Penerbitan Perizinan	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Tepat Waktu	%	100,00%	100,00%			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	31,00%	30,98%	Capaian Realisasi Kinerja Program belum terpenuhi karena adanya Capaian Realisasi Kinerja kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat belum terpenuhi.	Rasionalisasi jumlah target kinerja Program untuk Tahun yang akan datang	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1.988	1.943	Capaian Realsasi Kinerja belum tercapai karena hardware yang mendukung aplikasi simardi mengalami masalah	1. Peremajaan dan reparasi hardware yang mendukung aplikasi simardi	
										2. Rasionalisasi jumlah target kinerja untuk Tahun yang akan datang	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah waktu penyediaan bahan kebersihan, jasa kebersihan kantor, serta retribusi kebersihan	Bulan	12	12			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah waktu penyediaan bahan perkantoran berupa ATK, cetak dan penggandaan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Komponen	7	7			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan surat kabar/majalah/tabloid dan penghargaan prestasi masyarakat	Tahun	1	1			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Kotak	825	825			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Tahun	1	1			
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Refocusing Anggaran karena pandemi		
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah layanan perkantoran yang disediakan	Orang	9	9			
				Pengadaan peralatan daan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan perlengkapan gedung kantor yang dibeli	Unit	15	15			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Area	1	1			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	17	17			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah waktu pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	bulan	12	12			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	% Pengembangan kompetensi pegawai	%	6,11%	6,11%			
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/bimtek	Orang	5	0	Refocusing Anggaran karena pandemi		
				Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kependidikan	Jumlah waktu pengelolaan kepegawaian	Tahun	1	0	Refocusing Anggaran karena pandemi		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah stel pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Stel	32	0	Refocusing Anggaran karena pandemi		
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	15,83%	15,83%			
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Dokumen	12	12			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	11	11			
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen LKPJ, LPPD, LKJIP, SAKIP	Dokumen	4	4			
				Penyusunan RKA dan DPA OPD	Jumlah Dokumen RKA, RPKA, DPA, DPPA	Dokumen	4	4			
				Penyusunan Rencana Kerja OPD	Jumlah dokumen RENJA dan Tapkin OPD	Dokumen	2	2			
12	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Pembinaan pemuda dan olahraga melalui organisasi kepemudaan dan keolahragaan	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Jumlah Pemuda yang dibina sehingga berprestasi	%	10	3,8	ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara utuh dikarenakan ada pandemi covid	Walau terbatas, namun diusahakan ada perwakilan dari setiap unsur	
				Pemberdayaan Pemuda							
				Fasilitasi Pengiriman Kegiatan Kepemudaan	Jumlah Fasilitasi Pengiriman Kegiatan Kepemudaan	Orang	6	6			
				Sosialisasi Kepemudaan	Jumlah Sosialisasi Kepemudaan	Orang	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembinaan Paskibra	pelaksanaan Pembinaan Paskibra	Orang	74	20	Tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakan ada pandemic covid 19	Walau terbatas, namun diusahakan ada perwakilan dari setiap unsur	
				Pembinaan Pemuda Pelopor	Jumlah Pembinaan Pemuda Pelopor	Orang	50	25	Tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakan ada pandemic covid 19	Walau terbatas, namun diusahakan ada perwakilan dari setiap unsur	
				Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase prestasi atlet cabang olahraga berprestasi	%	25	42	ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan dikarenakan adanya recofusing anggaran tahun 2020		
				Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Jumlah atlet olahraga yang dibina						
				Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi / Tradisional	Jumlah event olahraga rekreasi yang difasilitasi	Kali	1	1			
				Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	Jumlah Pembibitan dan Pembinaan Olahraga	Kali	1	1			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	Buah	3	3			
				Pengiriman Atlet/ Pelatih Berprestasi	Jumlah Pengiriman Atlet/ Pelatih Berprestasi	Orang	10	2	ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara utuh dikarenakan ada pandemi covid	Walau terbatas, namun diusahakan ada koordinasi dengan pihak propinsi dalam rangka persiapan pengiriman atlet kedepannya	
				Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	kali	0	0	Terkena Recofusing		
				Penghargaan Atlet / Pelatih Berprestasi	Jumlah Penghargaan Atlet / Pelatih Berprestasi	Orang	30	0	Terkena Recofusing		
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	jumlah waktu kebutuhan bahan dan jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	jumlah waktu Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Bulan	12	12			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap bulan	Bulan	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	jumlah waktu Penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12	12			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	jumlah kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Bulan	12	12			
				Peringatan Hari-Hari Besar	jumlah kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar	Kegiatan	1	0			
				Operasional UPTD							
				Operasional UPTD Destinasi Wisata	Jumlah waktu pelayanan UPT yang disediakan	Bulan	12	12			
				Operasional UPTD Museum Keraton	Jumlah waktu pelayanan UPT yang disediakan	Bulan	12	12			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlahwaktu Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran yang disediakan	Bulan	12	12			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas -	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung yang dipelihara	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara	Bulan	12	12			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas yang dipelihara	Bulan	12	12			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pendidikan dan pelatihan formal	Bulan	12	12			
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Bulan	12	12			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Laporan Keuangan							
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah	Bulan	12	12			
13	Statistik	Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Statistik Daerah							
				Kegiatan Pengumpulan data dan penggandaan statistik sektoral							
				Menyediakan Data dan Statistik Daerah	Persentase Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (Sumenep Dalam Angka, PDRB, IPM, Profil Kecamatan)	Persen	100	100			
14	Persandian	Dinas Komunikasi Dan Informatika		Program Persandian Daerah							
				Kegiatan Pengelolaan dan pengamanan persandian Daerah							
				Meningkatkan keamanan persandian daerah	Jumlah dokumen persandian yang dikelola dalam e-arsip persandian	Jumlah	300	300			
15	Kebudayaan	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Pengembangan seni dan pelestarian budaya daerah	Program pengelolaan keragaman seni dan budaya	Indeks pelestarian seni dan budaya	%	80	45,33			
				Penyusunan data dan informasi cagar budaya, kepubakalaan dan permuseuman	Jumlah cagar budaya yang ada di Kab. Sumenep						
				Penyusunan data dan informasi cagar budaya	Jumlah penyusunan data dan informasi cagar budaya	Buah	20	12	Tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakan ada pandemic covid 19	Walau terbatas, namun diusahakan ada perwakilan dari setiap unsur	
				Pelestarian fisik dan non fisik cagar budaya, kepubakalaan dan permuseuman	Jumlah cagar budaya yang difasilitasi						
				Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman Budaya	Jumlah pendukung pengelolaan museum dan taman budaya	Kali	5	10			
				Penyusunan Data dan Informasi kesenian dan tradisi							
				Penguatan Kelembagaan Kelompok Seni dan Budaya	Prosentase Jumlah Kesenian lokal yang dikembangkan	%	12	0,16	Tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakan ada pandemic covid 19	Walau terbatas, namun diusahakan ada perwakilan dari setiap unsur	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan Pembinaan kesenian dan tradisi							
				Ekspresi Seni dan Budaya	Jumlah ekspresi seni dan budaya	Kali	24	12	Tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakan ada pandemic covid 19	Walau terbatas, namun diusahakan ada perwakilan dari setiap unsur	
				Pengiriman Duta Seni dan Budaya	Jumlah pengiriman duta seni dan budaya	Kali	1	0	Terkena Recofusing		
				Fasilitasi Partisipasi dalam Bidang Seni dan Budaya	Jumlah Partisipasi dama bidang seni dan budaya	Kali	1	0	Tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ada pandemic covid 19		
				Pelaksanaan Pelestarian sejarah							
				penyusunan data sejarah yang dilestarikan	Jumlah data sejarah yang tersusun	Buah	1	1			
				Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka	Jumlah perekaman digitalisasi bahan pustaka	Buah	1	1			
				Upacara Hari Jadi Kabupaten Sumenep	Terlaksananya upacara hari jadi	Kali	1	0	Tidak dapat dilaksanakan secara penuh dikarenakan ada pandemic covid 19		
				Fasilitasi pengelolaan kekayaan budaya							
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pengelolaan Koleksi Museum dan Taman Budaya	Jumlah BOP koleksi museum dan taman budaya	Kali	1	1			
				Bantuan Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum dan Taman Budaya Indonesia	Jumlah BOP sarana dan prasarana museum dan taman budaya	Kali	1	1			
				Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Publik Museum dan Taman Budaya	Jumlah BOP penyelenggaraan program publik museum dan taman budaya	Kali	1	1			
16	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Bupati S	Budaya baca, pembinaan, pengolahan dan pengembangan perpustakaan	prosentase peningkatan pengembangan budaya baca dan layanan pemustaka	%	69	69			
				Pengelolaan bahan pustaka	Jumlah Bahan Pustaka yang dikelola dan dimanfaatkan	Exp	2174	2287			
				Pengadaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah		Exp	1674	1752			
				Pengadaan Koleksi Perpustakaan Keliling		Exp	500	535			
				Pengelolaan Buku dan bahan pustaka		Keg	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan layanan perpustakaan dan budaya baca	Jumlah Lembaga Pemanfaat Layanan Perpustakaan	Lembaga	50	42	Budaya dan minat baca masyarakat yang masih harus ditingkatkan guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat dimasa Pandemi covid 19	Mengembangkan dan memperluas jangkauan pelayanan melalui layanan perpustakaan keliling umum maupun perpustakaan keliling pondok pesantren serta mendorong adanya perpustakaan desa / rumah belajar disetiap desa/ kelurahan	
				Lomba Minat Baca		Lomba	4	0	Tidak memenuhi target disebabkan karena kegiatan tidak terlaksana dalam peningkatan Minat Baca Masyarakat dikarenakan Masa Pandemi Covid 19	Peningkatan minat baca masyarakat dimasa Pandemi Covid 19 dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi baik video conference, zoom dan media lainnya,	
				Layanan Perpustakaan Secara Khusus untuk Desa Terpencil		desa	75	14	Tidak terpenuhinya target disebabkan karena dalam pelaksanaannya dalam masa Pandemi Covid 19 tidak memungkinkan dengan melaksanakan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah daerah	Mengoptimalkan layanan perpustakaan secara khusus untuk desa dengan pelayanan New Normal dalam pelaksanaannya	
				Layanan Perpustakaan Keliling		Lembaga	50	12	Lembaga/ Masyarakat dimasa Pandemi Covid 19 lebih memilih menggunakan aplikasi baik video conference, zoom dan media lainnya	Mengoptimalkan layanan perpustakaan menggunakan media aplikasi perpustakaan	
				Implementasi e-delivery dan Pengembangan Perpustakaan	Jumlah Lembaga, Pengelola dan Pemanfaat Layanan Perpustakaan	lembaga	60	46			
				Gerakan Gemar Membaca Nasional		Keg	1	0	Acara gebyar gerakan gemar membaca nasional yang rencana dilaksanakan pada bulan September 2020 tidak dapat direalisasikan mengingat pandemi yang belum pulih/normal dan tidak dapat berkegiatan yang melibatkan kerumunan massa		
				Bintek Pengelolaan Perpustakaan Desa/Masyarakat, Ponpes dan Sekolah		Lembaga	25	25			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat		Lembaga	20	20			
				Pencarian Naskah Kuno		Naskah Kuno	9	6	Waktu yang terbatas	Akan dilanjutkan pada tahun 2021	
				Pelayanan Literasi New Normal		Pengunjung	18.000	13.265			
17	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan	Penyelenggaraan Kearsipan	Prosentase Pencipta Arsip yang mengelola Arsip secara baku	%	6,25	6,8			
				Pengelolaan Arsip	Jumlah pengelola arsip yang mengikuti Bintek	Pencipta arsip	20	3	Terbatasnya Jumlah Kuota Peserta Bimtek yang Terkirim	Mengikut sertakan SDM yang ada untuk mengikuti Diklat / Bintek / Seminar yang bersifat Teknis;	
				Pengawasan Kearsipan	Jumlah pencipta arsip yang telah dilakukan pengawasan kearsipan	Pencipta arsip	40	58			
				Pengembangan Program dan Layanan Kearsipan	Jumlah pengelola arsip binaan yang ditingkatkan kompetensinya		2	2			

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Tabel 3. 3
Pelaksanaan Urusan Pilihan

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Pelaku Usaha Perikanan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Sosialisasi FORIKAN dan GEMARIKAN Optimalisasi Perlindungan Nelayan Fasilitasi Kartu KUSUKA Fasilitasi Asuransi Nelayan Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan Optimalisasi Usaha Pemanfaatan Ikan Fasilitasi Pengadaan Rantai Dingin Fasilitasi Operasionalisasi Tempat Pelelangan Ikan Fasilitasi Pengadaan Mini Cool Box Fasilitasi Industri Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan FORIKAN dan GEMARIKAN Jumlah Masyarakat Nelayan yang Mendapat Perlindungan Usaha Jumlah penerbitan kartu KUSUKA Jumlah nelayan yang terasuransi Jumlah tersetipikatnya tanah nelayan	Orang Orang Orang Orang	150 2406 2000 6	150 3215 2909 6			Untuk menindaklanjuti terhadap nasib pekerja informal yang tidak mempunyai penghasilan tetap khususnya nelayan Dinas Perikanan telah melakukan pemberian /hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pelatihan kepada nelayan baik dari nada APBD maupun dari dana APBN melalui Program pengembangan perikanan tangkap dengan realisasi sebesar Rp. 3.367.124.584
				Program Pengembangan Kelembagaan dan Pendataan serta Pengendalian Usaha Perikanan Optimalisasi Kelembagaan Perikanan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan bagi UMKM Perikanan Monitoring dan evaluasi kelompok Perikanan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (POKMASWAS) Fasilitasi Penerbitan Dokumen Usaha Perikanan	Prosentase Peningkatan Kelembagaan Perikanan yang Berbadan Hukum Jumlah Peningkatan Kelembagaan Perikanan yang terfasilitasi Jumlah UMKM Perikanan yang dibentuk dan terbina Jumlah kelompok perikanan yang di evaluasi Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh perundang-undangan Jumlah kelompok masyarakat perikanan yang terbina dan terberdayakan Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh perundang-undangan	% Kelompok Kelompok Orang Kelompok Kelompok	20 100 10 90 187 6 127	19,5 100 10 90 187 6 127			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Informasi dan Promosi Hasil Perikanan	Jumlah data produksi dan promosi hasil pembangunan perikanan	Eksemplar	100	100			
				Pameran Pembangunan Perikanan	Jumlah Pameran yang diikuti	Event	1	0	Refocusing dana Covid	Dialihkan/ digeser kepada anggaran Covid	
				Updating Data Base Perikanan	Jumlah data hasil produksi Perikanan	Eksemplar	100	100			
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,41	0,46			
				Optimalisasi Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Jumlah Peserta Kegiatan Pemulihan Sumberdaya Perikanan Tangkap	Orang	50	50			
				Sosialisasi Gerakan Cinta Laut	Jumlah nelayan yang tersosialisasi	Orang	50	50			
				Pelatihan Perawatan Perahu Penangkapan Ikan	Jumlah terlatihnya nelayan untuk perawatan perahu penangkapan ikan	Orang	-	-			
				Pelatihan Perbaikan dan Perawatan Mesin Perahu	Jumlah terlatihnya nelayan memperbaiki mesin kapal	Orang	50	50			
				Optimalisasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang Layak	Kelompok	80	80			
				Pengadaan Perahu 3 GT	Jumlah pengadaan perahu 3 GT	Kelompok	3	3			
				Pelatihan dan Pengadaan Perahu berbahan bakar LPG	Jumlah pengadaan perahu berbahan bakar LPG	Kelompok	5	3			
				Pengadaan Sarana Penangkapan Gurita	Jumlah sarana alat pancing gurita	Kelompok	4	4			
				Pengadaan Sarana Penangkapan Rajungan	Jumlah pengadaan Bubur Rajungan	Kelompok	5	5			
				Pengadaan Paket Perahu Berkatir dan Perahu Fiber 7 meter	Jumlah kelompok nelayan yang terfasilitasi aspirasinya	Kelompok	10	10			
				Pengadaan Paket Penangkapan Perahu Jukung	Jumlah pengadaan perahu jukung	Kelompok	6	6			
				Pengadaan Mesin 23-24 PK	Jumlah pengadaan mesin perahu 23-24 PK	Kelompok	5	5			
				Pengadaan Mesin 5-9 PK	Jumlah pengadaan mesin perahu 5-9 PK	Kelompok	8	8			
				Pengadaan Sarana Penangkapan Udang	Jumlah sarana penangkapan udang	Kelompok	6	6			
				Pengadaan Paket Perahu Fiber	Jumlah pengadaan perahu fiber	Kelompok	3	3			
				Pengadaan Jaring Gondrong	Jumlah pengadaan jaring gondrong	Kelompok	6	6			
				Pengadaan Jaring Millenium	Jumlah pengadaan jaring millenium	Kelompok	13	13			
				Pengadaan Mesin 19 PK	Jumlah pengadaan mesin perahu 19 PK	Kelompok	6	6			
				Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan	Jumlah Alat Bantu Teknologi Penangkapan Ikan	Kelompok	8	8			
				Pengadaan Fish Finder dan GPS	Jumlah pengadaan Fish Finder dan GPS	Kelompok	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Stimulasi Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Stimulasi Perikanan Tangkap	Kelompok	20	18			
				Stimulasi Perikanan Tangkap	Jumlah Bantuan Stimulasi Perikanan Tangkap	Kelompok	18	18			
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	0,88	3,28			
				Optimalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Layak	Orang	80	80			
				Paket Percontohan Budidaya Gurame	Jumlah pembudidaya yang menerima percontohan budidaya gurame	Orang	20	20			
				Fasilitasi Operasionalisasi Balai Benih Ikan	Jumlah BBI yang terfasilitasi	Kg	1060	1060			
				Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak	Jumlah pembudidaya yang menerima percontohan budidaya nila di kolam/tambak	Orang	60	60			
				Optimalisasi Usaha Perikanan Budidaya	Jumlah Pelaku Usaha Pembudidaya Perikanan	Orang	1280				
				Pengadaan Alat Ukur Kualitas Air	Jumlah sarana kualitas air	Orang	80	85			
				Fasilitasi Penerbitan Kartu Pembudidaya dan Asuransi Budidaya	Jumlah kartu pembudidaya dan asuransi budidaya yang diterbitkan	Orang	80	80			
				Normalisasi Saluran Tambak Garam	Jumlah petambak garam yang menerima bantuan	Orang	10	10			
				Pengadaan Prasarana Usaha Garam Rakyat	Jumlah petambak garam yang menerima bantuan sarana dan prasarana usaha garam rakyat	Kelompok	20	20			
				Normalisasi Saluran Tersier Garam Rakyat	Jumlah petambak garam yang menerima bantuan	Kelompok	1	1			
				Pendampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Pembudidaya (SeHAT-KAN)	Jumlah sertifikasi hak atas tanah bagi pembudidaya	Orang	460	1000			
				Temu Lapangan Percontohan Budidaya Ikan/Udang	Jumlah pelatihan Budidaya ikan/udang yang terlaksana	Orang	200	200			
				Pengadaan Percontohan Rumah Tunnel	Jumlah petambak garam yang menerima bantuan sarana dan prasarana usaha garam rakyat	Kelompok	1	1			
				Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR)	Jumlah bantuan sarana dan prasarana Produksi Garam Rakyat	Kelompok	8	8			
				Pembangunan Gudang Garam Sederhana	Jumlah bantuan sarana dan prasarana Produksi Garam Rakyat	Kelompok	10	10			
				Pengadaan Alat Perebusan Garam dan Geoisolator	Jumlah Bantuan Stimulasi Perikanan Budidaya	Kelompok	8	8			
				Penyusunan Fisibelstadi Pengembangan Garam di Kepulauan	Jumlah dokumen study ekonomi pembudidaya garam	Dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil (DAK)	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan Stimulasi Perikanan Budidaya	Kelompok	16	16			
				Paket Budidaya Lele di Kolam	Jumlah pembudidaya yang menerima percontohan budidaya lele di kolam	Kelompok	5	5			
				Paket Percontohan Nila di Kolam/Tambak	Jumlah pembudidaya yang menerima percontohan budidaya nila di kolam/tambak	Kelompok	3	3			
				Paket Percontohan Budidaya Gurame	Jumlah pembudidaya yang menerima percontohan budidaya gurame	Kelompok	6	6			
				Paket Percontohan Budidaya Udang Sederhana	Jumlah pembudidaya yang menerima percontohan budidaya udang sederhana	Kelompok	2	2			
				Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Jumlah Masyarakat Perikanan yang Terampil dan Terbina Usahanya	Orang	300	300			
				Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Perikanan yang Terampil dan Terbina	Orang	30	30			
				Pembinaan/pelatihan Penerapan teknologi tepat guna	Jumlah pelatihan Budidaya lele dan udang yang terlaksana	Orang	30	30			
				Bantuan Alat pertanian/perkebunan/perikanan/perikanan untuk masyarakat/kelompok masyarakat	Jumlah Masyarakat/Kelompok yang Menerima Bantuan Alat Perikanan	Orang	270	270			
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	Jumlah pembudidaya penerima Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang Layak	Orang	270	270			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	95	93,03			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	surat	1000	1000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	rekening	2	1			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	kegiatan	1	1			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	kegiatan	1	1			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	kegiatan	1	1			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	eksemplar	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	jumlah tersedianya makanan dan minuman	kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	kegiatan	1	1			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah layanan perkantoran yang disediakan	kegiatan	1	1			
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	kegiatan	2	2			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	kegiatan	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	kegiatan	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	kegiatan	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	kegiatan	1	1			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	%	95	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	kegiatan	2	2			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	kegiatan	6	6			
				Penyusunan Laporan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	kegiatan	5	5			
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran, tahunan, LKJP, LPPD	kegiatan	1	1			
2	Pariwisata	Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	Mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata daerah	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan wisatawan	%	90	49,65			
				Penyusunan Bahan Kebutuhan Informasi							
				Sistem Informasi Manajemen Informasi Pemasaran Kepariwisataaan	Jumlah sarana informasi	Buah	3	3			
				Penyebaran Informasi Pemasaran Kepariwisataaan	Jumlah media informasi dan promosi	Buah	30	30			
				Pelaksanaan Promosi dan pemasaran							
				Perluasan Produk Unggulan Pasar Pariwisata	Jumlah perluasan prduk unggulan pasar pariwisata	Kali	1	1			
				Pengiriman Duta Promosi Pariwisata	Jumlah pengiriman duta promosi pariwisata	Kali	1	1			
				Pelaksanaan Kerjasama Kepariwisataaan							
				Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata	Jumlah kerjasama promosi	Kali	4	4			
				Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Jumlah kerjasama kemitraan dan sekber madura raya	kali	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program pengembangan destinasi pariwisata, pengawasan kepariwisataan dan Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata							
				Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata							
				Pembangunan Sarana Objek Wisata Kabupaten Sumenep	Jumlah Pembangunan Sarana Objek Wisata Kabupaten Sumenep	obyek	1	1			
				Penyusunan Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Kebijakan Pengembangan Destinasi Pariwisata	obyek	1	0	Terkena Recofusing		
				Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	0	0	0	Terkena Recofusing		
				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Jumlah Fasilitasi Sarana dan Prasarana Objek Wisata	Obyek	3	3			
				Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Wisata Seni dan Budaya	Jumlah Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Wisata Seni dan Budaya	Obyek	2	0	Terkena Recofusing		
				Penyusunan Data dan Informasi Pelaku Usaha Pariwisata							
				Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata	Jumlah Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata	Jenis	5	8			
				Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pariwisata							
				Rekomendasi Perijinan Usaha Pariwisata	Jumlah Rekomendasi Perijinan Usaha Pariwisata	Buah	35	35			
				Pelaksanaan Pemberdayaan Sumber Daya Pariwisata							
				Pembinaan Kelompok Sadar Wisata	Terbentuknya kelompok sadar wisata	Kelompok	4	4			
				Pemberdayaan dan Fasilitasi Pelaku Wisata	Jumlah fasilitasi pelaku wisata	Tahun	1	1			
				Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata							
				Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Jumlah pelaku destinasi wisata	Orang	50	50			
				Pelatihan Pemandu Wisata Snorkling	Jumlah Pemandu Wisata Snorkling terlatih	Orang	40	40			
				Pelatihan Tata Kelola Homestay / Pondok Wisata	Jumlah pelaku Tata Kelola Homestay / Pondok Wisata terlatih	Orang	50	50			
				Fasilitasi Operasional Layanan TIC	Tersedianya TVC promosi pariwisata	paket	2	2			
				Pelatihan Pemandu Wisata Balawisata	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kali	1	0	Terkena Recofusing		
				Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan/Perkotaan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kali	1	0	Terkena Recofusing		
				Pendukung Kegiatan DAK Non Fisik	Terselenggaranya pendukung kegiatan DAK	Kegiatan	3	3			
				Pelatihan Pemandu Wisata Ekowisata	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kali	1	0	Terkena Recofusing		

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakan/lanjutan Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Dan Sejarah	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kali	1	0	Terkena Recofusing		
3	Pertanian	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penanganan Pemasaran Produk Pertanian/ Perkebunan Sub Kegiatan Pameran Potensi Produk Pertanian/Perkebunan Kegiatan Kemitraan dan Temu Usaha Produk Pertanian/Perkebunan Sub Kegiatan Kemitraan Usaha Tani Komoditi Pertanian/Perkebunan Kegiatan Penyediaan Alat Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Persentase kelompok tani yang menjadi kelompok pengolah Jumlah penanganan pemasaran produk pertanian/perkebunan Jumlah produk pertanian yang dipromosikan Jumlah kelompok yang melaksanakan kemitraan usaha dan difasilitasi Jumlah kelompok yang melaksanakan kemitraan usaha Jumlah alat pengolahan hasil yang disediakan	% jenis kelompok paket	1,5 6 2 5	1,5 20 7 5			Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep dalam rangka memperhatikan nasib pekerja informal yang tidak mempunyai penghasilan tetap khususnya petani telah melakukan pemberian hibah barang kepada petani secara langsung dan melalui pekerjaan padat karya. Serta juga telah melakukan pembinaan usaha petani dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk sehingga lebih mempunyai nilai jual dan sekaligus meningkatkan pendapatan/ penghasilan petani melalui beberapa program kegiatan sebagaimana berikut : 1. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 6.091.475.240,- ; dengan rincian kegiatan antara lain : - Pembedayaan Kelembagaan dan Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air (Rp. 761.358.440), - Pertanian dan penerapan teknologi pertanian (Rp. 2.710.304.000), - Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK) (Rp. 2.619.812.800) dan 2. Program Bina Usaha Hasil Produksi
				Program Produksi Pertanian	Jumlah produksi padi	ton	237525,12	254323,35			
				Jumlah produksi jagung		ton	450684,29	361737,66	tidak tercapainya target produksi karena menurunnya luas panen dan terdapat sisa panen di tahun berikutnya	Memberikan himbauan kepada petani untuk melakukan penanaman se awal mungkin di MH 1 disaat ketersediaan air cukup	
				Jumlah produksi kedelai		ton	7891,95	347,14	Produksi Kedelai Menurun dikarenakan luas tanam yang menurun karena harga produksi yang tetap dikisaran 5.000 rupiah, sehingga petani banyak yg beralih ke komoditas ke Kacang hijau dan kacang tanah	Perlu intervensi pemerintah terhadap harga jual ketika panen minimal kisaran 7000/kg agar petani kembali berminat untuk menanam kedelai	
				Jumlah Produksi Ubi Kayu		ton	54,897,3	41.889,50	tidak tercapainya target produksi karena menurunnya luas panen	perlu intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga agar petani bertambah minat	
				Jumlah produksi bawang merah		kwintal	5157,29	68052			
				Jumlah produksi cabe rawit		kwintal	3495,52	77022			
				Kegiatan Intensifikasi Tanaman Pangan	Jumlah luas tanam demplot tanaman pangan yang dilaksanakan	hektar	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Budidaya Tanaman Hortikultura	Jumlah luas tanam demplot tanaman hortikultura yang dilaksanakan	hektar	1	1			Pertanian/ Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 97.004.500,-
				Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman	Jumlah luasan yang dilakukan pencegahan serangan OPT	hektar	80	80			
				Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana pertanian dengan kebutuhannya	%	10	10			
				Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air	Jumlah pembangunan/rehab infrastruktur pertanian yang dilaksanakan	unit	5	4	Putus kontrak kegiatan pembangunan pompanisasi kec masalembu karena tenggelamnya kapal pengangkut barang	Akan dianggarkan kembali di tahun 2022	
				Kegiatan Pengawasan dan Pengawalan Pupuk Bersubsidi/ Pestisida	Jumlah kecamatan yang dilakukan pengawasan dan pengawalan pupuk bersubsidi	kec.	27	27			
				Kegiatan Pengadaan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian	unit	71	71			
				Sub Kegiatan Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Jumlah pengadaan alat mesin pertanian	unit	71	71			
				Kegiatan Penyediaan informasi teknologi dalam sistem penyuluhan pertanian	Jumlah penyediaan informasi teknologi dalam sistem penyuluhan pertanian	kelompok	200	200			
				Sub Kegiatan Penyebaran informasi teknologi pertanian dalam upaya peningkatan kapasitas SDM Pertanian	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kelompok	200	200			
				Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sistem Pertanian Terpadu Di Daerah Dataran Tinggi (IDB)	Jumlah luasan terkelola dengan penyediaan sarana dan prasarana terpadu yang dilaksanakan	hektar	26	26			
				Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana	unit	74	74			
				Program Peningkatan kualitas bahan baku (DBHCHT)	Jumlah penyediaan bahan baku (tembakau) berkualitas	batang	#####	#####			
				Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices tembakau	Jumlah luasan pembudidayaan bibit tembakau nikotin rendah yang dilaksanakan	hektar	2,5	2,5			
				Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen	Jumlah sarana dan prasarana panen dan pasca panen yang disediakan	unit	25	25			
				Kegiatan Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	Jumlah sarana dan prasarana usaha tani tembakau yang disediakan	unit	74	74			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penerapan inovasi teknis	Jumlah luas demplot penangkaran benih tembakau varietas unggul	hektar	3	3			
				Kegiatan Penerapan budidaya tembakau yang baik	Jumlah luasan pembudidayaan bibit tembakau nikotin rendah yang dilaksanakan	hektar	2,5	2,5			
				Program Produksi Perkebunan	Jumlah produksi kelapa	ton	42.663,92	44.180,09			
					Jumlah produksi cabe jamu	ton	9.868,31	10.299,68			
					Jumlah produksi jambu mete	ton	4822,31	5380,86			
					Jumlah produksi siwalan	ton	776,37	750,57	Tidak tercapainya target produksi siwalan karena banyak tanaman tua yang tidak menghasilkan	perlu dilakukan peremajaan tanaman	
					Jumlah produksi tembakau	ton	9242,28	5901,59	Produksi Tembakau menurun karena luas tanam yang menurun sekitar 39 % menyesuaikan kebutuhan Pabrikasi	perlu dibangun kemitraan dengan Pabrikasi agar produksi Tembakau petani terbeli dengan harga yang layak dan sudah diinisiasi adanya perda baru tentang Pertembakauan yang sudah selesai Naskah akademiknya	
				Kegiatan Intensifikasi Tanaman Perkebunan Tahunan	Jumlah luas tanam demplot tanaman perkebunan tahunan yang dilaksanakan	hektar	2,6	4,14			
				Kegiatan Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah tanaman perkebunan yang diremajakan/ tertangani	batang	200	200			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	%	100	100			
				Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	surat	2600	2721			
				Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	rekening	20	20			
				Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan dan jasa kebersihan kantor yang disediakan	jenis	6	6			
				Kegiatan Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan	jenis	9	9			
				Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	8	8			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan disediakan	jenis	4	4			
				Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	jenis	3	3			
				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas untuk rapat, koordinasi dan konsultasi yang disediakan	kali	90	101			
				Kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah Kegiatan/Pagelaran Kedaerahan yang dilaksanakan	-	-	-	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran difocusing untuk pengendalian penyebaran covid-19		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan/Pagelaran Kedaerahan	Jumlah Kegiatan/Pagelaran Kedaerahan yang dilaksanakan	-	-	-			
				Kegiatan Operasional UPTD	Jumlah UPTD/UPT yang disediakan kebutuhan bahan penunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya	UPT	2	2			
				Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah jasa layanan perkantoran yang disediakan	jenis	4	4			
				Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	jenis	11	11			
				Kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang direhab	unit	7	7			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	2	2			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	22	22			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jenis	2	2			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100	100			
				Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan/ bimtek	orang	2	6	Kegiatan tidak dilaksanakan karena anggaran difocusing untuk pengendalian penyebaran covid-19	dilaksanakan dengan biaya sendiri & sebagian biaya pada badan diklat BKPSDM	
				Kegiatan Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah pegawai yang difasilitasi	orang	64	64			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	100	100			
				Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun	dokumen	6	6			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	9	9			
				Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah dokumen laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	dokumen	5	5			
				Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran OPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun	dokumen	4	4			
6	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perabup Bupati Sumenep Nomor 32 Th 2019 ttg Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Sumenep Tahun 2020	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Pesentase peningkatan kemampuan usaha industri kecil dan menengah	%	100	100			
				(Kegiatan) Penumbuhan Usaha Baru Industri							
				(Sub Kegiatan) Penumbuhan usaha industri melalui pokok-pokok pikiran	Jumlah IKM yang mendapatkan bantuan	IKM	43 IKM	43 IKM			
				(Kegiatan) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Industri							
				(Sub Kegiatan) Pelatihan aneka Olahan dan pengembangan kemasan produk dalam meningkatkan pemasaran	Jumlah peserta pelatihan pengembangan usaha	Peserta	63 Orang peserta	63 Orang peserta			
				(Sub Kegiatan) Fasilitasi pengembangan industri ukir kayu	Jumlah peserta pelatihan pengembangan kayu ukir	Peserta	24 org peserta (10 IKM)	24 org peserta (10 IKM)			
				(Kegiatan) Penataan Kelembagaan Industri	Jumlah sentra industri yang dikembangkan	sentra	4 sentra	4 sentra			
				(Sub Kegiatan) Penataan Sentra Industri Petis	Jumlah peserta penataan sentra	Peserta	40 Peserta	40 Peserta			
				(Sub Kegiatan) Penataan Kelembagaan Sentra IKM Kerupuk Ikan	Jumlah peserta penataan sentra	Peserta	43 Peserta	43 Peserta			
				(Sub Kegiatan) Penataan Kelembagaan Sentra Industri Rengginang	Jumlah peserta penataan sentra	Peserta	37 Peserta	37 Peserta			
				(Sub Kegiatan) Penataan Kelembagaan Sentra IKM Bawang Goreng	Jumlah peserta penataan sentra	Peserta	20 Peserta	20 Peserta			
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Persentase perkembangan teknologi industri dalam meningkatkan nilai produksi	%	100	100			
				(Kegiatan) Pengembangan Teknologi Industri Berbasis Industri Agro	Jumlah IKM yang dilatih						
				(Sub Kegiatan) Pelatihan GMP (Good Manufacturing Practices) krupuk ikan	Jumlah peserta pelatihan GMP krupuk ikan	Peserta	40 peserta	40 peserta			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Kegiatan) Pelayanan informasi dan pengembangan teknologi industri	Jumlah pelayanan informasi dan IKM yang mendapatkan pengembangan teknologi						
				(Sub Kegiatan) Pemutakhiran Data Industri	Jumlah Data IKM	data	500 data	500 data			
				(Sub Kegiatan) Legalitas Merek Dagang	Jumlah IKM yang mendapatkan Fasilitasi HAKI	IKM	74 IKM	74 IKM			
				(Sub Kegiatan) Fasilitasi Sertifikasi halal	Jumlah IKM yang mendapatkan Sertifikasi halal	IKM	37 IKM	37 IKM			
				Program Pembinaan Industri	Persentase meningkatnya pembinaan melalui fasilitasi, pendataan dan pengawasan industri	%	100	100			
				(Kegiatan) Pemetaan Industri Hasil Tembakau	Jumlah industri hasil tembakau	Industri	18 Industri	18 Industri			
				(Kegiatan) Fasilitasi Pelaksanaan Kemitraan UKM dan Usaha Besar dalam Pengadaan Bahan Baku dan Produksi Hasil Tembakau	Jumlah kerjasama dengan usaha besar	kerjasama	1 kerjasama	1 kerjasama			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Persentase tersedianya kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100			
				(Kegiatan) Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	surat	3000 surat	3378 surat			
				(Kegiatan) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, listrik yang dibayar	rekening	2 rekening	2 rekening			
				(Kegiatan) Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor dan jasa kantor	buah	84 buah	84 buah			
				(Kegiatan) Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran yang dibeli	buah	84 buah	84 buah			
				(Kegiatan) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang dibeli	buah	84 buah	84 buah			
				(Kegiatan) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	media	84 media	84 media			
				(Kegiatan) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah rakor yang dihadiri	Perjadin	520 perjadin	1.040 perjadin			
				(Kegiatan) Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah unit jasa layanan kantor	unit	12 unit	12 unit			
				(Kegiatan) Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	1 unit	1 unit			
				(Kegiatan) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ rumah dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ rumah dinas yang dibeli	unit	79 unit	79 unit			
				(Kegiatan) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	2 unit	2 unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Kegiatan) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	43 unit	43 unit			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	100	100			
				(Kegiatan) Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan /bimtek	Orang	1 ASN	1 ASN			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	100	100			
				(Kegiatan) Penyusunan Laporan Keuangan	dokumen laporan keuangan	Doku men	4 dokumen	4 dokumen			
				(Kegiatan) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				(Sub Kegiatan) Penyusunan LPPD	Jumlah buku laporan keuangan yang disusun	Doku men	1 dokumen	1 dokumen			
				(Sub Kegiatan) Penyusunan RKA, DPA dan Ang.kas	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Doku men	6 dokumen	6 dokumen			
				(Sub Kegiatan) LKJiP	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Doku men	1 dokumen	1 dokumen			
7	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Perabup Bupati Sumenep Nomor 32 Th 2019 ttg Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	persentase efisiensi perdagangan dalam negeri	%	100	100			
				(Kegiatan) Perdagangan dalam negeri dan luar negeri							
				(Sub Kegiatan) Informasi Harga Sembako dan Barang Strategis Lainnya	Jumlah Frekuensi Informasi Bapokti yang disampaikan kepada masyarakat	kali	55 kali	55 kali			
				(Sub Kegiatan) Operasional Gudang SRG	Jumlah orang pemelihara Gudang yang menerima honor	orang	2 orang	2 orang			
				(Sub Kegiatan) Publikasi Potensi Komoditi	Jumlah sarana publikasi potensi komoditi	Sarana	2 sarana	2 sarana (refocusing)			
				(Kegiatan) pemanfaatan dan pengelolaan pasar daerah							
				(Sub Kegiatan) Pemanfaatan dan Pengelolaan Pasar Daerah	Jumlah pasar yang dilakukan pemeliharaan	pasar	10 pasar	10 pasar			
				(Sub Kegiatan) Pasar Murah	Jumlah paket sembako yang dijual	paket	1500 paket	27600 paket			
				(Kegiatan) Pengembangan Revitalisasi Pasar Daerah	Renovasi pasar daerah						
				(Sub Kegiatan) Pembangunan Pasar Ra'as	Jumlah dokumen revitalisasi pasar	dokumen	1 dokumen	1 dokumen (retensi perencanaan)			
				(Kegiatan) Pembangunan/ perbaikan Pasar Daerah	Jumlah pasar yang dibangun/ diperbaiki						
				(sub kegiatan) Pembangunan pasar kagayan	Jumlah pasar yang dibangun/ diperbaiki	unit	1 unit	1 unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(sub kegiatan) Pengembangan Pasar Gili Genting	Jumlah pasar yang dibangun/diperbaiki	unit	1 unit	1 unit			
				(sub kegiatan) Pembangunan / Perbaikan Pasar Ganding	Jumlah pasar yang dibangun/diperbaiki	unit	1 unit	1 unit			
				(sub kegiatan) Perbaikan Pasar Lenteng	Jumlah pasar yang dibangun/diperbaiki	unit	1 unit	1 unit			
				(sub kegiatan) Pembangunan gudang bongkar muat pasar batuan	Jumlah dokumen pembangunan pasar	dokumen	1 dokumen	1 dokumen (retensi pembayaran pengawasan / perencanaan)			
				Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	%	100	100			
				(Kegiatan) Pengawasan norma industri dan perdagangan serta perlindungan konsumen							
				(Sub Kegiatan) Operasionalisasi UPT Kemetrolgian Daerah	Jumlah UTTP yang ditera dan tera ulang	UTTP	3.454 UTTP	3.454 UTTP			
				(Sub Kegiatan) Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.	Jumlah lokasi pengawasan peredaran barang dan jasa	lokasi	18 lokasi	18 lokasi			
				(Sub Kegiatan) Sosialisasi Tertib Ukur	Jumlah frekuensi sosialisasi	kali	6 kali	6 kali			
				(Sub Kegiatan) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kemetrolgian Legal Daerah	Jumlah peralatan kemetrolgian yang diadakan	unit	5 unit	5 unit			
				Program Promosi dan Kerja Sama Perdagangan	Persentase peningkatan kerjasama perdagangan	%	100	100			
				(kegiatan) Promosi dan pemasaran produk unggulan industri kecil Menengah	Jenis kerajinan IKM (ukiran)						
				(sub kegiatan) Pameran dan kontak dagang produk unggulan	Jumlah pameran yang diikuti	pameran	2 pameran	2 pameran			
				(sub kegiatan) Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan/ Kerajinan Industri Kecil Menengah	Jumlah paket souvenir	paket	500 paket	500 paket			
				(sub kegiatan) Fasilitasi promosi kontak dagang	Jumlah pameran yang diikuti	pameran	2 pameran	2 pameran			
				Program Pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal	Persentase pengumpulan informasi Barang Kena Cukai ilegal	%	100	100			
				(Kegiatan) Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau Yang Dilekati Pita Cukai Palsu Atau Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjual Eceran	Jumlah merek barang yang dilekati pita cukai palsu dan tidak dilekati pita cukai	merek	58 merek	58 merek			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja		Program Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi Pemberangkatan Calon transmigran dan Kerja Sama Antar Daerah	Persentase Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi Jumlah Calon Transmigran yang akan diberangkatkan dengan Kabupaten Tujuan Transmigran yang disepakati	Persentase KK dan KSAD	1 7	0,3 2	Terbatasnya Kuota Pengiriman Calon Transmigrasi	Peningkatan Koordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur	
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	Persentase surat	100% 1000	100% 1200			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan komunikasi, air, listrik selama 1 tahun	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Macam	22	22			
				Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah Surat maupun laporan yang diadministrasikan	Macam	23	23			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik untuk penerangan bangunan Kantor	Macam	13	13			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Macam	19	19			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makan dan Minuman untuk Rapat	Kotak	900	900			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	65	65			
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan Untuk Pelaksanaan Hari - Hari Besar	kegiatan	0	0	Revocusing		
				Operasional UPTD	Jumlah Sarana dan Prasarana Operasioanal yang ada di UPTD	Macam	5	5			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Pegawai Harian Lepas	Orang	7	7			
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang akan di adakan	Unit	13	13			
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah area gedung kantor/rumah dinas yang dipelihara	Unit	2	2			
				Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	16	16			
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang tercantum dalam inventarisai aset dalam kondisi baik	Unit	72	72			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	Persentase	-	-			
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat / pelatihan / bimtek	Orang	0	0	Revocusing		
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	1	1			
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan yang disusun	Laporan	3	3			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	7	7			

3.1.4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Tabel 3. 4
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Administrasi Pemerintahan	Sekretariat Daerah	1.Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020; 2.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Optimalisasi Penyelenggaraan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	%	100	97			
				Pelaksanaan Fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Persentase Laporan OPD tepat waktu	%	100	100			
				Fasilitasi Hasil Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Kerjasama Daerah yang terfasilitasi	Kerjasama	15	22			
					Jumlah Berkas Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Berkas	3	3			
					Jumlah Berkas Administrasi Anggota DPRD yang Terfasilitasi	Berkas	3	0	Sifat kegiatan adalah penyediaan sesuai kebutuhan (misal: PAW)	-	
					Pembinaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Ketua RT dan RW yang menerima Bantuan	orang	79	79		
				Validasi dan Penamaan Batas-Batas Wilayah Pemerintahan	Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dibina	orang	31	31			
					Persentase Optimalisasi Pelayanan Paten	%	100	100			
					Jumlah Patok Batas Desa	Patok	80	80			
					Jumlah Kecamatan yang akan dibakukan nama unsur-unsur rupabuminya	Kecamatan	2	2			
					Jumlah papan nama jalan yang dipasang	Papan nama jalan	0	0			
					Terbayarnya Honorarium Penjaga Tugu Batas	%	100	100			
				Fasilitasi Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah-Masalah Kewilayahan	Jumlah Permasalahan tanah yang Terfasilitasi	Berkas	4	5			
				Fasilitasi Kebijakan, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100			
				Penyusunan Program dan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Pedoman	5	5			
				Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	2	2			
				Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran OPD	Laporan	1	1			
				Penataan Kelembagaan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Prosedur Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Penyempurnaan Kebijakan Organisasi Perangkat	%	100	100			
				Kajian dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah OPD yang sesuai dengan aturan yang berlaku	Perda	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah kebutuhan pegawai, formasi jabatan, kompetensi jabatan, kelas nilai jabatan	OPD	31	31			
				Fasilitasi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Penerapan SAKIP OPD	%	100	100			
				Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase Penyusunan SAKIP tepat waktu	%	86,11	86,11			
				Pengembangan Budaya Kinerja OPD	Jumlah Kelompok Budaya Kinerja yang dibina dan dikembangkan	OPD	31	31			
				Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase Tertib administrasi kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah	%	0	0			
				Penataan Produk hukum yang berkualitas	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun	%	100	100			
				Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah yang disusun	%	100	100			
				Optimalisasi Informasi Hukum dan pengawasan kasus hukum.	Persentase Penyediaan Informasi Produk Hukum dan penyelesaian kasus hukum	%	100	100			
				Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIIH)	Jumlah Refrensi Hukum	Refrensi	4	4			
				Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan/Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Persentase Pengawasan/Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	%	100	100			
				Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar	Jumlah Optimalisasi Pokja	Pokja	4	4			
				Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Prosentase Kasus yang ditangani	%	100	100			
				Peningkatan Koordinasi dalam rangka Penegakan Hukum Terpadu	Jumlah Koordinasi Penegakan Hukum	kali	4	4			
				Fasilitasi Pembinaan keagamaan, pendidikan dan kepemudaan, kesehatan dan kemasyarakatan	Persentase pelaksanaan kegiatan keagamaan, pendidikan dan kepemudaan, kesehatan dan kemasyarakatan yang terfasilitasi	%	100	100			
				Fasilitasi dan data administrasi pendidikan dan kepemudaan	Jumlah Peserta yang di Diklat Keagamaan	Orang	0	0			
					Jumlah pemutahiran data lembaga/ penerima bantuan	orang atau lembaga	1000	1000			
				Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan	Jumlah Kegiatan keagamaan	Kegiatan	4	4			
				Pembinaan keagamaan dan masyarakat	Jumlah pembinaan	kali	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan Pelayanan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	100			
				Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah	Persentase Paket e-tendering dan e-purchasing yang terselesaikan	%	90	90			
				Penyusunan Kebijakan Administrasi dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kebijakan Administrasi Pengadaan Barang dan jasa	Pedoman	1	1			
					Jumlah penanganan permasalahan pengadaan barang dan jasa	Laporan	1	1			
				Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket e-tendering dan e-purchasing yang diproses melalui SPSE	%	90	90			
					%Penayangan Rencana Umum Pengadaan oleh OPD	%	100	100			
				Pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah	Persentase Fasilitasi Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Perekonomian Daerah	%	100	100			
				Penyusunan Kebijakan Sarana Prasarana perekonomian Daerah	Jumlah Dokumen Kebijakan Sarana Prasarana Perekonomian Daerah	Dokumen	1	1			
				Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan usaha mikro	Jumlah pembinaan UMKM	kali	10	33			
				Pembinaan Usaha, Promosi dan BUMD	Jumlah BUMD yang bina	BUMD	5	5			
				Koordinasi Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Prosentase Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	%	75	75			
				Koordinasi Pengelolaan Dana Pajak Rokok	Prosentase Penggunaan Dana Pajak Rokok	%	75	75			
				Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Jumlah Laporan TPID	Laporan	10	16			
				Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Prosentase Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	%	100	100			
				Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan di Bidang Cukai Kepada Masyarakat dan/atau Pemangku Kepentingan	Kali	9	15			
				Fasilitasi Pembinaan Pengelolaan Bidang Energi dan Sumber Daya Alam	Persentase Pembinaan Pengelolaan bidang energi dan sumber daya alam	%	100	100			
				Pembinaan usaha pertambangan Umum	Jumlah pembinaan usaha pertambangan umum	orang	100	100			
				Koordinasi Pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR)	Jumlah Laporan hasil koordinasi pengelolaan CSR	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan evaluasi Penyaluran BBM, Gas, dan energi baru terbarukan	Jumlah Kuota BBM, Gas dan Energi baru terbarukan	Jenis Penyalur BBM dan Gas	4	4			
				Pembinaan pengelolaan data sumber daya air tanah	Jumlah Koordinasi pemanfaatan air dalam tanah	kali	2	2			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	100	100			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	9500	9724			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar	bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah lokasi terpenuhinya kebutuhan bahan kebersihan	Lokasi	4	4			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah waktu bahan perkantoran yang disediakan (barang cetakan, penggandaan dan alat tulis kantor)	bulan	12	12			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu komponen listrik yang diadakan	bulan	12	12			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah lokasi terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan perundang-undangan	Lokasi	4	4			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah lokasi terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Lokasi	4	4			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi	bulan	12	12			
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar nasional/keagamaan yang dilaksanakan, open house bupati/wakil bupati, ramah tamah di Sekretariat Daerah dan operasional drumband (Peringatan Hari-Hari Besar nasional yang diselenggarakan.; 1 hari jadi provinsi Jawa Timur; 2 kali open house; 1 kali ramah tamah Sekretariat Daerah dan 12 bulan operasional drumband)	kali	12	12			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan tenaga kebersihan, sopir, pengamanan, resepsionis dan penabuh gamelan keraton	bulan	12	12			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Buah	92	92			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan yang dibeli'	unit	4	4			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah waktu gedung kantor yang dipelihara (gedung kantor bupati, rumdis KDh/WKDH, Sekda, Pendopo, keraton I)	bulan	12	12			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah waktu kendaraan dinas/operasional dan mobil jabatan yang dipelihara	bulan	12	12			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah waktu peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	bulan	12	12			
				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	%	100	100			
				Penyusunan Laporan Keuangan dan aset	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Laporan	6	6			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	5	5			
				Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Prosentase pelaksanaan kegiatan kedinasan Bupati/Wakil Bupati	%	100	100			
				Dialog/Audiensi dengan Tomas, Pimpinan / Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan/ FORPIMDA	Jumlah terlaksananya dialog dengan a) tomas; b) Organisasi Sosial; c) Organisasi kemasyaratan' d) Forpimda	kali	10	19			
				Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah	Jumlah waktu Kunjungan Kerja./ Inspeksi KDH/WKDH (9 kunker insidental KDH/WKDH dan 1 kali safari Kepulauan)	kali	10	10			
				Penyediaan Jaminan Kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah waktu tersedianya jaminan kesehatan Bupati dan Wakil Bupati	bulan	12	12			
				Fasilitasi dan Panataan Prosedur Sistem Kebijakan Pelayanan Publik	% OPD yang telah menerapkan kualitas pelayanan dan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	%	100	100			
				Publikasi dan Promosi Pelayanan Publik	Jumlah OPD yang mempunyai kualitas pelayanan yang baik (mengikuti kompetisi pelayanan publik)	OPD	15	15			
				Survey Kepuasan Masyarakat, Identifikasi SOP bagi OPD dan Ketatalaksanaan	Jumlah OPD yang menerapkan sistem kebijakan pelayanan publik sesuai dengan prosedur	OPD	58	58			
				Peningkatan Layanan Dokumentasi, Pemberitaan Pembangunan dan kenrotokolan	Persentase Dokumentasi dan Pemberitaan Pembangunan Daerah	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelayanan Iklan dan Advetorial Pembangunan Daerah	Jumlah Layanan Iklan dan Advetorial Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	kali	500	500			
				Penyediaan Dokumen Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan	Jumlah Dokumentasi Pemerintahan dan Pembangunan	Dokumen	1	1			
				Pelayanan Keprotokolan Kegiatan Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pimpinan	kali	650	650			
		Sekretariat DPRD	1.Peraturan Bupati Sumenep Nomor: 68 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020; 2.Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Fasilitasi Kegiatan Rapat dan Penyusunan Risalah Rapat DPRD	Nilai SKM Layanan Fasilitasi Kegiatan Rapat dan Penyusunan Risalah Rapat DPRD	Nilai	78	78,17			
				Penyiapan Kegiatan Rapat Rapat DPRD	Jumlah rapat-rapat DPRD yang disiapkan	kali	84	85			
				Penyusunan Risalah Hasil Rapat DPRD	Jumlah risalah rapat DPRD yang disusun	buah	84	85			
				Penyiapan Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan / Peninjauan Lapangan DPRD Dalam Daerah yang disediakan	kali	60	20	Tidak mencapai target karena banyak agenda kegiatan DPRD yang lebih urgent		
				Penyiapan Pembahasan Agenda Kegiatan DPRD	Jumlah agenda kegiatan DPRD yang disusun	buah	12	15			
				Penyiapan Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD yang disiapkan	kali	57	40			
				Penyiapan Kegiatan Pembahasan Raperda	Jumlah perdin DPRD dalam rangka pembahasan raperda	kali	9	16			
				Program Fasilitasi Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD	Nilai SKM Layanan Fasilitasi Penyusunan dan Penyajian Data Produk Hukum DPRD	Nilai	78	78,17			
				Penyiapan Penyusunan Raperda Usul Prakarsa DPRD	Jumlah naskah akademik dan draft raperda usul prakarsa DPRD	paket	4	4			
				Penyiapan Propemperda, Kajian dan Finalisasi Raperda	Jumlah jasa konsultansi kajian akademik raperda usul legislatif dan eksekutif	paket	2	2			
				Penyiapan Evaluasi Kedisiplinan Anggota DPRD	Jumlah konsultasi dan koordinasi penanganan kasus dan evaluasi kinerja AKD	kali	16	16			
				Pemrosesan Kebijakan Hukum dan Penanganan Masalah Hukum DPRD	Jumlah jasa konsultansi dan penanganan hukum	kali	1	0	Karena tidak ada kasus hukum yang ditangani		
				Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jumlah buku perundang-undangan dan peraturan DPRD yang dicetak	buku	850	1600			
				Penyiapan Kegiatan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD	Jumlah kegiatan orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD yang disiapkan	kali	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD	Nilai SKM Layanan Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD	Nilai	79	79,22			
				Penyebaran Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah publikasi kegiatan DPRD	kali	76	78			
				Penyiapan Kegiatan Reses	Jumlah belanja penyiapan kegiatan reses DPRD	item	26	21			
				Penyiapan Forum Komunikasi Peningkatan Pembangunan	Jumlah kegiatan forum Komunikasi Peningkatan Pembangunan yang disiapkan	keg	36	48			
				Penyerapan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat kepada DPRD	Jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui forum dialog	kali	18	38			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Nilai SKM Layanan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Nilai	78	79,37			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat-menyurat yang diadministrasikan	buah	3.100	6.588			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kerja outsourcing kebersihan kantor	orang	9	9			
				Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan	item	62	62			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan pembangunan kantor	item	25	25			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	set	41	41			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah peruntukan makanan dan minuman yang disediakan	layanan	5	5			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi aparatur sekretariat DPRD	kali	16	16			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah petugas pengamanan kantor DPRD	orang	22	22			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas yang disediakan	buah	11	11			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas yang disediakan	item	7	7			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional yang disediakan	unit	42	42			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas yang disediakan	kali	169	152			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah belanja pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD	set	150	150			
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai SKM Layanan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Nilai	79				
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal yang disediakan	kali	6	6			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SKM Layanan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai	79				
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	dokumen	6	6			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disiapkan	dokumen	6	6			
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		PROGRAM IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN, KETAHANAN BANGSA & HAM							
				Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	Organisasi Masyarakat	3	3			
				Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	Organisasi Masyarakat	3	3			
				Peningkatan Kesatuan dan Persatuan Bangsa	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	Organisasi Masyarakat	3	3			
				PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT							
				Kegiatan Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik	Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Partai Politik	10	10			
				Kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat dan LSM	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	Organisasi Masyarakat	3	3			
				Kegiatan Dukungan kelancaran pemilu	Jumlah Pemilu Umum	Putaran	1	1			
				Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman etika dan kultur politik dalam rangka penerapan budaya politik yang demokratis	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	Organisasi Masyarakat	3	3			
				PROGRAM PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)							
				Kegiatan Sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik dimasyarakat	Jumlah Ormas/Unras mendapat Sosialisasi	Organisasi Masyarakat	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Forum komunikasi eksekutif legeslatif dalam format otonomi daerah	Jumlah pertemuan Fopimda	Kali	12	12			
		Kecamatan Pragaan	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan	Kali	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan Pengelola BUMDes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat (Penyediaan jasa surat menyurat)	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1000	1347			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik)	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Rekening	6	6			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor (Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor)	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	8	8			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor (Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor)	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	5	5			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman (Penyediaan makanan dan minuman)	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	24	24			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	324	324			
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas (Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas)	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	9	9			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas)	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	8	8			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas)	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	50	50			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang dibeli	Stell	22	22			
		Kecamatan Giligting	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	2	2			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kec. Giligting)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Bimbingan Tekhnis Pemerintahan Desa Bagi Pengurus BUMDes)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD)	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi	Desa	8	8			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Bimbingan Tekhnis bagi Anggota Linmas)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Bimbingan Tekhnis Administrasi Keuangan Desa)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Musrenbangdes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1000	1271			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	10	10			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	9	9			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	24	24			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	126	112			
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran (Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai)	Jumlah personel layanan perkantoran yang ditugaskan	Orang	4	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	20	22			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	2	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	15	15			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Dinas Harian)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	16	16			
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Batik Tradisional)	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang dibeli	Stell	16	16			
		Kecamatan Raas	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pembinaan Administrasi Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Se Kecamatan Raas Masa Bakti 2020-2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketertarikan dan ketertiban umum (Desk dan Monitoring Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Sosialisasi Penundaan Usia Perkawinan)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Kegiatan Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Administrasi Penunjang Bantuan Dana ADD dan TPAPD)	Jumlah kegiatan administrasi yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring dan Pembinaan Musrenbangdes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD)	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi	Desa	9	9			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Sosialisasi Pembinaan Wira Usaha Muda)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Sosialisasi Pembentukan BUMDes)	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan Lembaga / Organisasi PKK Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEAN antar Kegiatan	
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEAN antar Kegiatan	
				Peningkatan pelayanan publik							
				Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	7	7			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	500	1287			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Rekening	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	14	14			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	12	12			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	24	24			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	7			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	82	73			
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah personel layanan perkantoran yang ditugaskan	Personel	2	2			
				Pembangunan Gedung Kantor (Pembangunan Plank Nama Kantor)	Jumlah bangunan kantor yang dipelihara	Bangunan	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas (Belanja Modal Pengadaan Komputer Pengadaan Meubelair)	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	37	37			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor)	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas)	Jumlah bangunan rumah dinas yang dipelihara	Bangunan	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	8	8			
		Kecamatan Gayam	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan kapasitas aparat pemerintah, ketentraman dan ketertiban umum							
				Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026	Jumlah Kegiatan Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026	Keg	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Monitoring Pelaksanaan PILKADA	Keg	30	30			
				Forum Pimpinan Kecamatan	Jumlah Pertemuan Forum Pimpinan Kecamatan	Keg	3	3			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan	Keg	1	1			
				Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (e-planning)	Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	Keg	10	10			
				Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD)	Jumlah kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	Keg	40	40			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Keg	3	3			
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah Pertemuan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Keg	2	2			
				Peningkatan pelayanan publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Monitoring Pelayanan PATEN	Keg	4	4			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase Pelayanan administrasi	%	99	99,31			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan Kebersihan Kantor	Jenis	12	12			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Buah	2000	2100			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	Jenis	8	8			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Paket	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	Kotak	480	480			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas	Keg	104	104			
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa&peningkatan pelayanan publik	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	
				Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Layanan Perkantoran	pegawai	2	2			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	unit	8	8			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	bangunan	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	4	4			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah Pakaian Batik, Olah Raga dan PDH yang diadakan	stel	72	72			
		Kecamatan Masalembu	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	Jumlah kegiatan desk yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan	Kali	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umara)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (e-planning))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan pelayanan publik							
				Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	2	2			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2000	2000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	9	9			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	5	5			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	39	36			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional dan Olahraga	Buah	19	19			
		Kecamatan Nonggunong	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah Pakaian Bati dan PDH yang diadakan	Potong	20	20			
				Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum							
				Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Jumlah kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	Kegiatan	32	32			
				Pembinaan Management Keuangan dan Administrasi Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Bimbingan Teknis Sistem Keamanan Lingkungan bagi Anggota LinmasDesa dan aparat desa	Jumlah Kegiatan Bimtek yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelatihan Tekhnik Penyusunan Produk Hukum Desa Bagi Aparatur Desa dan BPD	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Monitoring dan Pembinaan Musrenbangdes	Jumlah Kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	Kegiatan	8	8			
				Sosialisasi dan Diklat Ketrampilan Manajemen BUMDes	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pembinaan Adminitrasi Desa	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelatihan dan Penyusunan APBDes bagi Aparat desa dan BPD	Jumlah Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Sosialisasi Pemantapan Naskah Dinas bagi aparat desa	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020-2026	Jumlah Kegiatan Pelantikan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Desk Pilkada 2020	Jumlah Monitoring Pelaksanaan PILKADA	Kegiatan	32	32			
				Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Rangka Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa							
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah Pembinaan PKK yang diikuti dan dilaksanakan	Kegiatan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Forum Komunikasi Ulama dan umaro yang dilaksanakan	Kegiatan	4	4			
				Pembinaan Wira Usaha Muda	Jumlah Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Monitoring Pelayanan PATEN	Kegiatan	4	4			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase Pelayanan administrasi	%	90	99,5			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	Buah	1000	1125			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Jenis	2	2			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan kantor	Jenis	12	12			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	Jenis	7	7			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exp	12	12			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	Kotak	720	720			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kegiatan perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kegiatan	120	120			
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan		Kegiatan	0	0			
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Jumlah Kegiatan HUT Kemerdekaan	Kegiatan	1	1			
				Pelaksanaan Peringatan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Peingatan Hari Besar Islam yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Pengadaan dan peralatan kantor/rumah dinas	Macam	5	5			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang di pelihara	Bangunan	2	2			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Komputer yang dipelihara	unit	5	5			
		Kecamatan Bluto	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Bimbingan Teknis Sistem Keamanan Lingkungan Bagi Anggota Linmas Desa dan Aparat Desa	Jumlah Kegiatan pembinaan yang dilakukan	Keg	1	1			
				Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Kegiatan Penyuluhan yang diberikan terkait Narkoba, PMS dan HIV / Aids	Keg	1	1			
				Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Keg	1	1			
				Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Keg	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Keg	1	1			
				Peningkatan Kinerja ASN (Studi Banding)	Jumlah Peningkatan Kinerja ASN	Keg	1	1			
				Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Keg	1	1			
				Penyuluhan Penanganan Penyebaran Covid 19	Jumlah Penyuluhan Penanganan Penyebaran Covid	Keg	1	1			
				Peningkatan Kapasitas ASN Kecamatan Diklat dan Whokshop	Jumlah Peningkatan Kapasitas ASN melalui workshop	Keg	1	0	Penghapusan sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas	
				pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah Pertemuan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Keg	1	1			
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam	Keg	1	1			
				Sosialisasi Pembinaan Wirausaha Muda	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Wirausaha Muda	Keg	1	1			
				Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah Pembinaan BUMDes	Keg	1	1			
				Operasional PKK Kecamatan	Jumlah Operasional Kegiatan PKK Kecamatan	Keg	1	1			
				Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes	Jumlah Monitoring dan Evaluasi pembinaan Musrenbangdes	Keg	1	1			
				Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Bhakti 2020-2026	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan BPD tahun 2020	Keg	1	1			
				Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020	Jumlah Pelaksanaan Desk Pilbub 2020	Keg	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pengembangan Pariwisata Gunung Angin	Jumlah Pengembangan Pariwisata Gunung Angin	Keg	1	0	terkait masalah pembebasan lahan sekitar Lokasi	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas dan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
				peningkatan pelayanan publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Keg	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Lembar	1000	1200			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Rek	3	2	Rek. Jasa Komunikasi tidak terbayar sehubungan dengan terputusnya Jaringan Telepon	Dikembalikan ke Kasda	
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan Kebersihan Kantor	Bulan	12	12			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	unit	143	143			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exemplar	24	21	Ada Rekening dari Surat Kabar yang tak terbayar	Dikembalikan ke Kasda	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	kali	16	16			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya Perjalanan Dinas	Kali	96	94	Sehubungan adengan Pandemi Covid 19 ada beberapa perdin keluar kota yang tak terserap	Dikembalikan ke Kasda	
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW							
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan		Keg	1	1	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas	
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan		Keg	1	1	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas	unit	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	ruang	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan berkala Kendaraan dinas/operasional	unit	7	6	BBM ada yang belum terserap	Dikembalikan ke Kasda	
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Unit	12	12			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	stel	30	30			
		Kecamatan Arjasa	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	Jumlah kegiatan desk yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan	Kali	1		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Forum Komunikasi Ulama dan Umara)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (e-planning))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan pelayanan publik							
				Peningkatan pelayanan publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2.000	2000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	9	9			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	5	5			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	78	78			
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1		Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESEKAN antar Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Petugas Kebersihan Kantor yang ditugaskan	Personel	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	247	247			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	4	4			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	8	8			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas (Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas)	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	40	40			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	34	34			
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)	Jumlah Pakaian Olah Raga yang dibeli	Stell	34	34			
		Kecamatan Kota Sumenep	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		persen	95	100			
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	kegiatan	1	1			
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah pakaian dinas untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disediakan	stel	21	21			
				Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		persen	95	100.00			
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Monitoring Desk Pilbup	Jumlah Monitoring Desk Pilbup yang dilaksanakan	kali	1	1			
				Sosialisasi dan Pembinaan BPD	Jumlah Sosialisasi dan Pembinaan BPD yang dilaksanakan	kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa (lomba-lomba)	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa yang di laksanakan	kegiatan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026	Jumlah kegiatan Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026 yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	kegiatan	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umara	Jumlah Forum Komunikasi Ulama dan Umara yang dilakasakan	kegiatan	1	1	Karena covid sehingga kegiatan tidak dilaksanakan	walaupun kegiatan tidak dilaksakan namun anggarannya di alihkan ke kegian lain atau di PAK	
				Peningkatan pelayanan publik PATEN							
				Optimalisasi Pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jumlah Perijinan tapet waktu yang dilayani	jumlah ijin	2	2			
				Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan BANGSELOK		Persen	80	74.93			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis tagihan yang dibayarkan	jenis	3	3			
				Penyediaan barang dan jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor kantor	jenis	10	10			
				Penyediaan kebutuhan bahan Perkantoran	Jumlah jenis perkantoran yang disediakan selama 1 TA	jenis	34	34			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	jenis	7	7			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan per undang-undangan	jenis	2	2			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	jenis	5	5			
				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yg dilaksanakan	kali	7	7			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran yang disediakan	jenis	4	4			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	unit	4	4			
				Rehabilitasi Gedung Kantor / rumah dina	Jumlah gedung kantor yang direhab	paket	1	1			
				Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	paket	1	1			
				Pemeliharaan rutin / berkalakendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	unit	3	3			
				Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	jenis	4	4			
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis Pengelolaan Kepegawaian tepat waktu	stel	9	9			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Bangselok		persen	80	75,69			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana						
				Pemeliharaan Konstruksi Jaringan Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Konstruksi Jaringan Air yang di pelihara	paket	5	4	karena ada salah satu pokmas yg mengundurkan diri	Anggaran yang tidak terserap karena salah satu pokmas mengundurkan diri Anggaran masih ada di KASDA	
				Belanja Pemeliharaan Taman	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman yang di pelihara	paket	1	1			
				Pengadaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Lingkungan Pemukiman yang dilaksanakan	paket	22	22			
				Pemeliharaan Konstruksi Jalan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Konstruksi Jalan Lingkungan yang dipelihara	paket	3	3			
				Pemeliharaan Saran Prasarana Lingkungan Pemukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Saran Prasarana Lingkungan Pemukiman yang di pelihara	paket	4	4			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangselok		persen	80	84,77			
				Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan yang dilaksanakan	paket	6	5	karena adanya pandemi covid-19 jadi 1 paket tidak terlaksana karena efisiensi maka paket sudah di satukan dengan sosialisasi sebelumnya	Anggaran yang tidak terserap dan Anggaran masih ada di KASDA	
				Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana	Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana yang dilaksanakan	paket	1	0	Karena efisiensi maka paket sudah di satukan dengan sosialisasi sebelumnya	Anggaran yang tidak terserap dan Anggaran masih ada di KASDA	
				Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat yang dilaksanakan	paket	1	1			
				Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah Pemberian Makanan Tambahan	jenis	4	4			
				Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	Jumlah Pengelolaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Lainnya	paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid atau pembentukan kampung tangguh	
				Pelatihan Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelatihan Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran	paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid atau pembentukan kampung tangguh	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pembangunan sarana dan prasarana Wilayah Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana						
				Pemeliharaan konstruksi jaringan air	Jumlah Sarana dan Prasarana konstruksi jaringan air yang dipelihara	paket	2	2			
				Belanja Pemeliharaan Taman	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman yang dipelihara	paket	1	1			
				Pemeliharaan Saran Prasarana Lingkungan Pemukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman yang dipelihara	lokasi	8	8			
				Pemeliharaan Konstruksi Jalan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Konstruksi Jalan Lingkungan yang dipelihara	paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	Anggaran dialihkan ke penangan pandemic covid	
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karangduak		persen	85	96.94			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
				Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	paket	1	1			
				Pelatihan Kader Posyandu	Jumlah Pelatihan Kader Posyandu	kegiatan	1	1			
				Pelatihan Pemberdayaan Hidroponik	Jumlah Pelatihan Pemberdayaan Hidroponik	kegiatan	1	1			
				Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	kegiatan	1	1			
				Pelatihan Sarana Pengolahan Sampah	Jumlah Pelatihan Sarana Pengolahan Sampah yang dilaksanakan	kegiatan	1	0	Kegiatan ini dihapus karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	Anggaran kegiatan ini dialihkan ke panganan covid 19	
				Sosialisasi Kegiatan Pengembangan UMKM	Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pengembangan UMKM	kegiatan	1	0	Kegiatan ini dihapus karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	Anggaran kegiatan ini dialihkan ke panganan covid 19	
				Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (Kkader Lingkungan)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (Kkader Lingkungan)	kegiatan	1	0	Kegiatan ini dihapus karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	Anggaran kegiatan ini dialihkan ke panganan covid 19	
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Ketertiban Kelurahan	Jumlah Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Ketertiban Kelurahan	kegiatan	1	1			
				Pengelolaan Kegiatan Lembaga Masyarakat (LPMK)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (LPMK)	kegiatan	1	0	karena adanya pandemi covid-19 anggaran dihapus dan terjadi PAK	anggaran dialihkan ke kegiatan panganan pendemi covid 19	
				Pembentukan Kampung Tangguh	Jumlah Kampung Tangguh yang di bentuk	kegiatan	2	2			
				Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan KEPANJIN		persen	85	95.50			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jenis	2	2			
				Penyediaan kebutuhan bahan Perkantoran	Jumlah jenis bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	jenis	40	40			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	jenis	5	5			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	1	1			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	jenis	3	3			
				Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	kali	3	3			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran yang disediakan	jenis	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	jenis	4	4			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	unit	3	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	jenis	6	6			
				Pengelolaan Dan Peningkatan Displin Kepegawaian	Jumlah jenis Pengelolaan Kepegawaian tepat waktu	jenis	2	2			
				Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Kepanjin		persen	85	96.58			
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan							
				Pembangunan Penerangan Jalan Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembangunan Penerangan Jalan Umum	paket	4	0	tidak terserap karena menyesuaikan kebutuhan pokmas	Anggaran yang tidak terserap dan Anggaran masih ada di KASDA	
				Pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan Pemukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana lingkungan Pemukiman yang dipelihara	lokasi	8	8			
				Pengadaan Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengadaan Pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan yang disediakan	paket	2	0	karena adanya pandemi covid-19 anggaran dihapus dan terjadi PAK	anggaran dialihkan ke kegiatan pengangan pandemi covid 19	
				Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengadaan Konstruksi Jaringan Air yang disediakan	paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 anggaran dihapus dan terjadi PAK	anggaran dialihkan ke kegiatan pengangan pandemi covid 19	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kapanjin		persen	80	97.28			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kapanjin	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						
				Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	kegiatan	1	1			
				Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	kegiatan	1	1			
				Sosialisasi Kader Posyandu	Jumlah Sosialisasi Kader Posyandu	kegiatan	1	1			
				Pelatihan Pengolahan Sampah	Jumlah Pelatihan Pengolahan Sampah	kegiatan	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid	
				Pemberdayaan Hidroponik	Jumlah Pemberdayaan Hidroponik	kegiatan	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid	
				Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan (Kader Lingkungan)	Jumlah kegiatan lembaga kemasyarakatan (Kader Lingkungan) yang dikelola	kegiatan	1	1			
				Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola	kegiatan	1	1			
				Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Ketertiban Kelurahan	Jumlah Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan, Ketertiban Kelurahan	kegiatan	1	1			
				Pelatihan Keluarga Berencana	Jumlah Pelatihan Keluarga Berencana	kegiatan	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid	
				Sosialisasi Kegiatan Pengembangan UMKM	Jumlah Sosialisasi Kegiatan Pengembangan UMKM	kegiatan	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid	
				Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan(LPMK)	Jumlah Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (LPMK)	kegiatan	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangakan pandemic covid	
				Pembentukan Kampung Tangguh	Jumlah Kampung Tangguh yang di bentuk	kegiatan	1	1			
				Penanganan Dampak Ekonomi	Jumlah Dampak Ekonomi yang ditangani	kegiatan	1	1			
				Program Peningkatan Kesekretariatan Kelurahan PAJAGALAN		Persen	80	98.41			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis tagihan yang dibayarkan	Jenis	2	2			
				Penyediaan bahan dan Jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	16	16			
				Penyediaan kebutuhan bahan Perkantoran	Jumlah jenis perkantoran yang disediakan selama 1 TA	Jenis	46	46			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Jenis	3	3			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Jenis	9	9			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran yang disediakan	Unit	5	5			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran yang disediakan	Jenis	4	4			
				Rehabilitasi Gedung Kantor / rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Paket	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Paket	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	3	3			
				Pemeliharaan rutin/ Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Unit	5	5			
				Pengelolaan Dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	Jumlah jenis Pengelolaan Kepegawaian tepat waktu	Stel	10	10			
				Program Sarana dan Prasarana Kelurahan Pajagalan		Persen	80	88,68			
				Belanja Pemeliharaan Taman/Tugu/Monumen	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman/Tugu/Monumen yang dipelihara	Paket	4	4			
				Pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Pengolahan Sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan Sampah yang dipelihara	Paket	1	0	Karena adanya pandemic covid-19 Jadi kegiatana tidak dilaksanakan	Anggaran yang tidak terserap dan Anggaran masih ada di KASDA	
				Pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan pemukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana	Paket	10	10			
				Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana jalan pemukiman	Jumlah Sarana dan Prasarana jalan pemukiman yang dipelihara	Paket	1	0	Karena adanya pandemic covid-19 Jadi kegiatana tidak dilaksanakan	Anggaran yang tidak terserap dan Anggaran masih ada di KASDA	
				Pemeliharaan dan Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan	Jumlah Sarana dan Prasarana Konstruksi Jalan Lingkungan yang dipelihara	Paket	4	3	1 paket ada Permasalahan kepemilikan tanah	Anggaran yang tidak terserap dan Anggaran masih ada di KASDA	
				Pemeliharaan dan Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	Jumlah Sarana dan Prasarana Konstruksi Jaringan Air yang dipelihara	Paket	7	7			
				Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pajagalan		Persen	90	97,14			
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat	Paket	4	4			
				Pembinaan Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah Kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Paket	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Prosentase Masyarakat yang memperoleh Pengetahuan tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pengetahuan tentang Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Paket	1	1			
				Pelatihan Kader Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kader Kesehatan Masyarakat yang dilatih	Paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangkalan pandemic covid	
				Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah Kegiatan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangkalan pandemic covid	
				Kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan lainnya Yang dikelola	Paket	1	0	karena adanya pandemi covid-19 jadi terjadi PAK	dialihkan ke penangkalan pandemic covid	
				Pembentukan Kampung Tangguh	Jumlah Kampung Tangguh yang di bentuk	Paket	1	1			
				Pemberian Makanan Tambahan	Jumlah Pemberian Makanan Tambahan yang disediakan	Paket	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi		Persen	90	99.72			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis tagihan yang dibayarkan	jenis	2	2			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor kantor	jenis	14	14			
				Penyediaan kebutuhan bahan Perkantoran	Jumlah jenis bahan perkantoran yang di sediakan selama 1 TA.	jenis	30	30			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	jenis	6	6			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	5	5			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	jenis	4	4			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi yg dilaksanakan	kali	15	15			
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan Hari-hari Besar yang dilaksanakan	kegiatan	2	0	Karena covid sehingga kegiatan tidak dilaksanakan	walaupun kegiatan tidak dilaksanakan namun anggarannya di alihkan ke kegian lain atau di PAK	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran yang disediakan	jenis	2	2			
				pengadaan peralatan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	unit	4	4			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	paket	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/Operasional yang dipelihara	unit	4	4			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di pelihara	unit	7	7			
		Kecamatan Ambunten	Peraturan Bupati Sume	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah Pakaian Batik yang diadakan	Stel	28	28	-	-	
				Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah desa yang dilakukan monitoring	Desa	15	15	-	-	
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pembinaan Administrasi Pertanahan	Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Administrasi Pertanahan	Desa	15	15	-	-	
				Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes (e-planning)	Jumlah Desa yang dilakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan	Desa	15	15	-	-	
				Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Jumlah BUMDes yang mengikuti pembinaan	Desa	15	15	-	-	
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Kegiatan Musrenbangcam yang dilaksanakan	Keg	1	1	-	-	
				Pembinaan Tata Kearsipan Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan Tata Kearsipan Pemerintah Desa	Desa	15	15	-	-	
				Forum Komunikasi Ulama dan Umoro	Jumlah Kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umoro yang dilaksanakan	Keg	2	2	-	-	
				Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD)	Jumlah kegiatan Monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	4	4	-	-	
				Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 -2026	Jumlah BPD (Desa) yang dilakukan Pelantikan	Desa	15	15	-	-	
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa yang dilaksanakan	Keg	1	0	Ditiadakannya kegiatan yang melibatkan massa atau kerumunan orang banyak akibat pandemi COVID-19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan pemeliharaan gedung kantor / rumah dinas	
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan	Keg	2	2	-	-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	Prosentase Pelayanan administrasi	%	100	98,23			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1.200	1.212	-	-	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12	Rek. jasa listrik tidak terealisasi sesuai target kinerja karena masih terjadinya pemadaman listrik	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan PATEN	
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan Kebersihan Kantor	Jenis	13	13			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	Jenis	11	11			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Paket	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Jenis	2	2			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan	keg	91	91			
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Ditiadakannya kegiatan yang melibatkan massa atau kerumunan orang banyak akibat pandemi COVID-19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan pemeliharaan gedung kantor / rumah dinas	
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Ditiadakannya kegiatan yang melibatkan massa atau kerumunan orang banyak akibat pandemi COVID-19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan pemeliharaan gedung kantor / rumah dinas	
				Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Keg	1	0	Ditiadakannya kegiatan yang melibatkan massa atau kerumunan orang banyak akibat pandemi COVID-19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan pemeliharaan gedung kantor / rumah dinas	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Terpenuhinya Jasa Layanan Perkantoran	Pegawai	6	6			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yg dipelihara	Bangunan	5	5			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan	3	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas	Jumlah peralatan gedung kantor/ rumah dinas yang dipelihara	Unit	20	20			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Kecamatan Sapeken	Peraturan Bupati Sume	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Pembinaan Administrasi Desa	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Desk Pilbup 2020	Jumlah yang yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa Monev dan Pembinaan Musrenbang (E-Planning)	Jumlah kegiatan Desa Monev dan Pembinaan Musrenbang yang dilaksanakan	Kali	3	3			
				Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Desa	11	11			
				Pelaksanaan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Peretemuan Musrenbang yang pelaksanaan	Kali	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama yang dilaksanakan	Kali	2	2			
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah Pereteemuan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Kali	1	1			
				Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020-2026	Kali	1	1			
				Penanganan Penyebaran Covid 19	Jumlah Pelaksanaan Penanganan Penyebaran Covid 19	Keg	1	1			
				peningkatan pelayanan publik							
				Pelayanan Adminitrasi terpadu Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administasi terpadu Kecamatan	Keg	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	10	10			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah Penyediaan Bahan Perkantoran	Buah	27	26			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan kantor	Jenis	9	9			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Exempler	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang disediakan makanan dan minuman	Rapat	81	79			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	12	12			
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Pameran Pembangunan		Keg	1	0	Refocusing Sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Pagu Anggaran Pergeseran PAK 2020 pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI		Keg	1	0	Refocusing Sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Pagu Anggaran Pergeseran PAK 2020 pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	5	5			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pakaian Olah Raga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga yang dibeli	Stel	1	1			
				Belanja pakain Khusus dan hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan hari tertentu yang dibeli	Stel	1	1			
		Kecamatan Kandangan	Peraturan Bupati Sume	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				(Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				(Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kec. Kandangan)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Sosialisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Desa)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	3	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bulan	12	12			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Pakaian Dinas Harian)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	25	25			
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian (Pengadaan Olah raga)	Jumlah Pengadaan Olah Raga yang dibeli	Stell	25	25			
		Kecamatan Batang-Batang	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kaptitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Pelantikan Anggota BPD	Jumlah Pelantikan Anggota BPD yg dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Sosialisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Desa	Jumlah Sosialisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Desa yg dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pembinaan administrasi Pertanahan	jumlah Pembinaan administrasi Pertanahan yg dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah kegiatan Pelayanan administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yg dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes)	jumlah kegiatan Pembinaan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) yg dilaksanakan	Kegiatan	2	2			
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam yg dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah kegiatan Forum Komunikasi Ulama dan Umaroyg dilaksanakan	Kegiatan	3	3			
				Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa	Jumlah Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desayg dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD)	Jumlah kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Desa (DD dan ADD) yg dilaksanakan	Kegiatan	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan keluar	Surat	2000	2000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan kantor	Peralatan	12	12			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	Komponen	2	2			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Eksemplar	12	12			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	Rapat	12	12			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah perjalanan dinas yg dilaksanakan	Kali	296	296			
				Peringatan Hari-Hari Besar - Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Kegiatan	1	0	Penghapusan sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah	
				Peringatan Hari Proklamsi Kemerdekaan	Peringatan Hari Proklamsi Kemerdekaan	Kegiatan	1	0	Penghapusan sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah	
				Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep	Peringatan Hari Jadi Kabupaten Sumenep	Kegiatan	1	0	Penghapusan sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas		Paket	11	11			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Pengadaan dan peralatan kantor/rumah dinas	Bangunan	2	2			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah Pemeliharaan berkala Kendaraan dinas/operasional	Kendaraan	8	8			
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor / Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin berkala gedung kantor/rumah dinas	Paket	1	1			
		Kecamatan Manding	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				(Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	2	2			
				(Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kec. MANDING)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Bimbingan Tekhnis Pemerintahan Desa Bagi Pengurus BUMDes)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD)	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi	Desa	8	8			
				(Bimbingan Tekhnis bagi Anggota Linmas)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Bimbingan Tekhnis Administrasi Keuangan Desa)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				(Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				a (Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				a (Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Musrenbangdes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1.000	1.271		-	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12		-	
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	10	10		-	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	9	9		-	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	24	24		-	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12		-	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	126	112		-	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGESERAN antar Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran (Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai)	Jumlah personel layanan perkantoran yang ditugaskan	Orang	4	3			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	20	22			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	2	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	15	15			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				(Pengadaan Pakaian Dinas Harian)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	16	16			
				(Pengadaan Pakaian Batik Tradisional)	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang dibeli	Stell	16	16			
		Kecamatan Batuputih	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum						
				(Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kec. BATUPUTIH)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Bimbingan Tekhnis Pemerintahan Desa Bagi Pengurus BUMDes)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD)	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi	Desa	14	14			
				(Bimbingan Tekhnis bagi Anggota Linmas)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum (Bimbingan Tekhnis Administrasi Keuangan Desa)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Desk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Forum Pimpinan Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	3	3			
				Sosialisasi Penanggulangan Penyebaran Covid 19	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa (Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Musrenbang)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Monitoring dan Sosialisasi Pilkades	Jumlah kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan	Kali	6	6			
				Pembinaan Pemuda dan Karang Taruna	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Jumlah kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1000	1000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	12	12			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	12	12			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	79	70			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran (Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai)	Jumlah personel layanan perkantoran yang ditugaskan	Orang	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	12	12			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	7	7			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	12	12			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				(Pengadaan Pakaian Dinas Harian)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	22	22			
				(Pengadaan Pakaian Batik Tradisional)	Jumlah Pengadaan Pakaian Batik Tradisional yang dibeli	Stell	22	22			
				(Pengadaan Pakaian Hari-Hari Tertentu / Pakaian Olah Raga)	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga yang dibeli	Stell	22	22			
		Kecamatan Pasongsongan		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				- Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Pelatihan Penyusunan APBDes bagi Aparatur Desa dan BPD	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Sosialisasi Penyusunan Monografi Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Sosialisasi dan Pembinaan Tugas-tugas LPMD	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Sosialisasi Penanggulangan Dampak COVID-19	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				- Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUMDes	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				- Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				- Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat - Menyurat	surat	5.000	5.000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan Kebersihan Kantor	buah	12	12			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Listrik	bulan	12	12			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	buah	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Waktu Penyediaan makanan dan minuman	tahun	1	1			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	kali	105	103	Anggaran bersifat penyediaan dalam 1 tahun. Dan terdapat sisa anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah yang tidak terserap karena pandemi Covid-19..	Pengembalian sisa anggaran ke Kas Daerah	
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				- Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	unit	80	80			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung	3	3			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	6	6			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	unit	8	8			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah pengadaan pakaian dinas yang dibeli	set	23	23			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang di laporkan	laporan	4	4			
		Kecamatan Saronggi		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Bimbingan Teknis Sistem Keamanan Lingkungan Bagi Anggota Linmas Desa dan aparat desa	Jumlah Kegiatan pembinaan yang dilakukan	Keg	1	1			
				Penyuluhan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah Kegiatan Penyuluhan yang diberikan terkait Narkoba, dan HIV AIDS	Keg	1	1			
				Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Keg	1	1			
				Sosialisasi Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Keg	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Keg	1	1			
				Peningkatan Kinerja ASN (Studi Banding)	Jumlah Peningkatan Kinerja ASN	Keg	1	1			
				Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Keg	1	1			
				Penyuluhan Penanganan Penyebaran Covid 19	Jumlah Penyuluhan Penanganan Penyebaran Covid	Keg	1	1			
				Peningkatan Kapasitas ASN Kecamatan	Jumlah Peningkatan Kapasitas ASN Melalui Workshop	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/Rumah Dinas	
				Desk Pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2020	Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa	Keg	1	1			
				Kelembagaan Desa	Pertemuan PKK dan Kelembagaan Desa	Keg	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelaksanaan musrenbangcam	Jumlah pelaksanaan Musrenbangcam	Keg	1	1			
				Sosialisasi Pembinaan Wirausaha Muda	Jumlah Sosialisasi Pembinaan Wirausaha Muda	Keg	1	1			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes	Jumlah Monitoring dan evaluasi Pembinaan Musrenbangdes	Keg	1	1			
				Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masa Bhakti 2020-2026	Jumlah Pelantikan BPD Tahun 2020	Keg	1	1			
				Desk Pemilihan Bupati dan wakil bupati tahun 2020	Jumlah Pelaksanaan Desk Pilbup 2020	Keg	1	1			
				Pelaksanaan PATEN Kecamatan	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Keg	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Surat	1500	1500			
				Penyediaan jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan listrik.	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor	item	25	25			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan kantor	item	15	15			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan]	exemplar	24	24			
				Penyediaan makanan dan minuman kantor	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat	Bulan	12	12			
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya perjalanan dinas	Kali	184	184			
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19	Dialihkan dengan PAK 2020 pada kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor/ Rumah Dinas	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ Rumah Dinas	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor / Rumah Dinas	unit	30	30			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung kantor/ Rumah Dinas	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor/ rumah dinas	ruang	2	2			
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional kantor	Jumlah Pemeliharaan Berkala Kendaraan dinas/operasional kantor	unit	6	6			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Unit	6	6			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian Dinas	stel	31	31			
		Kecamatan Gapura		Program Pembinaan dan Peningkatan kapasitas aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Ketentraman dan ketertiban umum							
				Fasilitasi dan Monitoring pelaksanaan bantuan ADD & DD	Jumlah Kegiatan monitoring yang dilakukan	Kegiatan	1	1			
				DESK Pilkada	Jumlah Kegiatan pembinaan yang dilakukan	Kegiatan	1	1			
				Fasilitasi dan Monitoring pelaksanaan bantuan ADD & DD	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan Masyarakat Desa							
				Sosialisasi Pencegahan dan monitoring COVID-19	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama Umara	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Pembinaan lembaga/organisasi PKK Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	1			
				Musrenbangcam	Jumlah pelaksanaan Musrenbangcam	Keg	1	1			
				Peningkatan pelayanan publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Waktu Pelayanan Publik Kecamatan	bulan	12	12			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat - Menyurat	Lembar	1.225	1225			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi dan Listrik	bulan	12	12			
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor	item	5	5			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah item komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan kantor	Unit	3	3					
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan]	Exemplar	24	24					
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman rapat	bulan	12	12					
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah tersedianya perjalanan dinas	kali	48	48					
				Peringatan Hari-Hari Besar									
				Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19				
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19				
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah Kegiatan yang diadakan	Keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi covid 19				
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung Kantor /Rumah dinas	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor / Rumah Dinas	Unit	6	6					
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor / rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin berkala gedung kantor/ rumah dinas	unit	5	5					
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Berkala Kendaraan dinas/operasional	Unit	1	1					
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor / rumah dinas	Jumlah pemeliharaan berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Unit	6	6					
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
				Pengelolaan dan Peningkatan Disiplin Kepegawaian	Jumlah pengadaan pakaian Dinas	stel	62	62					
				Kecamatan Kalianget									
				Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa									
				peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum									
				Sosialisasi Revolusi Mental Aparatur Kecamatan	Jumlah Kegiatan pembinaan yang dilakukan	Kali	36	36					
				Forum Komunikasi Ulama Dan Umaro	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	kali	12	12					
				Sosialisasi Dan Monitoring / Pemantuan Pemilihan Pilkada	Jumlah Pelaksanaan Pilbub 2020	Keg	4	4					
				Pemberdayaan Dan pembinaan Masyarakat Desa Pembinaan PKK Dan Kelembagaan Desa	Jumlah Pertemuan Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Keg	12	12					

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pelantikan BPD Masa Bhakti 2021 - 2026	Jumlah Pelaksanaan Pelantikan BPD tahun 2020	Keg	1	1			
				Monitoring Evaluator Dan Pembinaan Musrenbangdes	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangdes	kali	7	7			
				Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Keg	12	12			
				Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	Kali	12	12			
				Fasilitasi Dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD Dan DD	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Kali	21	21			
				peningkatan pelayanan publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	jenis	12	12			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi			99%	99%			
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	Surat	2000	2000			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	BULAN	12	12	Rek. Jasa Komunikasi tidak terbayar sehubungan dengan terputusnya Jaringan Telepon	Dikembalikan ke Kasda	
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bahan Kebersihan Kantor	Barang	60	60			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	Barang	25	25			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exemplar	365	365			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	kotak	240	240			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya Perjalanan Dinas	Kali	24	20	Sehubungan adengan Pandemi Covid 19 ada beberapa perdin keluar kota yang tak terserap	Dikembalikan ke Kasda	
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan ke kegiatan lain melalui mekanisme PAK	
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan ke kegiatan lain melalui mekanisme PAK	
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	keg	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi Covid 19	Dialihkan ke kegiatan lain melalui mekanisme PAK	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas	unit	240	240			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pns		Orang	4	4			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	ruang	4	4			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan berkala Kendaraan dinas/operasional	unit	5	5			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Unit	14	14			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas	stel	60	60			
		Kecamatan Talango		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				(Sosialisasi BUM-Desa)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa)	Jumlah kegiatan bimbingan yang dilaksanakan	Kali	3	2			
				(Sosialisasi Kelompok Pariwisata Pulau Gili Labak)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	1	-	Kegiatan tidak terlaksanakan sehubungan Covid-19		
				(Pengawasan dan Pembinaan ADD dan DD)	Jumlah pemerintah desa yang difasilitasi	Desa	8	8			
				(Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020-2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Fasilitasi dan Monitoring Pilkades)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK antar Kegiatan	
				(Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				(Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangcam (e-Planning))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan pertemuan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan pertemuan forum yang dilaksanakan	Kali	1	1		-	
				(Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	4	4		-	
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis layanan yang diberikan kepada masyarakat	Jenis	10	10		-	
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	2.000	2.000		-	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12		-	
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	8	8		-	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	5	5		-	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12		-	
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	12	12		-	
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	124	116	Kegiatan tidak dapat secara keseluruhan dilaksanakan sehubungan Covid-19	-	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari-Hari Besar (Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK PENGGESERAN antar Kegiatan	
				Peringatan Hari Jadi Otonomi Daerah	Jumlah Pengadaan penjor/lampu hias	Jenis/buah	6	6			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Jenis/item	10	10			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	3	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Unit	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	jenis	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				(Pengadaan Pakaian Dinas Harian)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) yang dibeli	Stell	22	22			
				(Pengadaan Pakaian Warna Hitam Putih)	Jumlah Pengadaan Pakaian Warna Hitam Putih yang dibeli	Stell	22	22			
		Kecamatan Batuan		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Pelatihan Penyusunan APBDes	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pelantikan BPD Masa Bakti 2020	Pelantikan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				Musrembangcam	Terlaksananya Musyawarah tahunan secara partisipatif untuk menetapkan skala prioritas pembangunan	kali	1	1			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Terjalannya kerjasama ulama dan umaro dalam menyikapi fenomena yang terjadi /timbulnya kesalahpahaman yang meresahkan di masyarakat	kali	1	1			
				Fasilitas Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Terlaksananya pendampingan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD dan DD	kali	3	3			
				Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrembangdes	Terlaksananya Musyawarah tahunan secara partisipatif untuk menetapkan skala prioritas pembangunan	Kali	7	7			
				Sosialisasi dan Monitoring Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19	Jumlah kali dilaksanakannya monitoring	kali	5	5			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jenis pelayanan yang diberikan	jenis	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Surat	1.000	1.400	Rumitnya Pengarsipan, Butuh Ruang Pengarsipan Tidak Terintegrasi Satu Sama Lain, Tidak Bisa Monitoring Surat	Penyediaan ruangan arsip	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan dibayarkannya tagihan rekening	bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jenis bahan kebersihan kantor yang dibeli	jenis	10	8	Keterlambatan penyediaan bahan kebersihan	belanja bahan kebersihan setiap bulan	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik yang dibeli	jenis	2	2			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang dibeli tiap bulan	jenis	2	2			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yang dilaksanakan	Rapat	24	24			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perjalanan dinas yang dilaksanakan	Kali	324	322	Padatnya jadwal kegiatan sehingga terjadi benturan waktu kegiatan dan perdin luar daerah tidak dapat di laksanakan karena pandemi covid-19	mengatur jadwal kegiatan perjalanan dinas	
				Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	Karena pada bulan Maulid, banyak penceramah agama di undang di oleh masyarakat	mengundang satu bulan sebelum kegiatan	
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19		
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19		
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah petugas jasa layanan yang dibayar	orang	5	5			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	9	9			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	2	2			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Unit	1	1	Terjadi kerusakan berat Usia kendaraan melewati batas standart usia pemakaian	menservis mobil setiap bulan	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	2	2			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas yang dibeli	stell	28	28			
		Kecamatan Rubaru		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum							
				Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020	Jumlah Pelaksanaan desk Pilnub 2020	Keg	1	1			
				Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa							
				Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan bantuan ADD dan DD	Jumlah Kegiatan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD	Jumlah desa yang difasilitasi	11	11			
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam	Keg	1	1			
				Forum Ulama dan Umaro	Jumlah Pertemuan Forum Komunikas i Ulama dan umaroh	Keg	4	4			
				Pembinaan Peningkatan Bumdes	Jumlah Peningkatan Bumdes	Keg	1	1			
				Moitpring dan Pembinaan Musrenbangdes	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Musrenbangdes	Keg	1	1			
				Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa bakti 2020-2026	Jumlah BPD yang dilantik	Keg	1	1			
				Sosialisasi dan monitoring pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa bakti 2020-2026	Jumlah BPD yang dilantik	Keg	1	1			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat	Jumlah Sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	keg	1	1			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat	Lembar	2000	2200			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan kebersihan kantor	jenis	20	20			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	unit	8	8			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	exemplar	24	24			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	rapat	12	12			
				koordinasi dan Konsultasi	Jumlah koodinasi dan konsultasi yg dilaksanakan	Kali	86	86			
				Penyediaan jasa Layanan Perkantoran	Jumlah Jasa Layanan Perkantoran	org	9	8			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah Pengadaan dan Peralatan	unit	112	112			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah	unit	2	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	6	6			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Pengadaan pakaian khusus dan hari-hari tertentu	Jumlah pengaddan pakaian batik tradisional	stel	28	28			
		Kecamatan Lenteng		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum							
				Pelantikan BPD Masa Bakti 2020	Jumlah Pelantikan BPD Masa Bakti 2020	Kali	1	1			
				Sosialisasi dan Monitoring/Pemantauan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring/Pemantauan Pemilihan Kepala Desa	Kali	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi	Dialihkan dengan melalui mekanisme PAK	
				Pelatihan dan Penyusunan APBDes bagi Aparat desa dan BPD	Jumlah Pelatihan dan Penyusunan APBDes bagi Aparat desa dan BPD	Kali	1	1			
				Sosialisasi dan Evaluasi RAPERDes	Jumlah Sosialisasi dan Evaluasi RAPERDes	Kali	1	1			
				Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020	Jumlah Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Tahun 2020	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	orang	3	3			
				Pemberdayaan dan Pembinaan MasyarakatDesa							
				Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Jumlah Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Desa	20	20			
				Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Jumlah Pertemuan Forum Komunikasi Ulama dan Umaro	Kali	2	2			
				Pelaksanaan Musrenbangcam	Jumlah Pelaksanaan Musrenbangcam	Kali	1	1			
				Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Jumlah Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	Kali	1	1			
				Monitoring dan Pembinaan Musrenbangdes	Jumlah Monitoring dan Pembinaan Musrenbangdes	Kali	1	1			
				Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Bantuan Pangan Non Tunai	Kali	1	1			
				Sosialisasi dan Monitoring Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19	Kali	1	1			
				peningkatan pelayanan publik							
				Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Jenis	21	21			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar	Surat	1750	2000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bahan Kebersihan Kantor yg dibeli	buah	10	10			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis item komponen listrik yg dibeli	Jenis	8	8			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan dalam satu tahun	Exemplar	24	24			
				Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat yg dilaksanakan dalam 1 tahaun	Rapat	12	12			
				Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kali	97	97			
				Peringatan Hari-Hari Besar							
				Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Jumlah Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Kegiatan	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi	Dialihkan dengan melalui mekanisme PAK	
				Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Kegiatan	1	0	Refocusing sehubungan dengan Pandemi	Dialihkan dengan melalui mekanisme PAK	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pe mbi na a n PKK da n kelembagaan desa	Jumlah pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa	kali	12	12			
				Pe mbi na a n Ba da n Us a ha Mi li k De s a (BUMDe s)	Jumlah BUMDes yang diberi pembinaan	lembaga	15	15			
				Moni tori ng Eva l ua s i da n Pe mbi na a n Mus re nba ngde s	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes	kali/desa	15	15			
				Peningkatan Pelayanan Publik							
				Pe l a ya na nPATEN	Jumlah Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan yang dilakukan	jenis layanan	15	15			
				Program Peningkatan Manajemen dan pelayanan Administrasi							
				Pe nye di a a n Ja s a Sura t Menyurat	Juml a h s ura t yang diadministrasikan	surat	500	500			
				Pe nye di a a n ja s a komuni ka s i , s umbe r da ya a i r da n li s tri k	Juml a h wa ktu Pe nye di a a n Ja s a Komuni ka s i Sumbe r da ya a i r da n Li s tri k	Bul a n	12	12			
				Pe nye di a a n ba ha n da n ja s a ke be rs i ha n ka ntor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Buah	10	10			
				Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Bahan Perkantoran	Jumlah bahan perkantoran yang disediakan selama 1 TA	Buah	29	29			
				Pe nye di a a n kompone n i ns ta l a s i listrik/pe ne ra nga n bangunan k ntor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Buah/item	6	6			
				Pe nye di a a n ba ha n ba ca a n da n Pe ra turan perunda ng- unda nga n	Juml a h Ba ha n ba ca a n da n pe ra turan perundang- undangan	Exe mpl a r	24	24			
				Pe nye di a a n ma ka na n da n mi num a n	Jumla h tersedia nya ma ka na n da n mi num ra pa t	Ta hun	24	24			
				Ra pa t-ra pa t koordi na s i da n kons ul ta s i	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	kali	136	130			
				Peringatan Hari-Hari Besar,							
				Pe l a ks a na a n Pe ri nga ta n Ma ul i d Nabi Muhammad SAW	Jumlah Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW	Keg	1	1			
				Pe ri nga ta n Hari Proklamasi Kemerdekaan	umlah Kesuksesan Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan	Keg	1	1			
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	jumlah tenaga layanan perkantoran yg dibayar	org	5	5			
				Pe nga da a n Pe ra l a ta n da n Pe ri e ngka pa n Ge dung Ka ntor/ruma h di na s	jumlah peralatan dan perlengkapan yang yang dibeli	Uni t	4	4			
				Pe me l i ha ra a n ruti n/be rka l a ge dung ka ntor/ruma h di na s	jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	3	3			
				Pe me l i ha ra a n ruti n/be rkala kendaraa n dina s /ope ra s i ona l	umlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pe me l i ha ra a n ruti n/be rka l a pe ra l a ta n da n pe rl e nka pa n ge dung ka ntor/ruma h di na s	jumlah peralatan dan perlengkapan yang dipelihara	Unit	10	10			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pe nge l o l a a n da n peningkatan disiplin pegawai							
				Pe nga da n pakaian khusus hari-hari tertentu	Juml a h Pe nga da a npakaian	Ste l	20	20			
		Kecamatan Dungkek		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentrman dan ketertiban umum – Sosialisasi Penanggulangan Penyebaran Covid 19	Jumlah kegiatan sosialisasi tentang covid 19	keg	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Forum Komunikasi Ulama dan Umara	Jumlah Kegiatan pertemuan ulama dan umara	kali	2	2			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Pelatihan keterampilan Ibu-Ibu PKK	Jumlah Kegiatan Pelatihan keterampilan Ibu-Ibu PKK	Kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Monev dan pembinaan musrembangdes	Jumlah Kegiatan pembinaan musrembangdes	kali	15	15			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Fasilitasi dan monitoring Pelaksanaan Bantuan ADD dan DD	Jumlah Fasilitasi dan monitoring ADD dan DD	kali	45	45			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Pembinaan Bumdes	Jumlah Pembinaan Bumdes	kali	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Pelaksanaan Musrembangcam	Jumlah kegiatan musrembangcam	Keg	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Pelantikan BPD	Jumlah kegiatan pelantikan BPD	orang	185	185			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Pembinaan Lembaga/organisasi PKK Desa	Jumlah pembinaan PKK Desa	Keg	1	1			
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa – Desk Pilkada	Jumlah kegiatan Desk Pilkada	Keg	1	1			
				Peningkatan Pelayanan Publik - Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah waktu Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	bulan	12	12			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Surat Keluar	surat	750	750			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Kebersihan Kantor	Bulan	12	12			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu Komponen listrik yang diadakan sebagai penerangan bangunan	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makan dan minum rapat	rapat	12	12			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah tersedianya Perjalanan Dinas	Kali	125	88	Capaian kinerja tercapai karena pandemic sehingga lebih banyak menggunakan zoom meeting		
				Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah petugas pelayanan yang diberikan gaji	orang	3	3			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/ rumah dinas	Jumlah Pengadaan dan Peralatan Kantor/Rumah Dinas	unit	92	89	Tidak menemukan harga yang sesuai sebagaimana yang dibutuhkan		
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas	unit	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan berkala Kendaraan dinas/operasional	unit	1	1			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan berkala Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas	Unit	6	6			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	Jumlah tersedianya seragam dinas	stel	36	36			
		Kecamatan Ganding		Program Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Anaratur Desa							
				Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, ketentrangan dan ketertiban umum							
				(Desk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Pelantikan BPD Masa Bhakti 2020 - 2026)	Jumlah kegiatan pelantikan yang dilaksanakan	Kali	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				(Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan)	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	Kali	12	12			
				(Sosialisasi dan Monitoring Pemilihan Kepala Desa)	Jumlah kegiatan sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan	Kali	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK	
				Pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa							
				(Pembinaan PKK dan Kelembagaan Desa)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	4	4			
				(Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Musrenbangdes)	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Pelaksanaan Musrenbangcam)	Jumlah kegiatan Musyawarah yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Forum Komunikasi Ulama dan Umaro)	Jumlah kegiatan forum Ulama Umaro yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				(Fasilitasi dan Monitoring Pelaksanaan ADD dan DD)	Jumlah kegiatan Monitoring yang dilaksanakan	Kali	1	1			
				Peningkatan pelayanan publik							
				(Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN))	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan	Kali	2	2			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	1.000	1.250			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Rekening Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan Listrik	Rekening	4	4			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jenis	9	9			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	8	8			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Exemplar	12	12			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah rapat yg disediakan makanan dan minuman	Rapat	24	24			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	146	146			
				Peringatan Hari-Hari Besar (Penyelenggaraan Pameran Pembangunan)	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kegiatan	1	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehubungan Covid-19	Pagu Anggaran Kegiatan di PAK	
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	5	5			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara	Bangunan	3	3			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	8	8			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Unit	44	44			
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian							
				(Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu)	Jumlah Pengadaan Kaos dan Trening Olah Raga dibeli	Stel	24	24			
2	Pengawasan	Inspektorat		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan formal yang diikuti	kali	90 kali	127 kali	Adanya pembatasan aktivitas kinerja pada beberapa aspek layanan akibat terjadinya pandemi Covid-19		
				Peningkatan Sumber Daya Manusia	Hasil Pos test						
				Bimtek Audit Berbasis Risiko	Hasil Pos test	orang	50	50			
				Bimtek Probit Audit	Hasil Pos test	orang	50	0	refocusing anggaran		
				Bimtek Penyelenggaraan SPIP Integratif	Hasil Pos test	orang	50	50			
				Pengelolaan dan Peningkatan disiplin Kepegawaian							
				Penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional	jumlah PAK yang diterbitkan	PAK	27 PAK	27 PAK			
				Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas untuk auditor dan pejabat struktural	pakaian dinas	35 pakaian dinas	35 pakaian dinas			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan Laporan Keuangan							
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	buku	3 buku	3 buku			
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	buku	3 buku	3 buku			
				Penyusunan RKA dan DPA OPD	jumlah RKA dan DPA	buku	2 buku	2 buku			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	buku	2 buku	2 buku			
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah LPPD	buku	1 buku	1 buku			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH							
				Pengawasan Internal OPD							
				Inventarisasi temuan pengawasan	Jumlah inventarisasi temuan	eksemplar	47 eksemplar	47 eksemplar			
				Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	pengawasan melalui SIMHP	LHP	80 LHP	80 LHP			
				Penanganan Kasus di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah penanganan kasus	LHP	50 LHP	40 LHP	Banyaknya tugas pengawasan mandatory sedangkan jumlah auditor belum memadai		
				Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3			
				Tindak lanjut hasil Pemeriksaan BPK	Jumlah TLHP BPK	eksemplar	35 eksemplar	35 eksemplar			
				Tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Jumlah TLHP APIP	eksemplar	35 eksemplar	35 eksemplar			
				Larwasda	Jumlah Obrik yang menyelesaikan TLHP	obrik	80 obrik	80 obrik			
				Audit Kinerja	Jumlah program prioritas yang diaudit kinerja	program	2 program	2 program			
				Klinik Konsultasi Pengawasan	Jumlah Obrik yang melakukan konsultasi pengawasan	obrik	80 obrik	80 obrik	pandemi covid, mengurangi konsultasi tatap muka		
				Koordinasi dan Supervisi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan	Jumlah korsup APIP APH	laporan	12 laporan	12 laporan			
				Reviu, Monitoring dan Evaluasi							
				Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Monev pemerintahan daerah	Laporan	80 Laporan	80 Laporan			
				Review dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	jumlah OPD yang memperoleh nilai SAKIP minimal B	Jumlah OPD	Nilai A = 25 OPD, Nilai BB = 22 OPD, Nilai B = 10 OPD	Nilai A = 21 OPD, Nilai BB = 9 OPD, Nilai B = 1 OPD	OPD yang dilakukan evaluasi tidak sampai pada Kecamatan		
				Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Jumlah laporan LK OPD yang sesuai SAP	Jumlah LK OPD	28 OPD dari total 31 OPD	28 OPD dari total 31 OPD			
				Review Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah laporan reviu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan	laporan	4 laporan	4 laporan			
				Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan kegiatan	laporan	1 laporan	1 laporan			
				Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Laporan Reviu RKPD	laporan	2 laporan	2 laporan			
				Review DAK Fisik	Jumlah Laporan Review DAK Fisik	laporan	4 laporan	8 laporan			
				Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Evaluasi PMPRB	Nilai	Minimal 70	Minimal 70			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Jumlah Laporan Reviu LPPD	laporan	2 laporan	2 laporan			
				Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK)	Jumlah laporan tindak lanjut rencana aksi	laporan	4 laporan	4 laporan			
				Pelaksanaan Zona Integritas							
				Pelaksanaan Zona Integritas	Jumlah OPD	OPD	40 OPD	57 OPD			
				Survei Penilaian Integritas	Hasil Survei	laporan	3 laporan	0	refocusing anggaran		
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi							
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat dalam 1 tahun	surat	3200 srt	3200 srt			
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Cakupan Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tahun	1 tahun	1 tahun			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan dan jasa kebersihan kantor	macam	12 macam	12 macam			
				Penyediaan Kebutuhan Perkantoran	Jumlah kebutuhan kantor yang disediakan selama 1 TA	macam	50 macam	50 macam			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	jenis	15 jenis	15 jenis			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia dan SOP yang tersusun	macam	13 macam bahan bacaan dan 5 SOP	13 macam bahan bacaan dan 5 SOP			
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	macam	2 macam	2 macam			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah perdin ke dalam dan luar daerah	kali	288 kali	253 kali	Adanya pembatasan perjalanan akibat terjadinya pandemi Covid-19	Pertemuan banyak dilakukan secara daring	
				Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	kegiatan	2 kegiatan	1 kegiatan			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas	Jumlah peralatan kantor yang dibeli	unit	13 unit dan 1 paket	13 unit dan 1 paket			
				Rehabilitasi gedung kantor/ rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 paket	1 paket	1 paket			
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	unit gedung kantor	1 unit gedung kantor	1 unit gedung kantor			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas/operasional	Kali /thn	4 Kali /thn	4 Kali /thn			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dilakukan pemeliharaan	unit	50 unit	50 unit			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Perencanaan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program/Kegiatan RKPD yang diakomodir dalam PPAS	%	80	80			
				Kegiatan Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah Kecamatan Pengusul Kegiatan	Kecamatan	27	27			
					Jumlah dokumen RKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	2			
					Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Sistem	1	1			
				Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu	Laporan dan Dokumen	5	5			
					Jumlah laporan terverifikasi kegiatannya sesuai prioritas	Laporan	1	1			
					Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun tepat waktu	Dokumen	4	4			
				Kegiatan Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	Dokumen	3	3			
				Program Pengembangan data/informasi dan Pelaporan	Persentase penyelesaian Dokumen / Laporan tepat waktu	%	100	100			
				Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah	Jumlah laporan DAK disusun tepat waktu	Laporan	4	4			
					Jumlah laporan pembangunan daerah disusun tepat waktu	Laporan	2	2			
					Jumlah dokumen Hibah dan Bantuan Sosial disusun tepat waktu	Laporan	2	2			
				Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisa Data Hasil Pembangunan Daerah (SIPD) yang disusun	dokumen	1	1			
					Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun tepat waktu	Laporan	1	1			
					Jumlah laporan Rencana Aksi Daerah disusun tepat waktu	Laporan	3	3			
				Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase perencanaan bidang Sosial Budaya yang diimplementasikan	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintahan	Jumlah dokumen kependudukan dan pemerintahan yang disusun	dokumen	1	1			
				Kegiatan Fasilitasi pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)	Jumlah laporan Sustainable Development Goals (SDGs) yang disusun	Laporan	1	1			
				Kegiatan Perencanaan pembangunan kesehatan dan kesejahteraan sosial	Jumlah dokumen kesehatan dan kesejahteraan sosial yang disusun	Dokumen	1	1			
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase perencanaan pembangunan ekonomi bidang perekonomian dan SDAYang diimplementasikan	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Perencanaan pembangunan industri perdagangan dan koperasi	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	Laporan	2	2			
					Jumlah laporan Perencanaan Indag dan Koperasi yang disusun	Laporan	1	1			
					Jumlah Dokumen Analisis Alternatif Pendanaan Non APBD yang disusun		1	1			
				Kegiatan Pendampingan Anti Poverty Program (APP)	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina		1	1			
				Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam	Jumlah laporan yang disusun tepat waktu	Laporan	2	2			
					Jumlah laporan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) yang disusun	Laporan	1	1			
					Jumlah laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam yang disusun	Laporan	1	1			
				Kegiatan Perencanaan pembangunan pertanian, perikanan dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pertanian, Perikanan dan SDA yang disusun		1	1			
				Program Perencanaan Sarana Prasarana dan Wilayah	Persentase dokumen perencanaan bidang sarana dan prasarana yang diimplementasikan	%	100	100			
				Kegiatan Perencanaan pembangunan PU dan Perhubungan	Jumlah Laporan Kegiatan perencanaan Pembangunan PU dan Perhubungan yang di susun	Laporan	1	1			
				Kegiatan Perencanaan pembangunan PRKP dan Cipta Karya	Jumlah Dokumen Review RAD-AMPL yang disusun	Dokumen	1	1			
					Jumlah Dokumen Perbup RP2KPKP dan Kajian Kawasan Kumuh yang disusun	Dokumen	2	2			
					Jumlah Dokumen Review SSK yang disusun	Dokumen	1	1			
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang disusun	Dokumen	1	1			
					Jumlah Dokumen Identifikasi dan Penataan Kawasan Permukiman wilayah Pesisir yang disusun	Dokumen	1	1			
					Jumlah Dokumen Aset PSU Perumahan dan PSU Kecamatan Kota Sumenep, Kecamatan Batuan dan Kecamatan Kalianget yang disusun	Dokumen	2	2			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Perencanaan Tata Ruang dan LH	Jumlah Dokumen Perda Review RTRW Kabupaten Sumenep yang disusun	Dokumen	1	1			
					Jumlah Kajian Perencanaan Kota Baru yang disusun	Kajian	1	1			
					Jumlah laporan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang disusun	Laporan	1	1			
				Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Kepulauan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan wilayah kepulauan yang diimplementasikan	%	100	100			
				Kegiatan Penyusunan dan analisa data informasi perencanaan pembangunan wilayah kepulauan	Jumlah Identifikasi dan Analisa Kebutuhan Sarana Infrastruktur Air bersih kepulauan yang disusun	Dokumen	1	1			
				Kegiatan Penyusunan profil wilayah kepulauan Kabupaten Sumenep	Jumlah Profil Wilayah Kepulauan yang disusun	Profil kepulauan	1	1			
4	Keuangan	Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		Program Pengembangan Potensi PAD							
				Pengelolaan Basis Data SISMOIP dan SIG	Data Subyek/obyek PBB dilakukan pemutakhiran	NOP	100	100			
				Pengelolaan data potensi pajak daerah dan retribusi daerah	Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jenis Pajak	9	9			
				Analisa Zona Nilai Tanah	Jumlah Wilayah yang dilakukan updating data nilai tanah sesuai zona	Kecamatan	5	5			
				Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah	Jenis Pajak /Retribusi	9 Pajak dan 1 retribusi	9 Pajak dan 1 retribusi			
				Pemeriksaan dan Pengendalian Wajib Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dikendalikan	Jenis Pajak	9	9			
				Penerbitan dan Pengendalian SPPT dan PBB-P2	Jumlah SPPT dan PBB-P2 yang diterbitkan	Lembar	744.000	744.000			
				Program Peningkatan , Pengelolaan Pelayanan Penagihan serta pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah (PRD)	Prosentase peningkatan pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	%	90	90			
				Penagihan dan Penanganan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Pajak dan Retribusi daerah yang ditagih	Pajak/retribusi	10	10			
				Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang terbina	Orang	500	500			
				Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Produk hokum di bidang pajak dan retribusi daerah yang disusun	Produk hokum	4	4			
				Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Wajib Pajak dan Retribusi yang dilayani	Item	10	10			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Program administrasi perbendaharaan daerah	administrasi perbendaharaan daerah yang tertib dan efisien	%	100	100			
				Pengelolaan kasda	Pengelolaan informasi dan kebijakan kas umum daerah	set	114	114			
				Penyelenggaraan monitoring, koordinasi dan pelaporan realisasi transfer dana dari pemerintah pusat	Transfer dana DAK non fisik sesuai dengan jadwal dan target	laporan	4	4			
				Penyusunan administrasi pelaporan DAK fisik	Pengelolaan dana DAK dan pelaporan	laporan	4	4			
				Pelaksanaan pengelolaan proses SP2D Belanja langsung	Jumlah SP2D yang benar dinandingkan dengan jumlah total SP2D yang diterbitkan	lembar	18000	18000			
				Pembinaan Bendahara	OPD pembinaan bendahara	OPD	58	58			
				Pengelolaan Belanja Tidak langsung	Pelaksanaan verifikasi dan validasi pemrosesan belanja tidak langsung	lembar	2500	2500			
				Pembinaan dan pendampingan system informasi penggajian PNS	Jumlah peserta yang mengikuti pendampingan	OPD	58	58			
				Penyusunan Administrasi Pelaporan DAK non Fisik	Jumlah data pelaporan DAK yang tersusun	item	399	399			
				Program Pengelolaan & pertanggungjawaban Keuangan daerah	Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan daerah yang tertib	%	100	100			
				Penyusunan laporan konsolidasi dan evaluasi bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah buku hasil realisasi APBD OPD semesteran dan prognosis	buku	150	150			
				Penyusunan laporan realisasi pendapatan dan pengelolaan kas sebagai laporan triwulanan, semesteran, dan tahunan	Jumlah laporan bulanan dan triwulanan penerimaan daerah tahun berjalan	buku	400	400			
				Penyusunan laporan realisasi belanja dan penatausahaan SPJ sebagai laporan triwulanan, semesteran dan tahunan	Jumlah laporan bulanan dan triwulanan belanja daerah	buku	400	400			
				Penyusunan persiapan Pelaporan Keuangan daerah	Jumlah data penyusunan laporan keuangan daerah	item	16	16			
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD	Jumlah buku tentang pertanggungjawaban APBD	buku	600	600			
				Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	buku	865	865			
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Anggaran	Pengelolaan Anggaran daerah yang baik dan benar	%	100	100			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Jumlah rancangan perda APBD	buku	75	75			
				Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Jumlah rancangan perbup penjabaran APBD	buku	75	75			
				Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	Jumlah rancangan perda perubahan APBD	buku	75	75			
				Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah rancangan perbup penjabaran perubahan APBD	buku	75	75			
				Penyusunan rencana anggaran pendapatan	Jumlah data yang akurat mengenai target PAD, dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang sah	buku	2	2			
				Penyusunan dokumen pengelolaan anggaran	Jumlah buku dokumen pengelolaan anggaran	buku	145	145			
				Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran dan anggaran kas	Penerbitan anggaran kas semua OPD tahun 2020	OPD	58	58			
				Program penatausahaan dan tata kelola administrasi aset	Penatausahaan barang milik daerah yang tertib	%	90	90			
				Analisa aset daerah	Jumlah buku standar satuan harga barang yang dibuat	Buku	80	80			
				Penyusunan Akuntansi Aset Daerah	Jumlah daftar aktiva tetap yang dibuat	OPD	58	58			
				Penghapusan aset daerah	Jumlah daftar perubahan status hokum barang sesuai usulan OPD di lingkungan Kab, Sumenep	OPD	58	58			
				Penertiban Ase Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep	Ketertiban pengelolaan aset/barang milik daerah	Sertifikat	50	50			
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi/							
				Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan saluran komunikasi, air dan listrik dalam menunjang kelancaran pekerjaan	Jasa	3	3			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya kebersihan kantor	%	90	90			
				Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	%	90	90			
				Penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya instalasi listrik dan elektronik	%	90	90			
				Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Buku Peraturan , koran dan majalah	%	90	90			
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum untuk rapat tamu dan harian	%	100	90			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Penyediaan dana dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan kebutuhan penyebarluasan informasi	%	90				
				Peringatan Hari Hari besar	Penyediaan dana dalam peringatan hari-hari besar kantor	keg	1	0	Tahun 2020 terdapat pandemic yang megakibatkan tidak terlaksananya peringatan hari hari besar seperti sebelumnya		
				Penyediaan Jasa LAYanan perkantoran	Penyediaan Tenaga Pendukung administrasi perkantoran dalam mendukung tugas dengan kegiatan rutin	%	90	90			
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan yang dibeli	Item	2	2			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Rumah Dinas	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dibeli	Item	60	59			
				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor/rumah dinas	Penyediaan bangunan gedung yang memadai dalam mendukung kegiatan aparatur dengan jumlah pegawai	%	90	90			
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas dengan jumlah kendaraan	%	90	90			
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan Gedung kantor rumah dinas	Persentase penyediaan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	%	90	90			
				Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terpenuhinya kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100			
				Pendidikan dan Pelatihan Formal	Peningkatan kemampuan dan pelatihan formal	%	90	0	Tidak terlaksana karena adanya pandemi		
				Pengelolaan dan peningkatan disiplin kepegawaian	Belanja Kepegawaian	Paket	1	1			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan	%	90	90			
				Penyusunan Laporan Keuangan	Buku Laporan Keuangan	Laporan	4	4			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Susunan dokumen kinerja kantor	Laporan	4	4			
				Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	Proses realisasi keuangan daerah	OPD	58	58			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Kepegawaian	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang disesuaikan formasi kebutuhan dan kompetensi yang telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja	Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN	1. Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi	Persen	90	84,47			
					2. Persentase Jumlah Aparatur Sesuai dengan Kebutuhan dengan SOTK	Persen	94	93,3			
				Kegiatan Penataan ASN	Jumlah Jabatan Terisi Sesuai Kon	Jabatan	863	729	Beberapa ASN belum mengikuti uji kompetensi sesuai jabatannya	Pemkab memfasilitasi pengembangan kompetensi sesuai jabatan ASN	
				Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis ASN	Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu	PNS	2600	1848			
				Kegiatan Pengembangan karir dan promosi aparatur	Jumlah Seleksi dan Uji Kompetensi yang dilaksanakan	Seleksi	1	1			
				Sub Kegiatan Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Jumlah SK. Pengangkatan CPNS menjadi PNS	PNS	300	314			
				Sub Kegiatan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah pejabat struktural dan fungsional yang dilantik	PNS	500	217	- Kabupaten Sumenep termasuk daerah yang melaksanakan PILKADA Serentak Tahun 2020, Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2, menyebutkan "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri" untuk terkait dengan pemenuhan persyaratan administrasi memerlukan waktu/proses yang cukup panjang	Berkordinasi dengan mengirim surat ke OPD terkait dengan Anjab dan ABK dan mengajukan ijin tertulis ke Mendagri terkait mutasi / rotasi.	
				Sub Kegiatan Proses Peninjauan Masa Kerja	Jumlah SK Peninjauan Masa Kerja PNS	PNS	10	32			
				Sub Kegiatan Penyerahan SK Pensiun PNS secara Simbolis	Jumlah Penyerahan SK. Pensiun PNS Simbolis	Pensiun PNS	150	150			
				Sub Kegiatan Proses Administrasi Pensiun ASN	Jumlah Administrasi PNS yang pensiun	BUP PNS	350	542			
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Sumpah Dan Janji PNS	Jumlah PNS yang disumpah	PNS	300	349			
				Sub Kegiatan Tim Penilai Kinerja PNS	Jumlah Tim Penilai Kinerja PNS	PNS	9	9			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Proses Administrasi Kenaikan Pangkat	Jumlah SK yang diterbitkan tepat waktu	PNS	2600	1848	Pelaksanaan Kenaikan pangkat dalam 1 tahun terbagi 2 periode yaitu april dan oktober dengan estimasi target usulan KP sebanyak 2600 orang pada tahun 2020, jumlah ASN yang memenuhi syarat untuk naik pangkat sebanyak 1848 ASN berdasarkan usulan dari masing2 opd terealisasi sebesar 71% dari usulan masing2 OPD ditahun 2020	Mengadakan kegiatan sosialisasi persiapan kenaikan pangkat dengan membuat daftar nominatif kenaikan pangkat, sehingga dari daftar usulan nominatif KP ini, didapatkan nilai perencanaan yang sesuai dengan realisasi usulan kenaikan pangkat	
				Sub Kegiatan Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemkab. Sumenep	Jumlah Peserta Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan tinggi Pratama	PNS	50	75	Pelaksanaan Seleksi Pengisian JPT Pratama berdasarkan atas perintah bupati sumenep, sehingga waktu pelaksanaan tidak bisadi prediksi/ditetapkan Kabupaten SUMENEP termasuk daerah yang melaksanakan PILKADA Serentak Tahun 2020, Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 71 Ayat 2, menyebutkan "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota ata wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan paangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri untuk terkait	Mengadakan kegiatan sosialisasi persiapan pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat administrator Tahun 2020, sehingga peserta memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan uji kompetensi bagi pejabat administrator, mengingat pejabat administrator dipersiapkan untuk mengikuti seleksi pengisian JPT Pratama	
				Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN	Persentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan	Persen	75	96,13			
				Kegiatan Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN	Jumlah Data Kebutuhan ASN sesuai formasi	Formasi	310	298			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Seleksi penerimaan calon ASN	Jumlah Peserta Berdasarkan Pendaftar dari Umum	Orang	7000	6352	Terdapat peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada setiap hari pada pelaksanaan SKD dengan tidak ada alasan yang jelas.	Diupayakan pada pelaksanaan Seleksi CPNS yang akan datang ada himbauan melalui pemberitahuan/pengumuman untuk meminimalkan peserta yang tidak hadir	
				Sub Kegiatan Proses Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN (CPNS dan PPPK)	Jumlah Penetapan Kebutuhan dan Formasi ASN (CPNS dan PPPK)	Product	2	2			
				Sub Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah, Pengarahan, Pemberkasan dan Penyerahan SK CPNS TA 2020	Jumlah Peserta Berdasarkan Pendaftar dari Umum	Orang	7000	6352	Terdapat peserta yang tidak hadir dalam pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada setiap hari pada pelaksanaan SKD dengan tidak ada alasan yang jelas.	Diupayakan pada pelaksanaan Seleksi CPNS yang akan datang ada himbauan melalui pemberitahuan/pengumuman untuk meminimalkan peserta yang tidak hadir	
				Program Pelayanan Informasi Data Kepegawaian	Persentase Akurasi Updating data kepegawaian	Persen	80	99,31			
				Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah kelompok data yang diupdate	Data	8999	8937			
				Kegiatan Pengembangan Informasi Kepegawaian	Jumlah penyampaian informasi kepegawaian	Buku	122	122			
				Sub Kegiatan Validasi Data Kepegawaian	Jumlah OPD yang terkoneksi dengan SIMPEG BKPSDM	OPD	57	57			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAGA)	Jumlah Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAGA)	OPD	61	61			
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN)	Jumlah Informasi Layanan Harian Kepegawaian (SILAHKAN)	OPD/Unit Kerja	61	61			
				Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikasi ISO 9001	Jumlah Pelayanan Kepegawaian Terpadu Bersertifikasi ISO 9001-2008	Paket	1	1			
				Sub Kegiatan Penyediaan Data Informasi Kepegawaian	Jumlah Buku Profil kepegawaian dan buku peraturan	Buku Cetakan	122	122			
				Program Peningkatan disiplin ASN	Persentase Jumlah pelanggaran disiplin ASN	Persen	0,2	0,16			
					Persentase Nilai SKP yang baik	Persen	80	93,74			
				Kegiatan Pembinaan Aparatur	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin	Kasus	30	14			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah Nilai SKP yang baik	Orang	8999	8436	Terdapat OPD yang tidak mengirimkan rekapitulasi SKP PNS	Akan dilakukan sosialisasi dan pemberian sanksi pada OPD/PNS yang tidak mengerjakan atau mengumpulkan SKP	
				Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai	Jumlah Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai	Orang	3000	2600	Jumlah realisasi tidak memenuhi target dikarenakan ada mutasi PNS keluar/masuk Kab. Sumenep dan PNS yang memasuki usia pensiun	Akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah penerima TPP sehingga dapat memperkirakan pergerakan jumlah PNS dalam 1 tahun	
				Sub Kegiatan Proses Pengisian dan Penyampaian LP2P	Jumlah PNS Wajib Pajak LP2P	orang	4000	4163			
				Sub Kegiatan Proses Pelaporan LHKPN	Jumlah Pelapor LHKPN	Orang	39	37	Jabatan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDA serta Asisten Pemerintahan belum ada pejabat Definitif	Akan segera dilakukan pengisian jabatan. Pejabat yang diwajibkan melakukan pengisian LHKPN adalah pejabat definitif	
				Sub Kegiatan Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian	Jumlah Kasus pelanggaran disiplin	Kasus	30	14			
				Sub Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang dievaluasi	OPD/Unit Kerja	160	124			
				Sub Kegiatan Pengadministrasian Penyerahan Tambahan Penghasilan Pegawai	Jumlah Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai	Orang	3000	2600			
				Sub Kegiatan Proses Usul dan Penetapan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya	Jumlah Penerima Tanda Kehormatan SATYALANCANA KARYA SATYA	Orang	150	134			
				Sub Kegiatan Proses Penyelesaian Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg	Jumlah Penyelesaian Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg	Kartu	350	183	Jumlah seluruh usulan sebanyak 590 berkas, terealisasi 108 kartu dikarenakan yang memproses adalah Kanreg II BKN dan PT. TASPEN	Akan dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intens sehingga proses pengusulan karis/karsu, karpeg dan taspen tidak tertunda penyelesaiannya. Untuk periode kedepan, direncanakan proses pengusulan karis/karsu dan karpeg dilakukan dengan aplikasi	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pemberian insentif bagi Tenaga Honorrer (eks. K2)	Jumlah Penerima Insentif Tenaga Honorrer (eks K-2)	Tenaga Sukwan	315	307	Anggaran bersifat penyediaan sesuai dengan Jumlah K-2 sampai dengan akhir bulan Desember 2020, terdapat Tenaga Honorrer yang meninggal dunia dan mengundurkan diri sehingga anggaran tidak dapat terserap	Akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah penerima eks K-2 sehingga dapat diperkirakan pergerakan jumlah eks K-2 dalam 1 tahun	
				Sub Kegiatan Penataan Administrasi dan Monitoring Pegawai Tidak Tetap	Jumlah Pemberian Gaji/upah bagi PTT	PTT	15	14	Anggaran bersifat penyediaan sesuai dengan Jumlah PTT sampai dengan akhir bulan Desember 2020, terdapat PTT yang meninggal dunia sehingga anggaran tidak dapat terserap	Akan dilakukan evaluasi terhadap jumlah penerima PTT sehingga dapat diperkirakan pergerakan jumlah PTT dalam 1 tahun	
6	Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dan Pola Karier ASN mulai dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sampai dengan Jabatan Pelaksana 2. Peningkatan disiplin, interitas, komitmen dan kinerja pegawai ASN melalui penegakan peraturan disiplin dan kode etik	Program Pengembangan Kompetensi SDM	Persentase Peserta Lulus Diklat	Persen	90	97,73	Adanya Pandemi Covid 19 dimana semua anggaran di refocusing sehingga ada kegiatan yang belum bisa optimal untuk di laksanakan mengingat keterbatasan anggran dan mitra kerja dari provinsi atau pusat juga menyesuaikan karena adanya pandemi	Meningkatkan komunikasi yang efektif kepada seluruh OPD untuk membangun kerjasama yang baik agar kegiatan pengembangan Aparatur di Kabupaten Sumenep dapat berjalan dengan baik dan lancar	
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat Kompetensi SDM Manajerial	Orang	86	42	situasi pandemi tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah dikarenakan adanya pandemi covid 19 (Recofusing)	Dijadwalkan Kembali Tahun 2021 untuk mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional	Jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat Kompetensi SDM Teknis dan Fungsional	Orang	20	12	Target 20 peserta adalah sebagai bahan estimasi	Hal ini dapat dievaluasi mengingat anggaran yang tersedia akan di gunakan yang mana kami tidak mengetahui besarnya index dan banyaknya penawaran kegiatan diklat baik dari lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah lain dari tiap kegiatan diklat.	
				Kegiatan Pengembangan kompetensi SDM aparatur	Jumlah peserta yang lulus kompetensi	Orang	290	333	1. Belum adanya aplikasi yang memadai untuk pemenuhan kelnacaran kegatan 2. Respon OPD yang kurang cepat dalam menanggapi surat edaran yang mempengaruhi keterlambatan dalam pengajuan ijin belajar, Pengisian Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1. Meningkatkan komunikasi yang efektif kepada seluruh OPD untuk membangun kerjasama yang baik agar kegiatan pengembangan Aparatur di Kabupaten Sumenep dapat berjalan dengan baik dan lancar. 2. Melakukan komunikasi dengan LAN perihal aplikasi SIPKALAN	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat II bagi Pejabat Eselon II PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	Orang	6	2	situasi pandemi tidak memungkinkan untuk mengirim sebanyak 6 peserta mengingat BKPSDM provinsi pada saat itu juga belum ada kepastian kegiatan anggkatan selanjutnya dikarenakan adanya pandemi covid 19.	Dijadwalkan Kembali untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah	Orang	40	0	situasi pandemi tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah dikarenakan adanya pandemi covid 19 (Recofusing)	Dijadwalkan Kembali Tahun berikutnya untuk mengikuti diklat Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Daerah	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Calon PNS Daerah	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Calon PNS Daerah	Orang	40	40			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah Peserta Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Orang	20	12	Target 20 peserta adalah sebagai bahan estimasi	Hal ini dapat dievaluasi mengingat anggaran yang tersedia akan di gunakan yang mana kami tidak mengetahui besarnya index dan banyaknya penawaran kegiatan diklat baik dari lembaga pemerintah/lembaga non pemerintah lain dari tiap kegiatan diklat.	
				Sub Kegiatan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Jumlah peserta Diklat Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi	Orang	75	75	1. Belum adanya aplikasi yang memadai untuk pemenuhan kelnacaran kegatan 2. Respon OPD yang kurang cepat dalam menanggapi surat edaran yang mempengaruhi keterlambatan dalam pengajuan ijin belajar, Pengisian Analisa kebutuhan pengembangan kompetensi	1. Meningkatkan komunikasi yang efektif kepada seluruh OPD untuk membangun kerjasama yang baik agar kegiatan pengembangan Aparatur di Kabupaten Sumenep dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada Tahun 2021 akan tetap di programkan lagi kegiatan ini karena hasil ini menjadi nilai PEMKAB dalam hal reformasi birokrasi dan kinerja. 2. Melakukan komunikasi dengan LAN perihal aplikasi SIPKALAN	
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Tingkat Administrator	Jumlah peserta yang mengikuti diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam	Orang	40	0	Situasi pandemi tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Tingkat Administrator dikarenakan adanya pandemi covid 19 (Recofusing)	Dijadwalkan Kembali untuk mengikuti diklat Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri Tingkat Administrator	

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Sub Kegiatan Assesment kompetensi SDM Eselon II, III (Tallent Poll)	Jumlah Peserta Assesment Kompetensi SDM Aparatur Eselon II, III	Orang	75	75	Target 238 orang dikarekan adanya pandemi covid 19. menjadi 75 Orang (Recofusing)	Kegiatan ini masih dapat dilaksanakan secara tuntas karena adanya komitmen dari kami dan BKD Provinsi Jawa Timur sebagai mitra dari kegiatan Penilaian Kompetensi Bagi Pejabat Administrator	
				Sub Kegiatan Proses Administrasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah Ijin Belajar dan Tugas Belajar	Orang	100	183	1. Masih adanya keterlambatan dari ASN karena ketidak tahuan tentang persyaratan ijin belajar dan OPD terkait masih belum optimal dalam melakukan sosialisasi aturan ijin belajar dan pengembangan kompetensi melalui jalur Pendidikan	1. Melakukan sosialisasi terus menerus kepada seluruh OPD 2. Mengingatkan kembali OPD agar ASN yang akan kuliah harus sudah merencanakan sebagai kebutuhan pengembangan kompetensi dan melaporkan KHS setiap semester	
				Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi Administrasi	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	Persen	100	100			
				Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan	Surat	12000	12000			
				Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12			
				Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan jasa kebersihan kantor	Jenis	33	33			
				Kegiatan Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	Jumlah Bahan perkantoran yang disediakan selama 1 tahun anggaran	Jenis	50	50			
				Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang diadakan	Jenis	10	10			
				Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	12	12			
				Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tersedianya makanan dan minuman	Orang	75	75			
				Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kali	55	54			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Kegiatan Peringatan Hari - Hari Besar	Jumlah kegiatan peringatan hari-hari besar yang dilaksanakan	Kali	1	0	Tahun 2020 terdapat pandemic yang megakibatkan tidak terlaksananya peringatan hari hari besar seperti sebelumnya		
				Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran	Jumlah layanan Perkantoran yang disediakan	OPD	61	61			
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan gedung Gedung Kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Unit	16	16			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	Jumlah Terpeliharanya Gedung Kantor	Lokasi	2	2			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Unit	13	13			
				Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	10	10			
				Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Persen	100	100			
				Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	7			
				Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan keuangan dan Kinerja	Dokumen Keuang	2	2			
7	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan yang ditindaklanjuti	%	100	100			
				Kegiatan Penyusunan penelitian Daerah	Jumlah Laporan Kajian, Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang disusun	Kajian	2	2			
					Jumlah laporan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi hasil-hasil kajian yang disusun	Laporan	1	1			
					Jumlah Laporan Kegiatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang disusun	Laporan	1	1			
					Jumlah laporan kajian, pengembangan potensi unggulan daerah berbasis IPTEK yang disusun	Laporan	1	1			
					Jumlah laporan Inovasi Teknologi (Inotek) yang disusun	Laporan	1	1			

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kajian yang disusun	Laporan	1	1			

3.2. Kebijakan Strategis yang ditetapkan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bagi seluruh OPD lingkup pemerintah Kabupaten Sumenep, serta acuan bagi stakeholders terkait dalam partisipasi aktif pembangunan melalui spirit “**Sumenep SUPERMANTAP**”.

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Kebijakan Strategis yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Kebijakan Strategis Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2020

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	Meningkatkan daya saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Kelompok (Dinas Koperasi)	Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memprioritaskan pada Penguatan ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan kompetensi dan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Revitalisasi dan renovasi serta penambahan sarana	Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan	Kurangnya bekal keterampilan kerja sebagai dasar

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	prasarana dan peningkatan kualitas SDM dan kuantitas instruktur UPT Balai Latihan Kerja di Kepulauan Desa Pandeman Kecamatan Arjasa serta pendayagunaan Lembaga Pelatihan Swasta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja berbasis kompetensi dan bertaraf internasional adalah: <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana gedung pelatihan di UPT BLK Kepulauan ; • Pengadaan peralatan dan mesin di UPT BLK di Kepulauan; 	Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (“Permenaker 17/2016”) Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)	masyarakat untuk berwira usaha sehingga perlu adanya UPT Balai Latihan Kerja Khususnya di daerah kepulauan.
	Mewujudkan perluasan jejaring informasi lowongan kerja di berbagai media (Dinas Tenaga Kerja)	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja	Kurangnya informasi pengetahuan lowongan kerja yang tersebar di masyarakat yang menyebabkan kurang maksimalnya terserapnya angkatan kerja di masyarakat
3	Peningkatan produksi perikanan mendukung peningkatan ketersediaan pangan dan menumbuh kembangkan usaha perikanan (Dinas Perikanan)	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 06 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021	Arah kebijakan pembangunan Dinas Perikanan diprioritas untuk peningkatan produksi perikanan nelayan kecil dimana peningkatan produksi perikanan dapat meningkatkan perekonomian nelayan dan pembudidaya serta pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat. Selain itu pula didorong dengan pembinaan dan pengembangan usaha perikanan dalam rangka

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			peningkatan pendapatan dan nilai tambah terhadap produk usaha perikanan
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya Optimalisasi pelayanan kesehatan b. Terwujudnya pelayanan unggulan c. Terwujudnya sistem informasi yang terintegrasi (RSUD. Dr. H. Moh. Anwar) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 b. SK Bupati Nomor 188/459/455.013/2011 tentang RSUD Moh Anwar ditetapkan sebagai RS PPK BLUD Penuh 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan b. Terwujudnya tata kelola yang baik
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif b. Meningkatnya Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan Akibat Bencana c. Sinkronisasi perencanaan pengembangan sarana, prasarana, peralatan dan tenaga pada fasilitas kesehatan d. Mengoptimalkan dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Sumenep untuk pemenuhan standar pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan) 	Peraturan Bupati Sumenep No 24 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan
6	Penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah (Dinas PU. Bina Marga)	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2020	Landasan, arah dan prioritas pembangunan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
7	Pengukuhan “Paguyuban Pedagang Ikan Pasar Anom” Pasar Anom Baru Kabupaten Sumenep (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern 2. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep Nomor 523/60/435.112.3/2020 tanggal 25 November 2020 	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk membantu program/ kegiatan Pemkab dalam hal pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran barang pokok berupa ikan dan turunannya, 2. menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan usahanya di Pasar Anom Sumenep 3. mendorong pelaku kegiatan usaha perdagangan ikan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan 4. berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha sesama anggota paguyuban
8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan "Sanksi Keterlambatan Realisasi Anggaran (Peraturan Bupati Nomer 84 Tahun 2020 tentang Sanksi keterlambatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sumenep Pemerintah Kabupaten Sumenep" Peraturan Bupati No. 84 Tahun 2020) 2. Penyusunan Standar Operational Procedure/ SOP Proses Pengadaan Barang dan Jasa 3. Perda SOTK (Draft) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri No. 33 tahun 2019 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Provinsi dan Kabupaten/ Kota 3. Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pembinaan Perangkat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap OPD yang memiliki tingkat penyerapan anggaran yang rendah sehingga diharapkan perhatian dan komitmen untuk merealisasikan anggaran sesuai rencana dapat ditingkatkan 2. Standard Operational Procedure (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa sehingga memberikan

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	(Sekretariat Daerah)	Daerah	<p>guideline proses pengadaan barang dan jasa oleh seluruh OPD di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, OPD memiliki pemahaman tentang alur informasi, kelengkapan yang dibutuhkan dan proses yang pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien</p> <p>3. Evaluasi SOTK sehingga terbentuk SOTK baru yang lebih ramping dan efisien sesuai amanat Permendagri Nomor 90 Tahun 2018</p>
9	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) (Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan)	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Kabupaten Sumenep	<p>1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.</p> <p>2. Meningkatkan akses pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana dan gizi buruk.</p> <p>3. Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan transien, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca</p>

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			bencana dan gizi buruk. 4. Mengatasi gejolak harga pangan yaitu apabila terjadi kenaikan harga pangan pokok (beras) yang ditingkat pasar mencapai 20% atau lebih dari harga normal
10	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat Melaksanakan penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 	Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk menunjang pemberian pelayanan di bidang kebencanaan kepada masyarakat Terlaksananya penanganan bencana secara cepat, tepat, efektif, dan efisien Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi
11	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan dasar PMKS bagi masyarakat kurang mampu Meningkatkan kualitas program pemberdayaan dan perlindungan sosial bagi peningkatan derajat kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS (Dinas Sosial) 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menjamin kebutuhan hidup dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak produktif seperti Penyandang Disabilitas Berat dan Lanjut Usia Terlantar
12	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan pelaksanaan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan Potensi Investasi

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>promosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkankan potensi investasi daerah</p> <p>2. Menciptakan kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan) (Dina PM dan PTSP)</p>	<p>Penanaman Modal</p> <p>2. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal</p>	<p>Daerah</p> <p>2. Mengembangkan teknologi informasi berbasis komunikasi digitalisasi</p> <p>3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian perizinan</p> <p>4. Meningkatkan pembinaan evaluasi PMDN</p>
13	<p>Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah (Inspektorat)</p>	<p>Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/47/KEP/435.013/2020 tentang Program Kerja Pengawasan Berbasis Risiko Pada Inspektorat Tahun Anggaran 2020</p>	<p>Pelaksanaan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah dengan adanya perencanaan pengawasan berbasis risiko dapat dilaksanakan secara terarah dan tepat sasaran</p>
14	<p>Mengembangkan dan mempromosikan pariwisata unggulan dengan arah kebijakan mengembangkan dan mempromosikan potensi pariwisata daerah (Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga)</p>	<p>Rippardakab Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Sumenep</p>	<p>Landasan, arah dan prioritas pembangunan pariwisata dalam rangka perencanaan pembangunan pariwisata daerah yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan</p>
15	<p>1. Kebijakan Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Publikasi Kegiatan DPRD</p> <p>2. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat</p>	<p>1. PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak-hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD</p> <p>2. Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey</p>	<p>1. Fasilitasi Penyerapan Aspirasi Masyarakat terhadap DPRD diperlukan guna menghimpun, mengakomodir dan menindaklanjuti</p>

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Sekretariat DPRD (Sekretariat DPRD)	Kepuasan Masyarakat	<p>penyampaian saran dan pendapat yang disampaikan kepada DPRD Sumenep dalam hal ini Sekretariat DPRD memfasilitasi pertemuan dan dialog antara elemen masyarakat dengan Pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Sumenep</p> <p>2. Penyusunan SKM Sekretariat DPRD ini dibutuhkan dalam rangka mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD</p>
16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik 3. Peraturan Daerah Tentang Pendapatan Asli Daerah Melalui Penarikan Restribusi Menara Telekomunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik 3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penarikan Restribusi Jasa Umum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional 2. Landasan dan arah kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam peningkatan Pembangunan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dalam percepatan pembangunan daerah berbasis elektronik 3. Landasan dan arah kebijakan dalam

NO	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1	2	3	4
			pelaksanaan pembangunan daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah melalui redistribusi menara telekomunikasi
17	Pelayanan Administrasi Kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan penuntasan PRR dan wajib KTP el

3.3. Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran sebelumnya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 19 ayat (1) menyebutkan : “Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”. Dan pasal 20 ayat (2) menyebutkan : “Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam : a) penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; b) penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan c) penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.

Adapun laporan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap hasil rekomendasi DPRD Kabupaten Sumenep yang diberikan pada tahun anggaran 2019 dituangkan dalam format sebagai berikut :

Tabel 3. 6
Tindak lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2019

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
1	DPRD juga mengkritisi soal program wira usaha	Sudah dilakukan koordinasi dengan Rapat Kerja Komisi II agar	Kelemahan-kelemahan pada

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	<p>sumekar. Setelah melakukan pembahasan dengan OPD terkait, ternyata program ini memiliki kelemahan sehingga tidak menghasilkan dampak yang begitu nyata. DPRD merekomendasikan agar sebelum program wira usaha muda dilaksanakan di tahun 2020, hendaknya OPD terkait melakukan koordinasi dan rapat kerja dengan komisi II. (Dinas Koperasi)</p>	<p>pelaksanaan sesuai dengan target menciptakan 1.000 wirausaha muda</p> <p>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</p> <p>Kegiatan Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat</p> <p>Anggaran : Rp. 4.000.000.000</p>	<p>Program Wira Usaha Sumekar, sehingga pada pelaksanaan selanjutnya bisa mencapai target yg telah ditentukan.</p>
2	<p>DPRD juga menginginkan Pemerintah Daerah benar-benar memperhatikan nasib para pekerja informal (tidak formal), yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, seperti nelayan, petani dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan program dari pemerintah daerah yang mampu melindungi kehidupan mereka dan keluarganya. (Dinas Pertanian Tanaman Pangan)</p>	<p>Untuk menindaklanjuti hal tersebut Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep telah melakukan pemberian hibah barang kepada petani secara langsung dan melalui pekerjaan padat karya. Serta juga telah melakukan pembinaan usaha petani dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk sehingga lebih mempunyai nilai jual dan sekaligus meningkatkan pendapatan/penghasilan petani melalui beberapa program kegiatan sebagaimana berikut :</p> <p>1. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 6.091.475.240,- ; dengan rincian kegiatan antara lain :</p> <p>- Pemberdayaan Kelembagaan dan</p>	<p>Nasib pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti nelayan dan petani sehingga mampu melindungi kehidupan mereka dan keluarganya</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		Pengelolaan JUT, Jaringan Irigasi tersier dan pembangunan sumber sumber air (Rp. 761.358.440) - Pengadaan alat mesin pertanian dan penerapan teknologi pertanian (Rp. 2.710.304.000) - Penyediaan Sarana dan Prasarana, Peningkatan Produksi dan Penyuluhan Pertanian (DAK) (Rp. 2.619.812.800) 2. Program Bina Usaha Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 97.004.500,-	
3	DPRD juga menginginkan Pemerintah Daerah benar-benar memperhatikan nasib para pekerja informal (tidak formal), yang tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, seperti nelayan, petani dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan program dari pemerintah daerah yang mampu melindungi kehidupan mereka dan keluarganya. (Dinas Perikanan)	Dinas Perikanan telah melakukan pemberian /hibah sarana dan prasarana penangkapan ikan dan pelatihan kepada nelayan baik dari nada APBD maupun dari dana APBN 1. Kegiatan Sarana dan Prasarana perikanan tangkap sebesar Rp. 2.557.006.266. dengan sub kegiatan : a. Pelatihan dan pengadaan perahu berbahan bahan LPG sebesar Rp. 201.047.000,- b. Pengadaan sarana penangkapan rajungan sebesar Rp. 193.140.550 c. Pengadaan mesin 23-24 PK sebesar Rp. 201.789.500 d. Pengadaan mesin 5-9 PK sebesar Rp. 209.808.600 e. Pengadaan sarana penangkapan udang sebesar Rp. 181.783.200 f. Pengadaan paket perahu fiber sebesar Rp. 200.054.500	Nasib pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap seperti nelayan dan petani sehingga mampu melindungi kehidupan mereka dan keluarganya

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> g. Pengadaan jaring milenium sebesar Rp. 315.422.000 h. Pengadaan mesin 19 PK sebesar Rp. 187.442.000 i. Pengadaan perahu 3 GT sebesar Rp. 199.555.900 j. Pengadaan sarana penangkapan gurita sebesar Rp. 137.682.000 k. Pengadaan paket penangkapan perahu jukung sebesar Rp. 123.682.000 1. Pengadaan paket perahu berkatir dan perahu fiber 7 m 2. Kegiatan penerapan teknologi penangkapan ikan sebesar Rp. 221.620.796 dengan sub kegiatan pengadaan fish finder dan GPS sebesar 221.620.796 3. Kegiatan perikanan tangkap (DAK) sebesar Rp. 504.607.200 dengan sub kegiatan stimulasi perikanan tangkap sebesar Rp. 504.607.200 	
4	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu melakukan tender ulang dengan sangat selektif dimana pemenang tender memiliki kredibilitas tinggi secara finansial dan bertanggung jawab - Semua tahap-tahap pekerjaan fisik dijadwal secara matang dan seksama sehingga tidak lagi ada alasan keterbatasan waktu (Dinas Perhubungan) 	<p>Pembangunan dermaga di Gili Iyang yang tidak selesai di tahun 2019 dilanjutkan kembali di tahun 2020 dengan anggaran sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pagu anggaran Rp. 74.770.444.361 - Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dengan pagu anggaran Rp. 71.076.119.621 - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Dungkek dan Pelabuhan Giliyang dengan 	<p>Pembangunan dermaga di Gili Iyang selesai tepat waktu di tahun 2020</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		pagu anggaran Rp. 48.061.282.831	
5	<p>Para Pelayan kesehatan perlu mengubah mind set (cara berpikir/ paradigma/pola pikir) dan segera menyadari bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang baik adalah semata-mata demi kenyamanan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.</p> <p>(RSUD. Dr. H. Moh. Anwar)</p>	<p>Program Program Peningkatan Kualitas Pelayanan BLUD Rp 95.236.071.014</p> <p>Kegiatan Pelayanan Kesehatan RS BLUD Rp 95.236.071.014</p>	<p>Peningkatan dan Perbaikan kualitas Pelayanan Kesehatan</p>
6	<p>Kita tahu, jika bicara soal pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep, tentu kita semua akan berpikir dan membayangkan sesuatu yang sama. Tetapi bukan berarti kita harus pesimis dan diam saja terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumenep. Tidak banyak yang ingin disampaikan DPRD berkenaan dengan pelayanan kesehatan ini. Hanya saja, DPRD ingin memberikan sedikit masukan yang mungkin bisa dijadikan bahan renungan dan motivasi, bahwa sudah waktunya para pelayan kesehatan di Kabupaten Sumenep itu mengubah mind set (cara berpikir/paradigm/pola</p>	<p>Dalam upaya menjaga mutu pelayanan di Fasilitas Kesehatan/ Puskesmas, Dinas Kesehatan berusaha meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan terhadap tenaga kesehatan dan menurunkan tingkat keluhan masyarakat Sedangkan dari sisi kinerja, kegiatan monitoring evaluasi dilakukan secara berkala terhadap indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan penilaian kinerja</p> <p>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>Kegiatan Akreditasi Puskesmas melalui DAK Non Fisik Rp. 2.601.466.000,-</p>	<p>Perubahan Mind Set dan Peningkatan serta Perbaikan kualitas Pelayanan Kesehatan</p>

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	piker) dan segera menyadari bahwa kualitas pelayanan kesehatan yang baik itu adalah semata-mata demi kenyamanan masyarakat Kabupaten Sumenep secara keseluruhan		
7	Untuk perencanaan dan Infrastruktur agar pekerjaan dijadwal dengan seksama, sehingga nantinya tidak ada lagi karena keterbatasan waktu. Program atau kegiatanyang sempat terputus pelaksanaannya di tahun anggaran 2019, yang rencananya akan dilanjutkan lagi pada tahun anggaran 2020, ditekankan pada seluruh OPD agar melakukan tender ulang dengan sangat selektif melalui cara-cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menyertakan syarat-syarat yang benar-benar mengikat sehingga pada akhirnya menghasilkan pemenang / rekanan yang memiliki kredibilitas tinggi secara finansial maupun tanggung jawab dalam melaksanakan program atau kegiatan yang dimenangkan (Dinas PU.	Pelaksanaan penyediaan pelayanan masyarakat urusan kebinamargaan yang dilaksanakan secara tepat waktu dengan memulai perencanaan tehnik ditahun anggaran sebelumnya dan melaksanakan tender pekerjaan diawal tahun anggaran, agar pekerjaan konstruksi dapat dilaksanakan lebih cepat. dan untuk menjamin hasil pekerjaan sesuai dengan rencana maka dilakukan beberapa jenis uji laboratorium 1. Program Pembangunan Jalan Rp. 102.334.438.415,05 - Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Daratan: Rp.54.783.750.464,10 - Pembangunan / Peningkatan Jalan di Wilayah Kepulauan: Rp. 21.969.062.097,25 - Peningkatan Jalan DAK di Wilayah Daratan Rp. 25.581.625.853,70 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Rp. 21.179.327.067,65 - Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Daratan Rp. 7.717.110.867,80	Tersusunnya perencanaan yang baik sehingga Pekerjaan yang dikerjakan nantinya tidak putus kontrak.

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	Bina Marga)	- Pemeliharaan Berkala Jalan di Wilayah Kepulauan Rp.13.462.216.199,85	
8	Pekerjaan fisik yang tidak terselesaikan di tahun 2019 adalah Pembangunan Pasar Batuan (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	<p>Pada tahun 2019 Kegiatan Pembangunan Pasar Batuan tidak dapat direalisasikan yang disebabkan oleh adanya perubahan pada sumber pendanaan dari APBD ke pendanaan Tugas Pembantuan (TP) dari Kemendag. Akan tetapi proses untuk mendapatkan anggaran tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga sampai awal triwulan IV belum bisa dilakukan proses lelang sehingga dikhawatirkan pekerjaan akan putus kontrak. Pada tahun 2020 Disperindag melakukan penyelesaian fisik pagar lahan pasar untuk meminimalisir penggunaan lahan dan klaim dari pihak lain. Disperindag berkomitmen untuk tetap bisa melakukan pembangunan Pasar Batuan sebagai pasar alternatif dan pendukung Pasar Anom yang saat ini sudah overload</p> <p>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kegiatan Pemanfaatan dan Pengelolaan Pasar Daerah Sub Kegiatan Pembangunan Gudang Bongkar Muat Pasar Batuan Rp. 521.695.910,00</p>	Tersusunnya perencanaan yang baik sehingga Pekerjaan yang dikerjakan nantinya tidak putus kontrak.
9	Melakukan pendataan masyarakat tidak mampu yang sungguh-sungguh dan tidak hanya	Dinas Sosial Kab. Sumenep bekerjasama dengan BAPPEDA Kab. Sumenep dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	menunggu atau menerima laporan dari orang (Dinas Sosial)	Kabupaten Sumenep sudah melakukan pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) / Data kemiskinan yang dirilis oleh Pemerintah Pusat dengan data kependudukan sehingga validitas data bisa meningkat	Sosial (DTKS) / Data kemiskinan sehingga meminimalisir inclusion error
10	Berkenaan dengan Pembangunan Rumah Sakit Arjasa yang tidak dapat terselesaikan di TA. 2019, DPRD menyimpulkan bahwa perencanaan yang dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal. (Dinas PU Perumahan Rakyat dan Cipta Karya)	Pembangunan Rumah Sakit Arjasa dapat diselesaikan pada TA. 2020, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumenep mendapatkan hasil yang optimal. Program Penataan Bangunan Gedung Rp 53.727.435.747,71 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rp 52.115.238.632,12 Sub Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Gedung Rp 50.874.526.332,12	Penyelesaian pembangunan RS Arjasa
11	Belum maksimalnya perolehan pendapatan seperti yang terjadi pada tahun – tahun sebelumnya. PAD diharapkan mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 15 % (Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga)	Penurunan PAD di sector pariwisata pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sanagt signifikan. Hal ini disebabkan Karena adanya pandemic covid 19 yang mengakibatkan penutupan obyek – obyek wisata yang ada di kabupaten sumenep. Diharapkan tahun 2021 pandemi covid segera berakhir dan target PAD sector pariwisata dapat tercapai. Dalam rangka pencapaian , Disparbudpora melakukan kegiatan – kegiatan dalam rangka	Peningkatan PAD sektor pariwisata

NO	Rekomendasi DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		mendukung pencapaian target PAD diantaranya melakukan kegiatan Operasional UPTD Museum Keraton sebesar dan Operasional UPTD obyek wisata	
12	Pendapatan Asli Daerah (PAD) banyak peluang dan potensi yang disediakan Kabupaten Sumenep, hanya saja Pemerintah Daerah tidak mau memanfaatkannya dan memilih menggarap sumber-sumber PAD berupa pajak , retribusi, bagi hasil dan pernyataan modal yang tidak produktif (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	Kabupaten Sumenep telah melakukan inovasi dalam peningkatan pelayanan transparansi pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PAD diantaranya : 1. Bekerjasama dengan Pusdatin BPN Pusat dan Bank Jatim berkenaan dengan optimalisasi dan transparansi pengelolaan Pajak BPHTP dengan menggunakan online Sistem (E-BPHTB) 2. Menerapkan/menempatkan Billy Sistem terhadap Hotel dan Restoran dalam rangka optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran.	Pencapaian target PAD yang telah ditetapkan
13	Perlu melakukan inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah di Kabupaten Sumenep semakin baik (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penarikan retribusi menara telekomunikasi. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penarikan Restribusi Jasa Umum. Program Pengelolaan dan pemanfaatan informasi dengan Media Massa Rp. 1.942.030.975 Kegiatan Survey Pengawasan Menara Telekomunikasi (BTS) Tower Rp. 30.940.975	Peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui penarikan retribusi menara telekomunikasi. Perlu adanya inovasi daerah dalam upaya peningkatan PAD

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN
PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Penyelenggaraan tugas pembantuan ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau

kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum sedangkan Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Sebagai konsekuensi penyelenggaraan tugas pembantuan ini, pemerintah pusat sebagai pemberi tugas mengalokasikan anggaran serta pedoman pelaksanaannya dari masing-masing Kementerian/Lembaga melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Bendahara Umum Negara) berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada Satuan Kerja (Satker) Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di daerah, demikian pula pemerintah daerah berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaannya kepada pemberi tugas pembantuan.

Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

- Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diterima dari Pemerintah Tingkat di atasnya

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2020 menerima tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi pada bidang urusan kelautan dan perikanan dan urusan pertanian sebagai berikut :

1. Untuk ***urusan bidang kelautan dan perikanan*** Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 menerima pelimpahan sebagian kewenangannya dalam bentuk tugas pembantuan melalui Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk Program Pengelolaan Ruang Laut dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.024.900.000,00 (*satu milyar dua puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan produksi garam masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Madura, khususnya Kabupaten Sumenep sebagai salah satu penghasil garam nasional.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 1
Alokasi dan realisasi anggaran Pelaksanaan Program urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Perikanan	Pengelolaan Ruang Laut	1.024.900.000	848.325.952	82,77	SPDIPA Nomor : SP.DIPA-032.07.4.059496 /2020
Total			1.024.900.000	848.325.952	82,77	

2. **Urusan bidang Pertanian**, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep untuk pelaksanaan program ; 1) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian, 2) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah, dan 3) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 2.374.665.000,00 (*dua milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

Alokasi anggaran ini diperuntukkan untuk peningkatan infrastruktur pertanian, peningkatan produksi jagung dengan memberikan benih dan menambah produksi serta nilai tambah bawang merah dengan memberikan benih bawang merah berkualitas kepada masyarakat.

Alokasi anggaran serta realisasi Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Alokasi dan realisasi anggaran Pelaksanaan Program Urusan Pertanian
Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYE RAPAN (%)	DASAR HUKUM
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Pertahortbun	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan sarana pertanian	1.990.440.000	1.844.466.000	92,67	SP.DIPA 018.08.4.059 185/2019
2	Dinas Pertahortbun	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah	144.250.000	144.072.000	99.87	SP.DIPA 018.04.4.059 179/2020 tgl. 19 Juni 2020
3	Dinas Pertahortbun	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	239.975.000	227.275.000	94,71	SP.DIPA 018.03.4.059 178/2019
Total			2.374.665.000	2.215.813.000	93,48	

4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Pemerintah Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2020 memberikan tugas pembantuan kepada Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui program Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebagai upaya memberikan motivasi kepada desa untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

1. Dana Desa

Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Sumenep diperuntukkan untuk 27 Kecamatan atau 330 Pemerintah Desa yang tersebar di wilayah

daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke (Rekening Kas Desa).

Alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp. 337.720.100.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 337.720.100.000,00 dengan output kegiatan berupa pembangunan di desa meliputi pembangunan Jalan Pemukiman, Jembatan Desa, dan pembangunan lain, serta Tersalurnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA. 2020.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/PMK.072020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 156/PMK.072020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.072019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 50/PMK.072020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 205/PMK.072020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- d. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- e. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/437/KEP/435.013/2020 Perubahan atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/536/KEP/435.012/2019 tentang Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Alokasi anggaran serta realisasi Dana Desa yang diterima Pemerintah Kabupaten Sumenep, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Alokasi dan realisasi anggaran Dana Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
27 Kecamatan / 330 Pemerintah Desa	37.720.100.000,00	37.720.100.000,00	-
1. Kecamatan Kota	10.073.109.000,00	10.073.109.000,00	-
1. Kolor	989.954.000,00	989.954.000,00	-
2. Pabian	830.363.000,00	830.363.000,00	-
3. Marengan Daya	743.753.000,00	743.753.000,00	-
4. Kacongan	798.882.000,00	798.882.000,00	-
5. Paberasan	814.369.000,00	814.369.000,00	-
6. Parsanga	825.198.000,00	825.198.000,00	-
7. Bangkal	754.366.000,00	754.366.000,00	-
8. Kebunan	949.606.000,00	949.606.000,00	-
9. Pamolokan	867.828.000,00	867.828.000,00	-
10. Pangarangan	788.591.000,00	788.591.000,00	-
11. Pandian	792.844.000,00	792.844.000,00	-
12. Kebonagung	917.355.000,00	917.355.000,00	-
2. Kecamatan Kalianget	6.579.579.000,00	6.579.579.000,00	-
1. Pinggirpapas	924.864.000,00	924.864.000,00	-
2. Karanganyar	849.490.000,00	849.490.000,00	-
3. Marengan Laok	1.094.922.000,00	1.094.922.000,00	-
4. Kertasada	786.795.000,00	786.795.000,00	-
5. Kalimo'ok	914.198.000,00	914.198.000,00	-
6. Kalianget Barat	1.037.874.000,00	1.037.874.000,00	-
7. Kalianget Timur	971.436.000,00	971.436.000,00	-
3. Kecamatan Manding	10.548.291.000,00	10.548.291.000,00	-
1. Kasengan	854.983.000,00	854.983.000,00	-
2. Lalangon	794.447.000,00	794.447.000,00	-
3. Tenunan	1.118.272.000,00	1.118.272.000,00	-
4. Lanjuk	1.102.077.000,00	1.102.077.000,00	-
5. Gadding	1.272.762.000,00	1.272.762.000,00	-
6. Giring	906.895.000,00	906.895.000,00	-
7. Gunung Kembar	837.604.000,00	837.604.000,00	-
8. Jabaan	807.662.000,00	807.662.000,00	-
9. Manding Laok	839.725.000,00	839.725.000,00	-
10. Manding Timur	1.004.313.000,00	1.004.313.000,00	-
11. Manding Daya	1.009.551.000,00	1.009.551.000,00	-
4. Kecamatan Talango	8.386.145.000,00	8.386.145.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
1. Talango	965.209.000,00	965.209.000,00	-
2. Padike	1.052.267.000,00	1.052.267.000,00	-
3. Cabbiya	954.303.000,00	954.303.000,00	-
4. Essang	1.063.384.000,00	1.063.384.000,00	-
5. Kombang	1.058.667.000,00	1.058.667.000,00	-
6. Poteran	1.059.649.000,00	1.059.649.000,00	-
7. Palasa	1.049.342.000,00	1.049.342.000,00	-
8. Gapurana	1.183.324.000,00	1.183.324.000,00	-
5. Kecamatan Bluto	19.959.530.000,00	19.959.530.000,00	-
1. Guluk Manjung	901.750.000,00	901.750.000,00	-
2. Kapedi	1.503.451.000,00	1.503.451.000,00	-
3. Pakandangan Barat	1.041.964.000,00	1.041.964.000,00	-
4. Pakandangan Tengah	1.093.235.000,00	1.093.235.000,00	-
5. Pakandangan Sangrah	1.213.638.000,00	1.213.638.000,00	-
6. Aengdake	1.017.245.000,00	1.017.245.000,00	-
7. Aengbeje Kenek	1.294.763.000,00	1.294.763.000,00	-
8. Bluto	939.400.000,00	939.400.000,00	-
9. Lobuk	960.030.000,00	960.030.000,00	-
10. Bumbungan	969.120.000,00	969.120.000,00	-
11. Masaran	915.225.000,00	915.225.000,00	-
12. Palongan	1.081.634.000,00	1.081.634.000,00	-
13. Aengbaja Raje	812.832.000,00	812.832.000,00	-
14. Karang Campaka	979.446.000,00	979.446.000,00	-
15. Sera Barat	909.223.000,00	909.223.000,00	-
16. Sera Tengah	803.096.000,00	803.096.000,00	-
17. Sera Timur	980.276.000,00	980.276.000,00	-
18. Gingging	922.443.000,00	922.443.000,00	-
19. Errabu	811.191.000,00	811.191.000,00	-
20. Gilang	809.568.000,00	809.568.000,00	-
6. Kecamatan Saronggi	13.098.965.000,00	13.098.965.000,00	-
1. Pagarbatu	1.078.328.000,00	1.078.328.000,00	-
2. Tanjung	1.048.438.000,00	1.048.438.000,00	-
3. Kebundadap Timur	934.774.000,00	934.774.000,00	-
4. Langsar	925.087.000,00	925.087.000,00	-
5. Kebundadap Barat	779.200.000,00	779.200.000,00	-
6. Saroka	787.005.000,00	787.005.000,00	-
7. Tanamerah	1.012.645.000,00	1.012.645.000,00	-
8. Nambakor	1.090.773.000,00	1.090.773.000,00	-
9. Saronggi	864.549.000,00	864.549.000,00	-
10. Muangan	849.910.000,00	849.910.000,00	-
11. Juluk	894.943.000,00	894.943.000,00	-
12. Aeng Tongtong	883.218.000,00	883.218.000,00	-
13. Talang	1.130.976.000,00	1.130.976.000,00	-
14. Kambingan Timur	819.119.000,00	819.119.000,00	-
7. Kecamatan Lenteng	19.778.469.000,00	19.778.469.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
1. Moncek Barat	1.039.642.000,00	1.039.642.000,00	-
2. Moncek Tengah	928.026.000,00	928.026.000,00	-
3. Moncek Timur	1.011.877.000,00	1.011.877.000,00	-
4. Banarassep Timur	1.341.755.000,00	1.341.755.000,00	-
5. Tarogan	803.681.000,00	803.681.000,00	-
6. Kambangan Barat	1.007.871.000,00	1.007.871.000,00	-
7. Poreh	1.087.052.000,00	1.087.052.000,00	-
8. Lenteng Timur	887.799.000,00	887.799.000,00	-
9. Lembung Timur	1.171.641.000,00	1.171.641.000,00	-
10. Lenteng Barat	1.277.847.000,00	1.277.847.000,00	-
11. Banarassep Barat	879.451.000,00	879.451.000,00	-
12. Billapora Rebba	1.134.437.000,00	1.134.437.000,00	-
13. Lembung Barat	898.631.000,00	898.631.000,00	-
14. Ellak Laok	884.156.000,00	884.156.000,00	-
15. Ellak Daya	897.372.000,00	897.372.000,00	-
16. Daramista	812.158.000,00	812.158.000,00	-
17. Jambu	770.711.000,00	770.711.000,00	-
18. Cangkreng	1.039.740.000,00	1.039.740.000,00	-
19. Meddelan	1.117.240.000,00	1.117.240.000,00	-
20. Sendir	787.382.000,00	787.382.000,00	-
8. Kecamatan Giligenting	7.752.296.000,00	7.752.296.000,00	-
1. Galis	1.167.685.000,00	1.167.685.000,00	-
2. Gedugan	1.011.848.000,00	1.011.848.000,00	-
3. Bringsang	870.806.000,00	870.806.000,00	-
4. Aeng Anyar	951.419.000,00	951.419.000,00	-
5. Lombang	1.066.291.000,00	1.066.291.000,00	-
6. Jate	947.159.000,00	947.159.000,00	-
7. Banbaru	850.550.000,00	850.550.000,00	-
8. Banmaleng	886.538.000,00	886.538.000,00	-
9. Kecamatan Guluk-Guluk	16.055.644.000,00	16.055.644.000,00	-
1. Bakeong	1.532.866.000,00	1.532.866.000,00	-
2. Payudan Dundang	1.359.089.000,00	1.359.089.000,00	-
3. Pordapor	1.250.308.000,00	1.250.308.000,00	-
4. Guluk-Guluk	1.745.426.000,00	1.745.426.000,00	-
5. Ketawang Laok	1.142.954.000,00	1.142.954.000,00	-
6. Pananggungan	828.156.000,00	828.156.000,00	-
7. Bragung	1.529.739.000,00	1.529.739.000,00	-
8. Tambuko	1.208.895.000,00	1.208.895.000,00	-
9. Payudan Nangger	1.202.524.000,00	1.202.524.000,00	-
10. Payudan Daleman	1.348.113.000,00	1.348.113.000,00	-
11. Payudan Karang Sokon	1.241.712.000,00	1.241.712.000,00	-
12. Batuampar	1.665.862.000,00	1.665.862.000,00	-
10. Kecamatan Ganding	13.589.067.000,00	13.589.067.000,00	-
1. Bataal Barat	837.396.000,00	837.396.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
2. Bataal Timur	804.451.000,00	804.451.000,00	-
3. Rombiya Barat	911.898.000,00	911.898.000,00	-
4. Rombiya Timur	1.089.903.000,00	1.089.903.000,00	-
5. Talaga	946.801.000,00	946.801.000,00	-
6. Billapora Barat	1.037.838.000,00	1.037.838.000,00	-
7. Billapora Timur	1.048.962.000,00	1.048.962.000,00	-
8. Ganding	1.122.471.000,00	1.122.471.000,00	-
9. Gadu Timur	989.184.000,00	989.184.000,00	-
10. Gadu Barat	1.119.586.000,00	1.119.586.000,00	-
11. Ketawang Larangan	955.341.000,00	955.341.000,00	-
12. Ketawang Parebaan	799.905.000,00	799.905.000,00	-
13. Ketawang Daleman	972.458.000,00	972.458.000,00	-
14. Ketawang Karay	952.873.000,00	952.873.000,00	-
11. Kecamatan Pragaan	15.155.046.000,00	15.155.046.000,00	-
1. Kaduara Timur	989.315.000,00	989.315.000,00	-
2. Sendang	824.955.000,00	824.955.000,00	-
3. Rombasan	791.766.000,00	791.766.000,00	-
4. Sentol Laok	815.861.000,00	815.861.000,00	-
5. Larangan Perreng	1.036.985.000,00	1.036.985.000,00	-
6. Sentol Daya	1.240.546.000,00	1.240.546.000,00	-
7. Pakamban Daya	1.081.867.000,00	1.081.867.000,00	-
8. Pakamban Laok	899.761.000,00	899.761.000,00	-
9. Jaddung	1.365.045.000,00	1.365.045.000,00	-
10. Pragaan Laok	1.203.931.000,00	1.203.931.000,00	-
11. Pragaan Daya	1.482.466.000,00	1.482.466.000,00	-
12. Prenduan	1.059.482.000,00	1.059.482.000,00	-
13. Aengpanas	983.111.000,00	983.111.000,00	-
14. Karduluk	1.379.955.000,00	1.379.955.000,00	-
12. Kecamatan Ambunten	15.288.486.000,00	15.288.486.000,00	-
1. Ambunten Barat	1.159.065.000,00	1.159.065.000,00	-
2. Ambunten Tengah	1.123.121.000,00	1.123.121.000,00	-
3. Ambunten Timur	884.428.000,00	884.428.000,00	-
4. Tambaagung Barat	1.148.881.000,00	1.148.881.000,00	-
5. Tambaagung Tengah	1.139.172.000,00	1.139.172.000,00	-
6. Tambaagung Ares	1.290.074.000,00	1.290.074.000,00	-
7. Sogian	1.078.130.000,00	1.078.130.000,00	-
8. Tambaagung Timur	1.101.408.000,00	1.101.408.000,00	-
9. Bukabu	817.921.000,00	817.921.000,00	-
10. Campor Barat	791.140.000,00	791.140.000,00	-
11. Keles	1.124.222.000,00	1.124.222.000,00	-
12. Campor Timur	778.824.000,00	778.824.000,00	-
13. Belluk Ares	856.830.000,00	856.830.000,00	-
14. Belluk Kenek	1.092.038.000,00	1.092.038.000,00	-
15. Belluk Raja	903.232.000,00	903.232.000,00	-
13. Kecamatan Pasongsongan	12.786.838.000,00	12.786.838.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
1. Montorna	1.635.988.000,00	1.635.988.000,00	-
2. Prancak	1.716.465.000,00	1.716.465.000,00	-
3. Campaka	1.449.474.000,00	1.449.474.000,00	-
4. Rajun	1.156.255.000,00	1.156.255.000,00	-
5. Lebbeng Timur	1.286.086.000,00	1.286.086.000,00	-
6. Lebbeng Barat	1.303.397.000,00	1.303.397.000,00	-
7. Soddara	1.245.320.000,00	1.245.320.000,00	-
8. Pasongsongan	1.178.115.000,00	1.178.115.000,00	-
9. Padangdangan	878.175.000,00	878.175.000,00	-
10. Panaongan	937.563.000,00	937.563.000,00	-
14. Kecamatan Dasuk	14.485.921.000,00	14.485.921.000,00	-
1. Slopeng	925.252.000,00	925.252.000,00	-
2. Semaan	968.028.000,00	968.028.000,00	-
3. Batubelah Barat	1.085.916.000,00	1.085.916.000,00	-
4. Batubelah Timur	844.580.000,00	844.580.000,00	-
5. Kecer	1.087.745.000,00	1.087.745.000,00	-
6. Bates	989.371.000,00	989.371.000,00	-
7. Bringin	1.119.877.000,00	1.119.877.000,00	-
8. Jelbudan	1.105.591.000,00	1.105.591.000,00	-
9. Kerta Barat	765.106.000,00	765.106.000,00	-
10. Kerta Timur	828.708.000,00	828.708.000,00	-
11. Nyapar	876.788.000,00	876.788.000,00	-
12. Dasuk Barat	976.890.000,00	976.890.000,00	-
13. Dasuk Timur	955.402.000,00	955.402.000,00	-
14. Dasuk Laok	1.039.674.000,00	1.039.674.000,00	-
15. Mantajun	916.993.000,00	916.993.000,00	-
15. Kecamatan Rubaru	12.284.958.000,00	12.284.958.000,00	-
1. Mandala	1.484.418.000,00	1.484.418.000,00	-
2. Pakondang	1.199.498.000,00	1.199.498.000,00	-
3. Matanair	1.137.657.000,00	1.137.657.000,00	-
4. Tambaksari	1.005.932.000,00	1.005.932.000,00	-
5. Banasareh	965.261.000,00	965.261.000,00	-
6. Bunbarat	951.040.000,00	951.040.000,00	-
7. Karangnangka	1.169.114.000,00	1.169.114.000,00	-
8. Basoka	1.254.878.000,00	1.254.878.000,00	-
9. Duko	870.617.000,00	870.617.000,00	-
10. Rubaru	1.098.917.000,00	1.098.917.000,00	-
11. Kalebbengan	1.147.626.000,00	1.147.626.000,00	-
16. Kecamatan Batang-Batang	16.835.207.000,00	16.835.207.000,00	-
1. Kolpo	1.082.675.000,00	1.082.675.000,00	-
2. Tamidung	1.185.879.000,00	1.185.879.000,00	-
3. Batang Batang Laok	991.493.000,00	991.493.000,00	-
4. Batang Batang Daya	1.257.549.000,00	1.257.549.000,00	-
5. Totosan	896.940.000,00	896.940.000,00	-
6. Banuaju Barat	948.033.000,00	948.033.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
7. Banuaju Timur	851.879.000,00	851.879.000,00	-
8. Jananger	1.142.362.000,00	1.142.362.000,00	-
9. Nyabakan Timur	1.140.779.000,00	1.140.779.000,00	-
10. Nyabakan Barat	1.452.226.000,00	1.452.226.000,00	-
11. Jangkong	925.729.000,00	925.729.000,00	-
12. Legung Barat	1.090.218.000,00	1.090.218.000,00	-
13. Legung Timur	920.679.000,00	920.679.000,00	-
14. Dapenda	1.247.883.000,00	1.247.883.000,00	-
15. Bilangan	822.296.000,00	822.296.000,00	-
16. Lombang	878.587.000,00	878.587.000,00	-
17. Kecamatan Batuputih	14.481.874.000,00	14.481.874.000,00	-
1. Aengmerah	1.119.128.000,00	1.119.128.000,00	-
2. Tenedan	845.563.000,00	845.563.000,00	-
3. Juruan Laok	1.059.483.000,00	1.059.483.000,00	-
4. Juruan Daya	1.018.267.000,00	1.018.267.000,00	-
5. Badur	1.062.823.000,00	1.062.823.000,00	-
6. Gedang Gedang	1.037.559.000,00	1.037.559.000,00	-
7. Batuputih Kenek	884.288.000,00	884.288.000,00	-
8. Batuputih Laok	912.012.000,00	912.012.000,00	-
9. Batuputih Daya	954.684.000,00	954.684.000,00	-
10. Bantelan	951.617.000,00	951.617.000,00	-
11. Larangan Barma	1.355.330.000,00	1.355.330.000,00	-
12. Larangan Kerta	845.176.000,00	845.176.000,00	-
13. Bulla'an	1.331.795.000,00	1.331.795.000,00	-
14. Sergang	1.104.149.000,00	1.104.149.000,00	-
18. Kecamatan Dungkek	12.948.352.000,00	12.948.352.000,00	-
1. Candi	835.125.000,00	835.125.000,00	-
2. Jadung	870.938.000,00	870.938.000,00	-
3. Romben Barat	895.554.000,00	895.554.000,00	-
4. Romben Rana	770.725.000,00	770.725.000,00	-
5. Romben Guna	1.038.164.000,00	1.038.164.000,00	-
6. Tamansare	840.142.000,00	840.142.000,00	-
7. Bicabi	825.176.000,00	825.176.000,00	-
8. Dungkek	994.064.000,00	994.064.000,00	-
9. Bunpenang	806.211.000,00	806.211.000,00	-
10. Bungin Bungin	801.849.000,00	801.849.000,00	-
11. Lapa Taman	905.863.000,00	905.863.000,00	-
12. Lapa Laok	856.378.000,00	856.378.000,00	-
13. Lapa Daya	816.373.000,00	816.373.000,00	-
14. Bancamara	840.549.000,00	840.549.000,00	-
15. Banra'as	851.241.000,00	851.241.000,00	-
19. Kecamatan Gapura	14.318.790.000,00	14.318.790.000,00	-
1. Grujugan	860.924.000,00	860.924.000,00	-
2. Longos	991.636.000,00	991.636.000,00	-
3. Andulang	868.854.000,00	868.854.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
4. Gapura Timur	834.886.000,00	834.886.000,00	-
5. Mandala	754.725.000,00	754.725.000,00	-
6. Gersik Putih	828.465.000,00	828.465.000,00	-
7. Gapura Tengah	832.899.000,00	832.899.000,00	-
8. Gapura Barat	853.835.000,00	853.835.000,00	-
9. Panagan	792.451.000,00	792.451.000,00	-
10. Paloklo'an	885.543.000,00	885.543.000,00	-
11. Banjar Timur	781.672.000,00	781.672.000,00	-
12. Banjar Barat	890.911.000,00	890.911.000,00	-
13. Batudinding	824.302.000,00	824.302.000,00	-
14. Baban	796.948.000,00	796.948.000,00	-
15. Karangbuddi	900.370.000,00	900.370.000,00	-
16. Braji	799.264.000,00	799.264.000,00	-
17. Poja	821.105.000,00	821.105.000,00	-
20. Kecamatan Gayam	11.164.322.000,00	11.164.322.000,00	-
1. Pancor	1.253.520.000,00	1.253.520.000,00	-
2. Prambanan	1.329.540.000,00	1.329.540.000,00	-
3. Gendang Timur	1.169.043.000,00	1.169.043.000,00	-
4. Gendang Tengah	881.920.000,00	881.920.000,00	-
5. Jambuir	945.332.000,00	945.332.000,00	-
6. Gayam	1.031.277.000,00	1.031.277.000,00	-
7. Kalowang	1.195.105.000,00	1.195.105.000,00	-
8. Nyamplong	850.971.000,00	850.971.000,00	-
9. Gendang Barat	1.337.171.000,00	1.337.171.000,00	-
10. Tarebung	1.170.443.000,00	1.170.443.000,00	-
21. Kecamatan Nonggunong	7.198.129.000,00	7.198.129.000,00	-
1. Nonggunong	866.933.000,00	866.933.000,00	-
2. Sumber	820.589.000,00	820.589.000,00	-
3. Tanahmerah	840.022.000,00	840.022.000,00	-
4. Sokaramme Timur	1.102.694.000,00	1.102.694.000,00	-
5. Sokaramme Paseser	990.621.000,00	990.621.000,00	-
6. Talaga	840.710.000,00	840.710.000,00	-
7. Rosong	832.284.000,00	832.284.000,00	-
8. Sonok	904.276.000,00	904.276.000,00	-
22. Kecamatan Ra'as	9.515.208.000,00	9.515.208.000,00	-
1. Ketupat	1.057.686.000,00	1.057.686.000,00	-
2. Jungkat	865.170.000,00	865.170.000,00	-
3. Kropoh	1.104.942.000,00	1.104.942.000,00	-
4. Karangnangka	977.010.000,00	977.010.000,00	-
5. Alasmalang	1.024.130.000,00	1.024.130.000,00	-
6. Poteran	1.066.284.000,00	1.066.284.000,00	-
7. Brakas	945.843.000,00	945.843.000,00	-
8. Tonduk	1.578.575.000,00	1.578.575.000,00	-
9. Gua Gua	895.568.000,00	895.568.000,00	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4	
23	Kecamatan Masalembu	4.407.825.000,00	4.407.825.000,00	-
1.	Sukajeruk	1.272.786.000,00	1.272.786.000,00	-
2.	Masalima	1.340.630.000,00	1.340.630.000,00	-
3.	Masakambing	877.991.000,00	877.991.000,00	-
4.	Kramian	916.418.000,00	916.418.000,00	-
24.	Kecamatan Arjasa	20.567.368.000,00	20.567.368.000,00	-
1.	Pajanangger	1.418.259.000,00	1.418.259.000,00	-
2.	Sawah Sumur	1.288.800.000,00	1.288.800.000,00	-
3.	Paseraman	1.332.661.000,00	1.332.661.000,00	-
4.	Gelaman	1.509.553.000,00	1.509.553.000,00	-
5.	Buddi	1.503.050.000,00	1.503.050.000,00	-
6.	Kolo Kolo	1.446.315.000,00	1.446.315.000,00	-
7.	Angkatan	1.135.818.000,00	1.135.818.000,00	-
8.	Kalisangka	892.099.000,00	892.099.000,00	-
9.	Bilis Bilis	1.112.439.000,00	1.112.439.000,00	-
10.	Laok Jangjang	863.192.000,00	863.192.000,00	-
11.	Sumberangka	812.364.000,00	812.364.000,00	-
12.	Duko	947.127.000,00	947.127.000,00	-
13.	Kalikatak	835.683.000,00	835.683.000,00	-
14.	Arjasa	914.721.000,00	914.721.000,00	-
15.	Kalinganyar	876.679.000,00	876.679.000,00	-
16.	Angon Angon	1.107.874.000,00	1.107.874.000,00	-
17.	Sambakati	900.895.000,00	900.895.000,00	-
18.	Pandeman	864.000.000,00	864.000.000,00	-
19.	Pabian	805.839.000,00	805.839.000,00	-
25.	Kecamatan Sapeken	14.959.321.000,00	14.959.321.000,00	-
1.	Sepanjang	1.862.827.000,00	1.862.827.000,00	-
2.	Tanjung Kiaok	1.117.452.000,00	1.117.452.000,00	-
3.	Sakala	1.243.812.000,00	1.243.812.000,00	-
4.	Pagerungan Besar	1.121.503.000,00	1.121.503.000,00	-
5.	Pagerungan Kecil	1.306.047.000,00	1.306.047.000,00	-
6.	Saseel	1.383.746.000,00	1.383.746.000,00	-
7.	Sapeken	1.567.230.000,00	1.567.230.000,00	-
8.	Sabuntan	1.415.835.000,00	1.415.835.000,00	-
9.	Paleat	1.524.943.000,00	1.524.943.000,00	-
10.	Sadulang	1.199.411.000,00	1.199.411.000,00	-
11.	Saur Saebus	1.216.515.000,00	1.216.515.000,00	-
26	Kecamatan Batuan	5.558.342.000,00	5.558.342.000,00	-
1.	Patean	776.979.000,00	776.979.000,00	-
2.	Babbalan	791.699.000,00	791.699.000,00	-
3.	Gedungan	742.385.000,00	742.385.000,00	-
4.	Gunggung	813.576.000,00	813.576.000,00	-
5.	Batuan	895.731.000,00	895.731.000,00	-
6.	Torbang	770.003.000,00	770.003.000,00	-
7.	Gelugur	767.969.000,00	767.969.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
27. Kecamatan Kangayan	9.943.018.000,00	9.943.018.000,00	-
1. Saobi	1.237.021.000,00	1.237.021.000,00	-
2. Kangayan	1.372.845.000,00	1.372.845.000,00	-
3. Torjek	1.327.488.000,00	1.327.488.000,00	-
4. Cangkramaan	930.608.000,00	930.608.000,00	-
5. Tembayangan	909.097.000,00	909.097.000,00	-
6. Batuputih	969.148.000,00	969.148.000,00	-
7. Daandung	1.025.124.000,00	1.025.124.000,00	-
8. Timur Jangjang	986.554.000,00	986.554.000,00	-
9. Jukong Jukong	1.185.133.000,00	1.185.133.000,00	-

2. Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep diperuntukkan untuk 27 Kecamatan atau 330 Pemerintah Desa yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan dengan mekanisme melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke (Rekening Kas Desa).

Alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep sebesar Rp. 142.640.650.080,00 dan terealisasi sebesar Rp. 142.640.650.080,00 dengan output kegiatan berupa Terbayarnya Siltap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD, Tercapaiannya Pembangunan di Desa, Jalan Pemukiman, Jembatan Desa, Tersalurnya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2020.

Pelaksanaan dan penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sumenep didasarkan pada peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2020.
- b. Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/450/KEP/435.013/ 2020 Perubahan atas Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/537/KEP/435.012/2019 tentang Pagu Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Alokasi anggaran serta realisasi Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Sumenep kepada Pemerintah Desa, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4. 4
Alokasi dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2020

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
27 Kecamatan / 330 Pemerintah Desa	142.640.650.080,00	142.640.650.080,00	-
1. Kecamatan Kota	4.658.626.280,00	4.658.626.280,00	-
1. Kolor	426.943.120,00	426.943.120,00	-
2. Pabian	402.676.720,00	402.676.720,00	-
3. Marengan Daya	383.476.720,00	383.476.720,00	-
4. Kacongan	373.876.720,00	373.876.720,00	-
5. Paberasan	402.676.720,00	402.676.720,00	-
6. Parsanga	390.396.000,00	390.396.000,00	-
7. Bangkal	359.210.320,00	359.210.320,00	-
8. Kebunan	360.005.000,00	360.005.000,00	-
9. Pamolokan	443.334.000,00	443.334.000,00	-
10. Pangarangan	378.410.320,00	378.410.320,00	-
11. Pandian	378.410.320,00	378.410.320,00	-
12. Kebonagung	359.210.320,00	359.210.320,00	-
2. Kecamatan Kalianget	3.190.070.000,00	3.190.070.000,00	-
1. Pinggirpapas	462.761.000,00	462.761.000,00	-
2. Karanganyar	402.253.000,00	402.253.000,00	-
3. Marengan Laok	433.432.000,00	433.432.000,00	-
4. Kertasada	409.670.000,00	409.670.000,00	-
5. Kalimo'ok	421.639.000,00	421.639.000,00	-
6. Kalianget Barat	493.531.000,00	493.531.000,00	-
7. Kalianget Timur	566.784.000,00	566.784.000,00	-
3. Kecamatan Manding	4.401.031.840,00	4.401.031.840,00	-
1. Kasengan	382.440.000,00	382.440.000,00	-
2. Lalangon	349.610.320,00	349.610.320,00	-
3. Tenunan	417.068.000,00	417.068.000,00	-
4. Lanjuk	383.476.720,00	383.476.720,00	-
5. Gadding	475.475.920,00	475.475.920,00	-
6. Giring	441.609.520,00	441.609.520,00	-
7. Gunung Kembar	387.672.000,00	387.672.000,00	-
8. Jabaan	422.409.520,00	422.409.520,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
9. Manding Laok	383.476.720,00	383.476.720,00	-
10. Manding Timur	407.743.120,00	407.743.120,00	-
11. Manding Daya	350.050.000,00	350.050.000,00	-
4. Kecamatan Talango	3.987.517.160,00	3.987.517.160,00	-
1. Talango	451.209.520,00	451.209.520,00	-
2. Padike	475.475.920,00	475.475.920,00	-
3. Cabbiya	444.117.000,00	444.117.000,00	-
4. Essang	483.043.000,00	483.043.000,00	-
5. Kombang	465.727.000,00	465.727.000,00	-
6. Poteran	518.958.000,00	518.958.000,00	-
7. Palasa	503.646.000,00	503.646.000,00	-
8. Gapurana	645.340.720,00	645.340.720,00	-
5. Kecamatan Bluto	7.385.295.160,00	7.385.295.160,00	-
1. Guluk Manjung	362.410.000,00	362.410.000,00	-
2. Kapedi	502.695.000,00	502.695.000,00	-
3. Pakandangan Barat	421.022.000,00	421.022.000,00	-
4. Pakandangan Tengah	349.610.320,00	349.610.320,00	-
5. Pakandangan Sangrah	380.136.000,00	380.136.000,00	-
6. Aengdake	394.955.000,00	394.955.000,00	-
7. Aengbeje Kenek	388.851.000,00	388.851.000,00	-
8. Bluto	359.210.320,00	359.210.320,00	-
9. Lobuk	429.993.000,00	429.993.000,00	-
10. Bumbungan	359.210.320,00	359.210.320,00	-
11. Masaran	343.426.000,00	343.426.000,00	-
12. Palongan	372.442.000,00	372.442.000,00	-
13. Aengbaja Raje	336.054.000,00	336.054.000,00	-
14. Karang Campaka	326.678.000,00	326.678.000,00	-
15. Sera Barat	373.876.720,00	373.876.720,00	-
16. Sera Tengah	325.343.920,00	325.343.920,00	-
17. Sera Timur	349.610.320,00	349.610.320,00	-
18. Gingging	349.610.320,00	349.610.320,00	-
19. Errabu	334.817.000,00	334.817.000,00	-
20. Gilang	325.343.920,00	325.343.920,00	-
6. Kecamatan Saronggi	5.907.952.320,00	5.907.952.320,00	-
1. Pagarbatu	478.161.000,00	478.161.000,00	-
2. Tanjung	457.506.000,00	457.506.000,00	-
3. Kebundadap Timur	423.481.000,00	423.481.000,00	-
4. Langsar	490.142.320,00	490.142.320,00	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1		2	3	4
5.	Kebundadap Barat	371.284.000,00	371.284.000,00	-
6.	Saroka	388.308.000,00	388.308.000,00	-
7.	Tanamerah	429.770.000,00	429.770.000,00	-
8.	Nambakor	417.218.000,00	417.218.000,00	-
9.	Saronggi	386.599.000,00	386.599.000,00	-
10.	Muangan	358.095.000,00	358.095.000,00	-
11.	Juluk	447.239.000,00	447.239.000,00	-
12.	Aeng Tongtong	368.916.000,00	368.916.000,00	-
13.	Talang	557.395.000,00	557.395.000,00	-
14.	Kambangan Timur	333.838.000,00	333.838.000,00	-
7.	Kecamatan Lenteng	8.023.024.080,00	8.023.024.080,00	-
1.	Moncek Barat	355.726.000,00	355.726.000,00	-
2.	Moncek Tengah	353.249.000,00	353.249.000,00	-
3.	Moncek Timur	372.959.000,00	372.959.000,00	-
4.	Banaressep Timur	457.851.000,00	457.851.000,00	-
5.	Tarogan	340.729.000,00	340.729.000,00	-
6.	Kambangan Barat	361.036.000,00	361.036.000,00	-
7.	Poreh	407.170.000,00	407.170.000,00	-
8.	Lenteng Timur	451.209.520,00	451.209.520,00	-
9.	Lembung Timur	444.049.000,00	444.049.000,00	-
10.	Lenteng Barat	589.114.000,00	589.114.000,00	-
11.	Banaressep Barat	352.388.000,00	352.388.000,00	-
12.	Billapora Rebba	435.169.000,00	435.169.000,00	-
13.	Lembung Barat	357.535.000,00	357.535.000,00	-
14.	Ellak Laok	441.609.520,00	441.609.520,00	-
15.	Ellak Daya	440.389.000,00	440.389.000,00	-
16.	Daramista	383.476.720,00	383.476.720,00	-
17.	Jambu	349.610.320,00	349.610.320,00	-
18.	Cangkrenng	383.555.000,00	383.555.000,00	-
19.	Meddelan	389.498.000,00	389.498.000,00	-
20.	Sendir	356.701.000,00	356.701.000,00	-
8.	Kecamatan Giligenting	3.486.317.960,00	3.486.317.960,00	-
1.	Galis	451.209.520,00	451.209.520,00	-
2.	Gedugan	475.475.920,00	475.475.920,00	-
3.	Bringsang	395.419.000,00	395.419.000,00	-
4.	Aeng Anyar	441.609.520,00	441.609.520,00	-
5.	Lombang	502.700.000,00	502.700.000,00	-
6.	Jate	399.269.000,00	399.269.000,00	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1		2	3	4
7.	Banbaru	403.024.000,00	403.024.000,00	-
8.	Banmaleng	417.611.000,00	417.611.000,00	-
9.	Kecamatan Guluk- Guluk	5.301.717.680,00	5.301.717.680,00	-
1.	Bakeong	499.742.320,00	499.742.320,00	-
2.	Payudan Dundang	399.645.000,00	399.645.000,00	-
3.	Pordapor	397.077.000,00	397.077.000,00	-
4.	Guluk-Guluk	660.375.000,00	660.375.000,00	-
5.	Ketawang Laok	407.743.120,00	407.743.120,00	-
6.	Pananggungan	326.746.000,00	326.746.000,00	-
7.	Bragung	492.437.000,00	492.437.000,00	-
8.	Tambuko	366.841.000,00	366.841.000,00	-
9.	Payudan Nangger	377.547.000,00	377.547.000,00	-
10.	Payudan Daleman	417.546.000,00	417.546.000,00	-
11.	Payudan Karang Sokon	383.476.720,00	383.476.720,00	-
12.	Batuampar	572.541.520,00	572.541.520,00	-
10.	Kecamatan Ganding	5.878.480.120,00	5.878.480.120,00	-
1.	Bataal Barat	373.876.720,00	373.876.720,00	-
2.	Bataal Timur	398.143.120,00	398.143.120,00	-
3.	Rombiya Barat	398.143.120,00	398.143.120,00	-
4.	Rombiya Timur	480.542.320,00	480.542.320,00	-
5.	Talaga	432.009.520,00	432.009.520,00	-
6.	Billapora Barat	373.876.720,00	373.876.720,00	-
7.	Billapora Timur	398.143.120,00	398.143.120,00	-
8.	Ganding	475.475.920,00	475.475.920,00	-
9.	Gadu Timur	475.475.920,00	475.475.920,00	-
10.	Gadu Barat	475.475.920,00	475.475.920,00	-
11.	Ketawang Larangan	383.476.720,00	383.476.720,00	-
12.	Ketawang Parebaan	388.455.000,00	388.455.000,00	-
13.	Ketawang Daleman	385.650.000,00	385.650.000,00	-
14.	Ketawang Karay	439.736.000,00	439.736.000,00	-
11.	Kecamatan Pragaan	6.366.530.800,00	6.366.530.800,00	-
1.	Kaduara Timur	393.863.000,00	393.863.000,00	-
2.	Sendang	349.610.320,00	349.610.320,00	-
3.	Rombasan	331.905.000,00	331.905.000,00	-
4.	Sentol Laok	340.250.000,00	340.250.000,00	-
5.	Larangan	462.135.000,00	462.135.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
Perreng			
6. Sentol Daya	444.197.000,00	444.197.000,00	-
7. Pakamban Daya	465.875.920,00	465.875.920,00	-
8. Pakamban Laok	383.476.720,00	383.476.720,00	-
9. Jaddung	475.344.000,00	475.344.000,00	-
10. Pragaan Laok	451.209.520,00	451.209.520,00	-
11. Pragaan Daya	584.120.000,00	584.120.000,00	-
12. Prenduan	641.367.000,00	641.367.000,00	-
13. Aengpanas	422.103.000,00	422.103.000,00	-
14. Karduluk	621.074.320,00	621.074.320,00	-
12. Kecamatan Ambunten	5.787.781.400,00	5.787.781.400,00	-
1. Ambunten Barat	410.085.000,00	410.085.000,00	-
2. Ambunten Tengah	499.742.320,00	499.742.320,00	-
3. Ambunten Timur	392.996.000,00	392.996.000,00	-
4. Tambaagung Barat	372.766.000,00	372.766.000,00	-
5. Tambaagung Tengah	413.763.000,00	413.763.000,00	-
6. Tambaagung Ares	377.034.000,00	377.034.000,00	-
7. Sogian	383.151.000,00	383.151.000,00	-
8. Tambaagung Timur	383.476.720,00	383.476.720,00	-
9. Bukabu	349.610.320,00	349.610.320,00	-
10. Campor Barat	361.055.000,00	361.055.000,00	-
11. Keles	373.876.720,00	373.876.720,00	-
12. Campor Timur	339.013.000,00	339.013.000,00	-
13. Belluk Ares	349.610.320,00	349.610.320,00	-
14. Belluk Kenek	363.042.000,00	363.042.000,00	-
15. Belluk Raja	418.560.000,00	418.560.000,00	-
13. Kecamatan Pasongsongan	4.857.710.760,00	4.857.710.760,00	-
1. Montorna	517.122.000,00	517.122.000,00	-
2. Prancak	536.145.000,00	536.145.000,00	-
3. Campaka	498.183.000,00	498.183.000,00	-
4. Rajun	425.901.000,00	425.901.000,00	-
5. Lebbeng Timur	490.142.320,00	490.142.320,00	-
6. Lebbeng Barat	491.472.000,00	491.472.000,00	-
7. Soddara	509.291.000,00	509.291.000,00	-
8. Pasongsongan	481.969.000,00	481.969.000,00	-
9. Padangdangan	441.609.520,00	441.609.520,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
10. Panaongan	465.875.920,00	465.875.920,00	-
14. Kecamatan Dasuk	5.884.441.200,00	5.884.441.200,00	-
1. Slopeng	389.565.000,00	389.565.000,00	-
2. Semaan	373.876.720,00	373.876.720,00	-
3. Batubelah Barat	373.876.720,00	373.876.720,00	-
4. Batubelah Timur	365.126.000,00	365.126.000,00	-
5. Kecer	406.736.000,00	406.736.000,00	-
6. Bates	380.084.000,00	380.084.000,00	-
7. Bringin	445.665.000,00	445.665.000,00	-
8. Jelbudan	414.480.000,00	414.480.000,00	-
9. Kerta Barat	373.876.720,00	373.876.720,00	-
10. Kerta Timur	373.876.720,00	373.876.720,00	-
11. Nyapar	384.895.000,00	384.895.000,00	-
12. Dasuk Barat	366.209.000,00	366.209.000,00	-
13. Dasuk Timur	349.610.320,00	349.610.320,00	-
14. Dasuk Laok	428.384.000,00	428.384.000,00	-
15. Mantajun	458.180.000,00	458.180.000,00	-
15. Kecamatan Rubaru	4.752.436.720,00	4.752.436.720,00	-
1. Mandala	514.070.000,00	514.070.000,00	-
2. Pakondang	493.853.000,00	493.853.000,00	-
3. Matanair	471.164.000,00	471.164.000,00	-
4. Tambaksari	383.476.720,00	383.476.720,00	-
5. Banasareh	390.495.000,00	390.495.000,00	-
6. Bunbarat	368.780.000,00	368.780.000,00	-
7. Karangnangka	446.642.000,00	446.642.000,00	-
8. Basoka	474.568.000,00	474.568.000,00	-
9. Duko	394.361.000,00	394.361.000,00	-
10. Rubaru	403.034.000,00	403.034.000,00	-
11. Kalebbengan	411.993.000,00	411.993.000,00	-
16. Kecamatan Batang-Batang	7.254.261.600,00	7.254.261.600,00	-
1. Kolpo	476.002.000,00	476.002.000,00	-
2. Tamidung	506.639.000,00	506.639.000,00	-
3. Batang Batang Laok	465.875.920,00	465.875.920,00	-
4. Batang Batang Daya	621.074.320,00	621.074.320,00	-
5. Totosan	411.129.000,00	411.129.000,00	-
6. Banuaju Barat	417.343.120,00	417.343.120,00	-
7. Banuaju Timur	407.743.120,00	407.743.120,00	-
8. Janangger	432.009.520,00	432.009.520,00	-

Lokasi		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1		2	3	4
9.	Nyabakan Timur	491.492.000,00	491.492.000,00	-
10.	Nyabakan Barat	492.592.000,00	492.592.000,00	-
11.	Jangkong	373.876.720,00	373.876.720,00	-
12.	Legung Barat	407.743.120,00	407.743.120,00	-
13.	Legung Timur	499.742.320,00	499.742.320,00	-
14.	Dapenda	524.008.720,00	524.008.720,00	-
15.	Bilangan	353.114.000,00	353.114.000,00	-
16.	Lombang	373.876.720,00	373.876.720,00	-
17.	Kecamatan Batuputih	6.140.092.880,00	6.140.092.880,00	-
1.	Aengmerah	479.699.000,00	479.699.000,00	-
2.	Tengedan	382.327.000,00	382.327.000,00	-
3.	Juruan Laok	499.742.320,00	499.742.320,00	-
4.	Juruan Daya	445.712.000,00	445.712.000,00	-
5.	Badur	398.143.120,00	398.143.120,00	-
6.	Gedang Gedang	446.013.000,00	446.013.000,00	-
7.	Batuputih Kenek	436.262.000,00	436.262.000,00	-
8.	Batuputih Laok	499.742.320,00	499.742.320,00	-
9.	Batuputih Daya	476.690.000,00	476.690.000,00	-
10.	Bantelan	400.329.000,00	400.329.000,00	-
11.	Larangan Barma	430.062.000,00	430.062.000,00	-
12.	Larangan Kerta	403.877.000,00	403.877.000,00	-
13.	Bulla'an	443.351.000,00	443.351.000,00	-
14.	Sergang	398.143.120,00	398.143.120,00	-
18.	Kecamatan Dungkek	5.990.814.440,00	5.990.814.440,00	-
1.	Candi	432.009.520,00	432.009.520,00	-
2.	Jadung	425.309.000,00	425.309.000,00	-
3.	Romben Barat	398.143.120,00	398.143.120,00	-
4.	Romben Rana	349.610.320,00	349.610.320,00	-
5.	Romben Guna	421.223.000,00	421.223.000,00	-
6.	Tamansare	381.064.000,00	381.064.000,00	-
7.	Bicabi	407.743.120,00	407.743.120,00	-
8.	Dungkek	417.343.120,00	417.343.120,00	-
9.	Bunpenang	359.004.000,00	359.004.000,00	-
10.	Bungin Bungin	326.820.000,00	326.820.000,00	-
11.	Lapa Taman	403.449.000,00	403.449.000,00	-
12.	Lapa Laok	392.766.000,00	392.766.000,00	-
13.	Lapa Daya	349.610.320,00	349.610.320,00	-
14.	Bancamara	475.475.920,00	475.475.920,00	-
15.	Banra'as	451.244.000,00	451.244.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
19. Kecamatan Gapura	6.366.273.120,00	6.366.273.120,00	-
1. Grujugan	420.695.000,00	420.695.000,00	-
2. Longos	464.962.000,00	464.962.000,00	-
3. Andulang	417.343.120,00	417.343.120,00	-
4. Gapura Timur	392.477.000,00	392.477.000,00	-
5. Mandala	325.343.920,00	325.343.920,00	-
6. Gersik Putih	355.343.000,00	355.343.000,00	-
7. Gapura Tengah	359.971.000,00	359.971.000,00	-
8. Gapura Barat	417.343.120,00	417.343.120,00	-
9. Panagan	338.845.000,00	338.845.000,00	-
10. Paloklo'an	367.916.000,00	367.916.000,00	-
11. Banjar Timur	344.504.000,00	344.504.000,00	-
12. Banjar Barat	383.078.000,00	383.078.000,00	-
13. Batudinding	349.610.320,00	349.610.320,00	-
14. Baban	353.270.000,00	353.270.000,00	-
15. Karangbuddi	376.351.000,00	376.351.000,00	-
16. Braji	349.610.320,00	349.610.320,00	-
17. Poja	349.610.320,00	349.610.320,00	-
20. Kecamatan Gayam	4.893.959.120,00	4.893.959.120,00	-
1. Pancor	587.750.000,00	587.750.000,00	-
2. Prambanan	585.425.000,00	585.425.000,00	-
3. Gendang Timur	443.536.000,00	443.536.000,00	-
4. Gendang Tengah	426.796.000,00	426.796.000,00	-
5. Jambuir	415.910.000,00	415.910.000,00	-
6. Gayam	475.483.000,00	475.483.000,00	-
7. Kalowang	548.275.120,00	548.275.120,00	-
8. Nyamplong	389.937.000,00	389.937.000,00	-
9. Gendang Barat	528.515.000,00	528.515.000,00	-
10. Tarebung	492.332.000,00	492.332.000,00	-
21. Kecamatan Nonggunong	3.289.944.720,00	3.289.944.720,00	-
1. Nonggunong	385.265.000,00	385.265.000,00	-
2. Sumber	357.548.000,00	357.548.000,00	-
3. Tanahmerah	372.699.000,00	372.699.000,00	-
4. Sokaramme Timur	414.543.000,00	414.543.000,00	-
5. Sokaramme Paseser	446.707.000,00	446.707.000,00	-
6. Talaga	419.411.000,00	419.411.000,00	-
7. Rosong	379.363.000,00	379.363.000,00	-
8. Sonok	514.408.720,00	514.408.720,00	-
22. Kecamatan Ra'as	4.298.420.000,00	4.298.420.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
1. Ketupat	504.673.000,00	504.673.000,00	-
2. Jungkat	421.375.000,00	421.375.000,00	-
3. Kropoh	540.421.000,00	540.421.000,00	-
4. Karangnangka	521.662.000,00	521.662.000,00	-
5. Alasmalang	437.619.000,00	437.619.000,00	-
6. Poteran	431.389.000,00	431.389.000,00	-
7. Brakas	512.934.000,00	512.934.000,00	-
8. Tonduk	484.145.000,00	484.145.000,00	-
9. Gua Gua	444.202.000,00	444.202.000,00	-
23 Kecamatan Masalembu	1.863.564.000,00	1.863.564.000,00	-
1. Sukajeruk	527.882.000,00	527.882.000,00	-
2. Masalima	542.569.000,00	542.569.000,00	-
3. Masakambing	389.537.000,00	389.537.000,00	-
4. Kramian	403.576.000,00	403.576.000,00	-
24. Kecamatan Arjasa	9.729.971.040,00	9.729.971.040,00	-
1. Pajanangger	679.090.000,00	679.090.000,00	-
2. Sawah Sumur	467.701.000,00	467.701.000,00	-
3. Paseraman	538.675.120,00	538.675.120,00	-
4. Gelaman	549.902.000,00	549.902.000,00	-
5. Buddi	591.912.000,00	591.912.000,00	-
6. Kolo Kolo	617.340.000,00	617.340.000,00	-
7. Angkatan	524.008.720,00	524.008.720,00	-
8. Kalisangka	504.808.720,00	504.808.720,00	-
9. Bilis Bilis	538.675.120,00	538.675.120,00	-
10. Laok Jangjang	441.609.520,00	441.609.520,00	-
11. Sumbernangka	349.827.000,00	349.827.000,00	-
12. Duko	524.008.720,00	524.008.720,00	-
13. Kalikatak	548.275.120,00	548.275.120,00	-
14. Arjasa	524.008.720,00	524.008.720,00	-
15. Kalinganyar	480.542.320,00	480.542.320,00	-
16. Angon Angon	514.408.720,00	514.408.720,00	-
17. Sambakati	514.408.720,00	514.408.720,00	-
18. Pandeman	398.360.000,00	398.360.000,00	-
19. Pabian	422.409.520,00	422.409.520,00	-
25. Kecamatan Sapeken	5.958.363.920,00	5.958.363.920,00	--
1. Sepanjang	782.044.000,00	782.044.000,00	-
2. Tanjung Kiaok	495.445.000,00	495.445.000,00	-
3. Sakala	432.282.000,00	432.282.000,00	-
4. Pagerungan Besar	510.739.000,00	510.739.000,00	-
5. Pagerungan Kecil	508.568.000,00	508.568.000,00	-

Lokasi	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran (Penyaluran)	Sisa Anggaran
1	2	3	4
6. Saseel	490.181.000,00	490.181.000,00	-
7. Sapeken	711.245.000,00	711.245.000,00	-
8. Sabuntan	516.244.000,00	516.244.000,00	-
9. Paleat	595.257.000,00	595.257.000,00	-
10. Sadulang	450.483.000,00	450.483.000,00	-
11. Saur Saebus	465.875.920,00	465.875.920,00	-
26 Kecamatan Batuan	2.524.605.040,00	2.524.605.040,00	-
1. Patean	349.610.320,00	349.610.320,00	-
2. Babbalan	349.610.320,00	349.610.320,00	-
3. Gedungan	325.343.920,00	325.343.920,00	-
4. Gunggung	349.610.320,00	349.610.320,00	-
5. Batuan	402.676.720,00	402.676.720,00	-
6. Torbang	398.143.120,00	398.143.120,00	-
7. Gelugur	349.610.320,00	349.610.320,00	-
27. Kecamatan Kangayan	4.461.446.720,00	4.461.446.720,00	-
1. Saobi	514.408.720,00	514.408.720,00	-
2. Kangayan	615.611.000,00	615.611.000,00	-
3. Torjek	619.576.000,00	619.576.000,00	-
4. Cangkramaan	417.803.000,00	417.803.000,00	-
5. Tembayangan	400.554.000,00	400.554.000,00	-
6. Batuputih	445.188.000,00	445.188.000,00	-
7. Daandung	506.200.000,00	506.200.000,00	-
8. Timur Jangjang	491.011.000,00	491.011.000,00	-
9. Jukong Jukong	451.095.000,00	451.095.000,00	-

4.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pembantuan, baik yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang berikan kepada pemerintahan tingkat bawahnya, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD sebagai pelaksana program kegiatan.

1. Permasalahan dan upaya penyelesaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep.

Permasalahan :

- Cuaca masih menjadi kendala utama yang setiap tahun mengalami perubahan yang tidak menentu sehingga kurang mendukung kegiatan produksi garam;

- Belum meratanya teknologi untuk produksi pada waktu musim kemarau basah;
- Kualitas garam yang dihasilkan petambak masih sangat beragam;
- Kesulitan modal bagi petambak garam maupun koperasi dalam penyerapan garam;
- Adanya dampak Covid-19 yang juga dapat menghambat kegiatan produksi garam.

Upaya Penyelesaian :

- Dilakukannya Pelatihan Teknis Teknologi Tepat Guna berupa yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi di saat musim kemarau basah;
- Perlu adanya lahan integrasi garam agar meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam;
- Perlunya standarisasi harga garam dalam tata niaga garam pada saat pandemi maupun tidak;
- Dibentuknya Koperasi-koparasi Garam di masing-masing kecamatan yang terdapat lahan produksi garam rakyat sehingga koperasi ini dapat berperan sebagai penyangga produksi garam rakyat di masing-masing kecamatan;
- Perlu adanya kerjasama antara petambak, koperasi dan pemerintah setempat demi memajukan swasembada garam di Kabupaten Sumenep Khususnya dan Nasional pada umumnya.

2. Permasalahan dan Upaya Penyelesaian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Permasalahan :

- Kesadaran dan minat petani untuk ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) rendah;
- Pemasaran hasil produk masih di tingkat lokal.

Upaya Penyelesaian

- Dalam rangka menumbuhkan minat dan kesadaran petani untuk ikut AUTP perlu adanya kegiatan sosialisasi yang memeberikan pemahaman tentang manfaat AUTP;

- Perlu adanya jaringan pangsa pasar yang lebih luas untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh petani.

3. Permasalahan dan upaya penyelesaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan :

- Adanya pandemi covid 19 mengharuskan adanya perubahan Peraturan Kepala Desa terkait Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga hal ini menyulitkan pemerintahan desa dalam melakukan perubahan peraturan desa;
- Pemotongan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sebesar 10% untuk penanganan pandemi covid 19 yang belum dipahami oleh pemerintahan desa.

Upaya Penyelesaian :

- Melakukan koordinasi dengan camat dan kepala desa serta melakukan pendampingan dalam penyusunan perubahan Peraturan Kepala Desa;
- Melaksanakan sosialisasi kepada operator dan pemerintahan desa sehingga serapan anggaran dana desa dan alokasi dana desa tetap bisa terserap.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumenep Tahun Anggaran 2020 (LKPJ ATA) merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan.

Secara prinsip dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal, merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan oleh seluruh elemen pemerintahan yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan. Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan dan permasalahan yang muncul yang salah satunya diakibatkan oleh berbagai dinamika global maupun perkembangan eksternal yang kurang terantisipasi. Berbagai kelemahan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2020 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Pemerintah Daerah) baik di tingkat Kecamatan maupun Desa/Kelurahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Sumenep yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Daerah membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya guna

perbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang. Karena tantangan dan permasalahan yang terjadi selama kurun waktu 2020, merupakan bagian dari proses pembangunan yang perlu terus untuk diselesaikan, sehingga di masa mendatang perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Sumenep dapat lebih berkualitas yang sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan masyarakat Sumenep Sejahtera dan berkeadilan.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Akhir Tahun Anggaran 2020. Manakala dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2020 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi pemerintahan maupun redaksional laporan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala langkah dan upaya kita untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumenep, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.